



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2045

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional dan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2045.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode tahun 2025-2045.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2045 yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk periode tahun 2025-2045.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

RPJPD merupakan:

- a. penjabaran visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah Kabupaten Mamuju Tengah untuk tahun 2025-2045 yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045, kajian lingkungan hidup strategis RPJPD, rencana tata ruang wilayah tahun 2025-2045.
- b. dokumen rencana pembangunan daerah yang memberikan arah sekaligus menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun di Kabupaten Mamuju Tengah bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya untuk mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan dalam rangka menyejahterakan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang berkeadilan, sebagai upaya mendukung pencapaian RPJPN Tahun 2025-2045 dalam rangka perwujudan Indonesia Emas 2045.

Pasal 3

- (1) Maksud penetapan RPJPD adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah sebagai pedoman bagi penyusunan RPJMD Kabupaten Mamuju Tengah.

- (2) Tujuan penetapan adalah penetapan dokumen rencana pembangunan daerah untuk:
- a. mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
 - b. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar ruang, antar waktu, serta antar fungsi pemerintahan maupun antara pusat dan daerah;
 - c. menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penanganan, pelaksanaan, dan pengawasan;
 - d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan
 - e. menjamin terciptanya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 4

- (1) Dokumen RPJPD dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika:
- a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. permasalahan dan isu strategis
 - d. visi dan misi daerah;
 - e. arah kebijakan dan sasaran pokok daerah; dan
 - f. penutup.
- (2) Dokumen RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi RPJPD.
- (2) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan:
- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil RPJPD;
 - b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN;
 - c. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045;
 - d. konsistensi antara RPJPD dengan kajian lingkungan hidup strategis RPJPD;
 - e. konsistensi antara RPJPD dengan RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045; dan
 - f. kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan evaluasi RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah; dan

- c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah.
- (4) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan daerah.

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup antara lain:
- a. terjadinya bencana alam;
 - b. goncangan politik;
 - c. krisis ekonomi;
 - d. konflik sosial budaya;
 - e. gangguan keamanan;
 - f. pemekaran daerah; atau
 - g. perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
Pada tanggal 28 April 2025
BUPATI MAMUJU TENGAH,

ttd

ARSAL ARAS

Diundangkan di Tobadak
pada tanggal 28 April 2025
Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

ttd

LITHA FEBRIANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LUKMAN,S.Sos
NIP.19690604 200112 1 007

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN
MAMUJU TENGAH TAHUN 2025-2045

I. UMUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 berpedoman pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 diwujudkan dalam visi, misi, arah kebijakan, dan tujuan utama pembangunan jangka panjang Daerah selama 20 (dua puluh) tahun yang akan dicapai oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah. RPJPD merupakan perencanaan yang mengakomodir berbagai pemangku kepentingan (stakeholder) yang terdiri dari masyarakat, pemerintah, organisasi kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi politik, dan perguruan tinggi, sehingga perumusan visi dan misi juga merupakan produk kolektif stakeholders. Peraturan Daerah tentang RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 terdiri dari 4 bab dan 6 pasal yang mengatur mengenai pengertian-pengertian, muatan RPJPD, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD, dan Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, yang diantaranya berisi Visi, Misi, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045. RPJPD digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD. Pentahapan rencana pembangunan jangka panjang daerah dijadikan pedoman dalam masing-masing periode RPJMD sesuai dengan visi, misi, dan program Kepala Daerah/Bupati.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH NOMOR 8

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan Pembangunan adalah suatu pengarahannya penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu berdasarkan keadaan sosial ekonomi yang lebih baik secara efektif dan efisien. Perencanaan pembangunan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Barat yang terbentuk sejak Tahun 2013 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah dalam Provinsi Sulawesi Barat. Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan dan pembangunan secara berkesinambungan dalam jangka panjang dibutuhkan perencanaan jangka panjang yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Mamuju Tengah, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Tata cara dan yang menjadi substansi dalam RPJPD adalah rumusan arah kebijakan, sasaran pokok, indikator kinerja serta target kinerja dari sasaran pokok untuk menjadi acuan pada setiap periode RPJMD. RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2013-2025 akan segera berakhir. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 18 ayat 1, setiap daerah diminta menyusun Rancangan Awal RPJPD paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya periode. RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

Indonesia Emas Tahun 2045 yang menjadi Visi RPJPN Tahun 2025-2045 dengan fokus pada Transformasi Sosial, Transformasi Ekonomi dan Transformasi Tata Kelola perlu didukung dengan kontribusi pembangunan di tingkat daerah sesuai urusan dan kewenangan masing-masing. Untuk mendukung visi Indonesia Emas 2045, dibutuhkan sinkronisasi dan sinergitas antara perencanaan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, inovatif dan responsif, serta selaras dengan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045. Selain itu dalam penyusunan RPJPD memperhatikan RTRW sebagaimana amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor

1 Tahun 2024 bahwa penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045 berpedoman pada rencana tata ruang wilayah dan dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RTRW atau revisi RTRW. Oleh karena itu, penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 memperhatikan muatan revisi Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034 dan revisi Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037.

1.2. Dasar Hukum

Adapaun dasar hukum penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4);

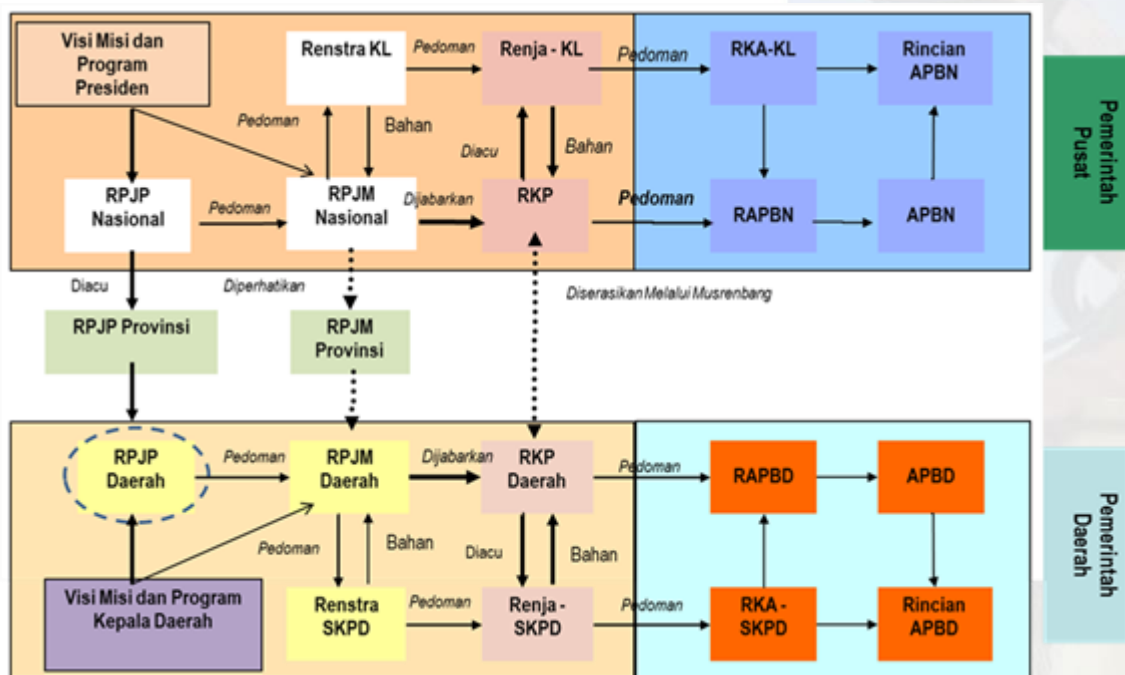
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6633);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
16. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
17. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
21. Peraturan Menteri Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2014-2034;
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 127);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037.

1.3. Hubungan Antardokumen

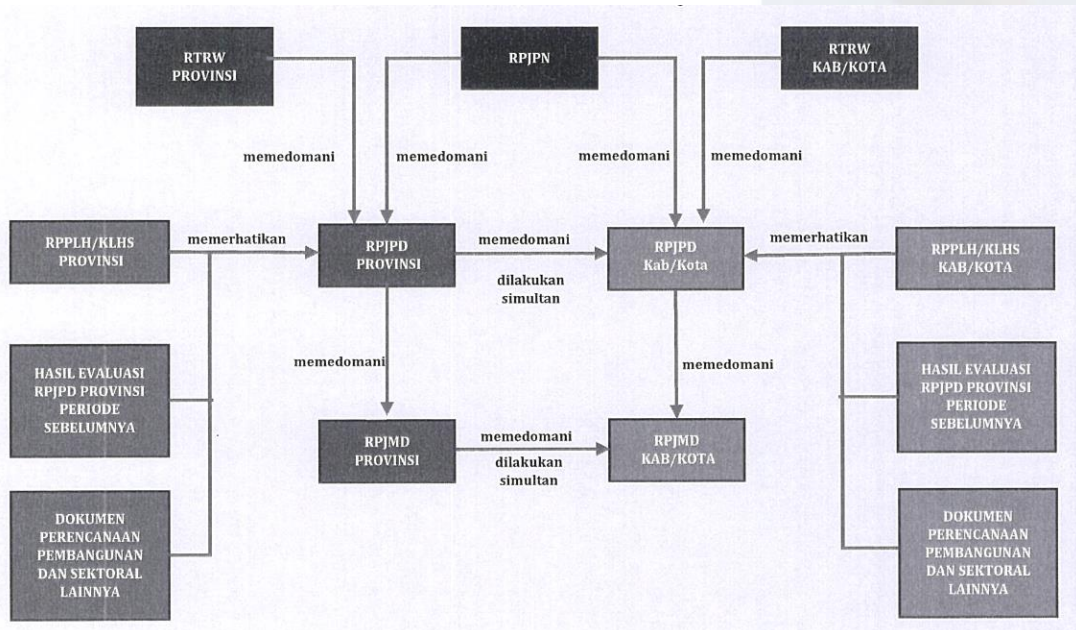
Dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045 disusun dengan mengacu dan memperhatikan dokumen perencanaan nasional provinsi maupun daerah disekitarnya. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rencana pembangunan daerah memiliki keterkaitan dan terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional maupun provinsi.

Gambar 1. 1 Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah



Penyusunan RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah memperhatikan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat dan RPJP Nasional. Pada tahap selanjutnya RPJPD akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai pedoman teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu lima tahun. Selanjutnya RPJMD Kabupaten/Kota akan dijabarkan menjadi rencana tahunan daerah yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang diacu oleh Perangkat Daerah untuk dijabarkan menjadi Rencana Tahunan SKPD yang disebut Rencana Kerja (Renja). Dokumen Renja ini akan menjadi dasar Perangkat Daerah dalam mengusulkan RKA Perangkat Daerah dan selanjutnya akan dirangkum menjadi RAPBD. Dokumen ini akan ditindaklanjuti menjadi APBD dan akhirnya menjadi dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA Perangkat Daerah.

Gambar 1. 2 Hubungan Antar Dokumen RPJP dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



Penyusunan RPJPD Kabupaten juga harus memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang memberi acuan mengenai struktur dan pola ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan, agar kebijakan dan sasaran dalam RPJPD selaras dengan atau tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Provinsi dan RTRW Kabupaten. Selain memperhatikan RTRW, penyusunan RPJPD Kabupaten juga memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP), dan Rencana Induk Pariwisata. Hal ini bertujuan agar dapat tercipta keselarasan antara kebijakan, rencana, dan program pembangunan dengan kaidah pembangunan berkelanjutan, sehingga mampu mengelola potensi yang menimbulkan dampak dan/atau resiko lingkungan hidup di Kabupaten/Kota.

1.4. Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dan strategi pembangunan jangka panjang sekaligus menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta dan masyarakat) dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. RPJPD ini menjadi pedoman bagi perencanaan dan pembangunan daerah yang akan dilaksanakan untuk 20 (dua puluh) tahun kedepan. Adapun tujuan penyusunan RPJPD yakni:

- a. menjadi dasar penyusunan RPJMD secara teknokratik dan menjadi pedoman dalam merumuskan visi, misi dan program bagi calon Kepala Daerah yang akan mengikuti Pilkada serentak Tahun 2024;
- b. sebagai dasar atau acuan penyusunan RPJMD dilakukan dengan cara menyelaraskan sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;

- c. sebagai tolok ukur dalam mengukur dan melakukan evaluasi kinerja setiap lima tahunan setiap Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

1.5. Sistematika

Sistematika Dokumen RPJPD ini terdiri atas enam bab:

BAB I Pendahuluan memuat latar Belakang, dasar hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika.

BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah memuat Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing dan Aspek Pelayanan Umum, evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana prasarana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis memuat permasalahan pembangunan dan isu strategis yang relevan dengan daerah untuk dua puluh tahun.

BAB IV Visi dan Misi Daerah memuat visi daerah 2025-2045 dan misi yang akan dilaksanakan daerah untuk mewujudkan visi daerah sampai dengan tahun 2045.

BAB V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok memuat Arah kebijakan yang merupakan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Sasaran Pokok yang merupakan gambaran rangkaian kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang menggambarkan terwujudnya Visi RPJPD 2025-2045. Kinerja Wajib Pembangunan Jangka Panjang yang menggambarkan tujuh fokus pembangunan daerah.

BAB VI Penutup memuat pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, diantaranya melalui manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

Analisis pada aspek geografi perlu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan aspek demografi, menggambarkan kondisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu pada kabupaten.

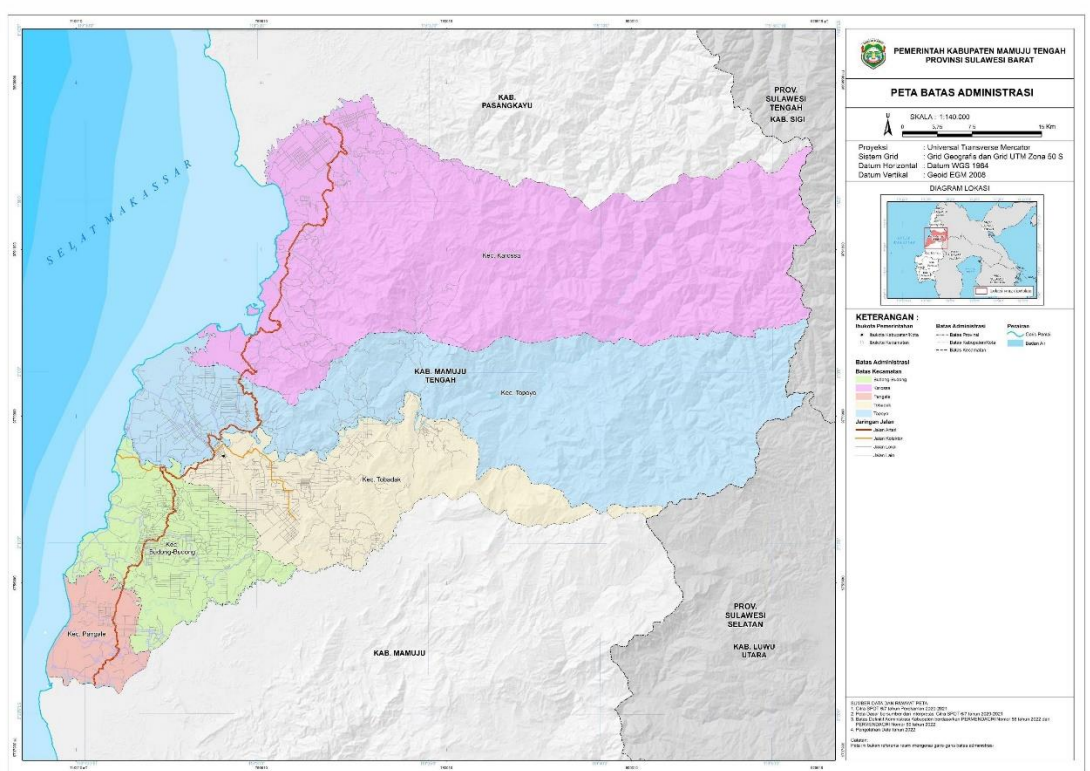
2.7.1 Geografi

Kabupaten Mamuju Tengah adalah salah satu dari 6 (enam) Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Mamuju berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, tanggal 11 Januari Tahun 2013. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km². Berdasarkan peta RBI 2014 pada dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 3.100,87 Km² (310.086,92) Ha, yang merupakan 18,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.916,02 km²).

Secara Geografis Kabupaten Mamuju Tengah terletak pada Bagian Barat Pulau Sulawesi dan berposisi pada bentangan Selat Makassar, yakni 1^o47'82" – 2^o17'31" Lintang Selatan, 119^o08'13" – 119^o24'08" Bujur Timur, Jakarta (0^o0'0", Jakarta = 160^o48'28" Bujur Timur Greenwich). Dengan batas wilayah:

- a) Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Benggaulu Desa Benggaulu Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
- b) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Batu Bicara, Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan, Kecamatan Pipikoro Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah;
- c) Sebelah selatan berbatasan dengan Sungai Karama dan Desa Tarailu Kecamatan Sampaga, Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju; dan
- d) Sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar (UU 23 2014 pasal 14 ayat 6 tentang batas wilayah pesisir) (penataan kembali batas dan luas wilayah kabupaten, Kecamatan, desa).

Gambar 2. 1 Peta Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Perda RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Kondisi geografi Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari kondisi kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD), Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Tutupan Lahan, Indeks Risiko Bencana, Indeks Ketahanan Daerah dan Emisi Gas Rumah Kaca.

(1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)

perhitungan IKLH mulai diterapkan hingga level kabupaten/kota. Indikator untuk menghitung IKLH kapaten/kota sedikit berbeda dengan indikator untuk menghitung nilai IKLH provinsi dan nasional. Sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, IKLH merupakan perpaduan konsep Environmental Quality Index (EQI) dan konsep Environmental Performance Index (EPI). IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup dan sebagai bahan informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

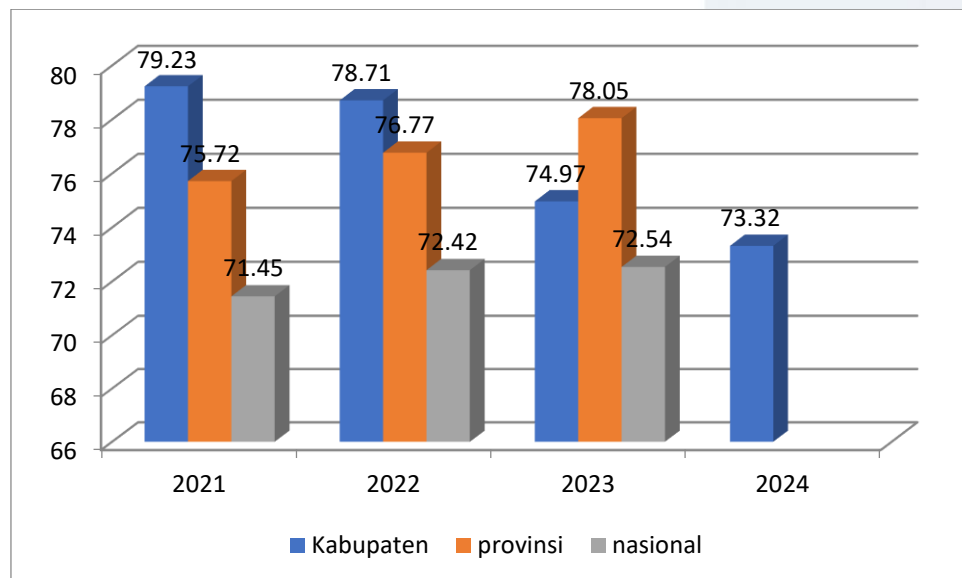
Pada Tabel 2.1 terlihat bahwa Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD) daerah mencapai peningkatan dalam 4 tahun terakhir, yakni sebesar 71,38 pada tahun 2019 menjadi sebesar 78,71 pada tahun 2022. Angka ini lebih tinggi dengan rata-rata provinsi dan rata-rata nasional:

Tabel 2. 1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2013-2024

Kabupaten / Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten							71,38		79,23	78,71	74,97	73,32
Provinsi			68,78	64,45	74,47	71,09	72,03	73,60	75,72	76,77	78,05	
Nasional	63,13	63,42	68,23	65,73	66,46	65,14	66,55	70,27	71,45	72,42	72,54	

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2025

Gambar 2. 2 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Nasional, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2021-2024



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2025

Indeks Kualitas Air

Indeks Kualitas Air (IKA) menilai kualitas air dengan merujuk kepada baku mutu khusus air yang secara umum diterima sebagai kriteria kualitas air yang baik. Nilai indeks menurun seiring meningkatnya tingkat pencemaran. Capaian indeks kualitas air Kabupaten Mamuju Tengah dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 2 Indeks Kualitas Air Tahun 2013-2024

Kabupaten / Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten							66,67	-	67,50	63,33	54,44	50,00

Provinsi			53,3 7	44,1 6	56,9 1	53,0 8	56,1 5	52,4 4	56,0 4	56,4 1		
Nasional	51,8 2	52,1 9	52	50,0 2	53	51,0 1	52,6 2	53,5 3	52,8 2	53,8 8		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2023

Indeks Kualitas Air mengalami kenaikan karena jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan sebanyak 192 kab/kota (4.884 titik pantau) sedangkan yang mengalami penurunan 157 kab/kota (3.881 titik pantau). Kenaikan IKA di 192 kab/kota disebabkan oleh ketersediaan anggaran, implementasi kegiatan seperti pengawasan terhadap industri dan pembinaan terhadap usaha skala kecil. Adapun Indeks Kualitas Air Kabupaten Mamuju Tengah data yang ada 2019 sampai 2022 dengan capaian yang sangat baik lebih tinggi dari capaian provinsi dan nasional

Indeks Kualitas Udara

Indeks Kualitas Udara merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai pencemaran udara di suatu daerah. Capaian indeks kualitas udara Kabupaten Mamuju Tengah dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 3 Indeks Kualitas Udara Tahun 2013-2024

Kabupaten / Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					99,6 4	90,8 3	88,4 8	-	89,1 3	91,7 3	92,0 8	92,2 9
Provinsi			89,2 1	86,4 0	91,4 5	89,2 6	89,9 7	89,7 2	90,9 7	91,8 8		
Nasional	80,1 7	80,5 4	84,9 6	81,7 8	87,0 3	84,7 4	86,5 6	87,2 1	87,3 6	88,0 6		

Sumber: Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2023

Indeks Kualitas Udara (IKU) mengalami peningkatan secara nasional karena terdapat 42 kab/kota dimana berdasarkan evaluasi terhadap indeks respon daerah pada Program Langit Biru pada umumnya kab/kota tersebut memiliki kebijakan dan peraturan, SDM, serta implementasi berupa menyiapkan sarana prasarana seperti pedestrian, jalur sepeda, Ruang Terbuka Hijau (RTH), penerapan area rendah emisi (LEZ); melaksanakan program seperti *Car Free Day* (CFD) dan gerakan masyarakat (germas) bersepeda. Meskipun Kabupaten Mamuju Tengah secara khusus belum memiliki kebijakan dan peraturan terkait Indeks Kualitas Udara (IKU) namun capaian enam tahun terakhir menunjukkan hasil yang sangat baik dimana Indeks Kualitas Udara (IKU) lebih baik dari nilai provinsi maupun capaian nasional

Indeks Kualitas Tutupan Lahan

Indeks Kualitas Tutupan Lahan yang selanjutnya disingkat ITL adalah nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan lahan dan tutupan vegetasi non hutan. Capaian indeks kualitas tutupan lahan

Kabupaten Mamuju Tengah dalam sepuluh tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

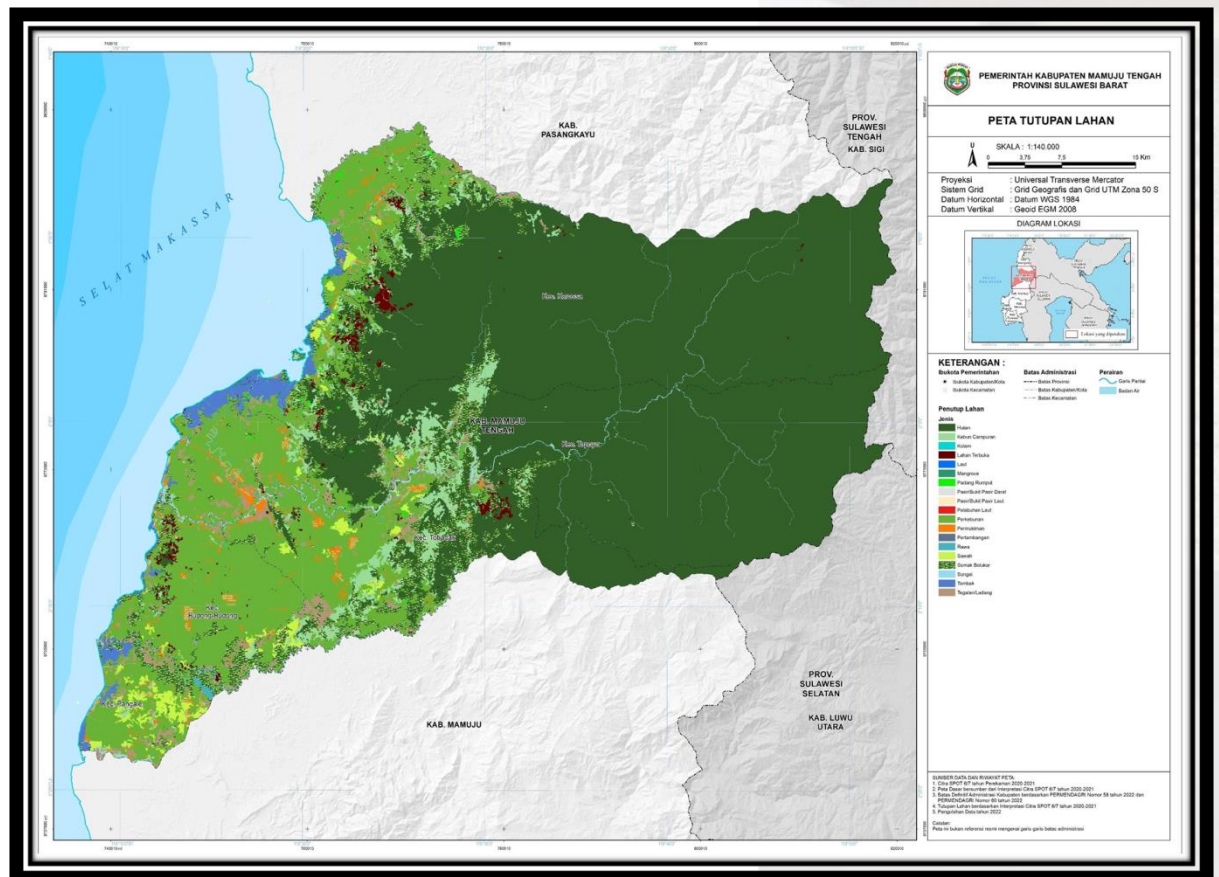
Tabel 2. 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					82,23	79,41	79,41	62,08	-	81,05	78,56	78,27
Provinsi			67,30	67,18	70,97	70,96	70,48	70,53				
Nasional	58,83	59,01	58,83	58,42	60,31	61,03	62,00	60,74	60,23	60,72		

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2025

Data Indeks Kualitas Lahan, terdapat 145 kab/kota yang meningkat nilai IKL-nya, sedangkan yang mengalami penurunan sebanyak 116 kab/kota. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penambahan luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) seluas 148.689,35 ha secara nasional.

Gambar 2. 3 Peta Tutupan Lahan Kabupaten Mamuju Tengah

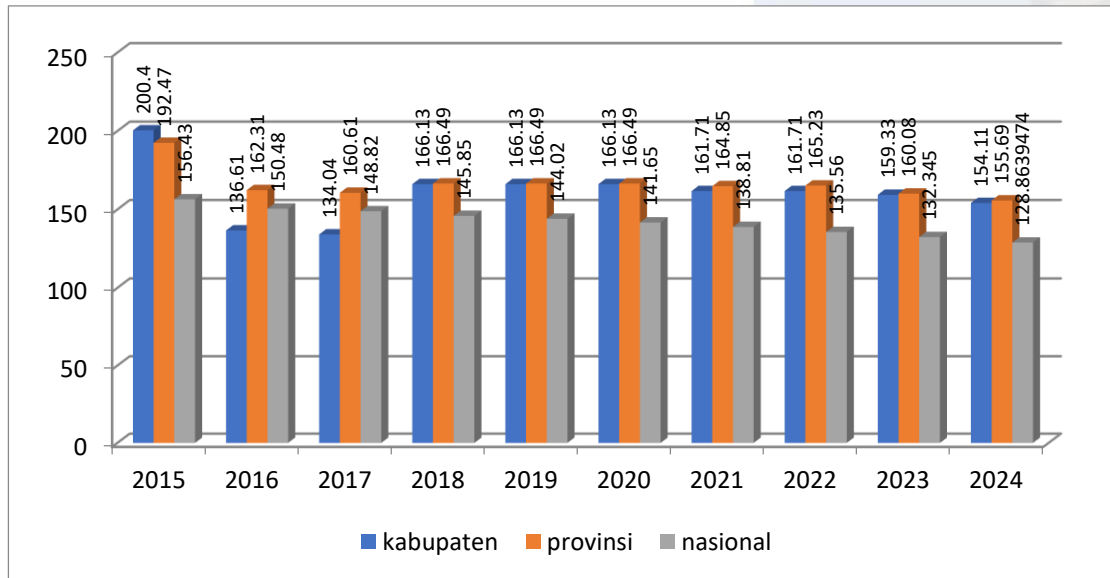


Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

(2) Indeks Risiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah suatu perangkat analisis kebencanaan yang berbentuk indeks yang menunjukkan riwayat nyata kebencanaan yang telah terjadi dan menimbulkan kerugian.

Gambar 2. 4 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2015-2024

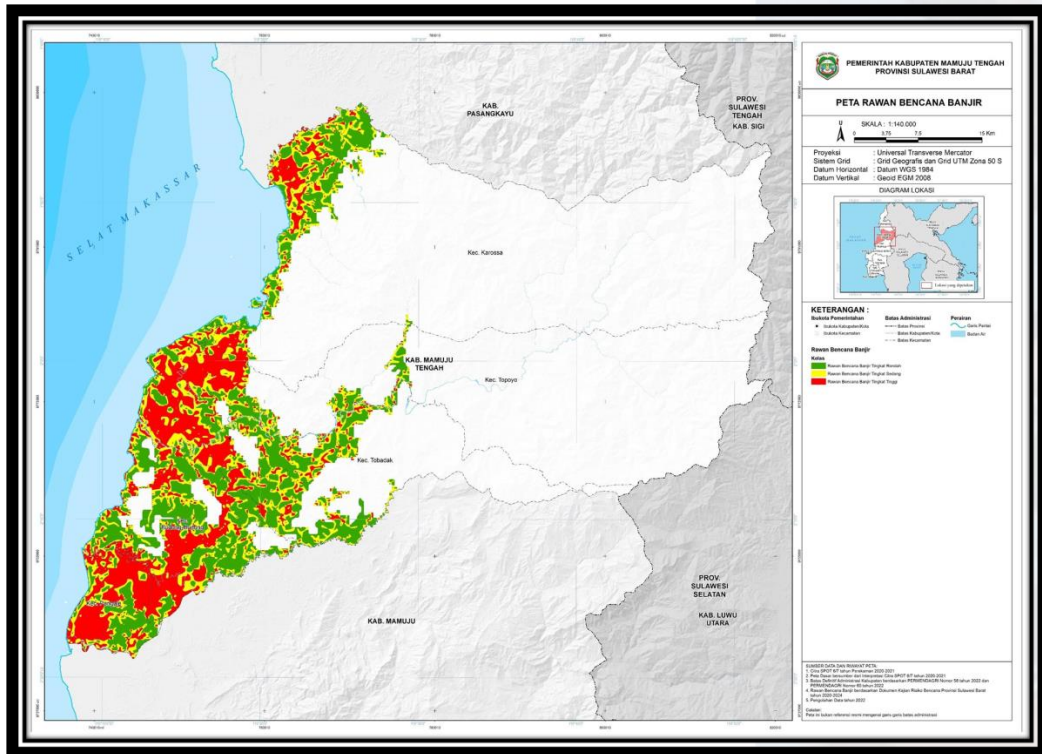


Sumber: Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2025

Indeks pengkajian risiko terdiri dari indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, indeks kerusakan dan indeks kapasitas. Indeks-indeks tersebut sangat bergantung kepada jenis ancaman bencana, kecuali kajian ketahanan daerah pada komponen kapasitas lebih difokuskan kepada institusi pemerintah di kawasan kajian sehingga hasil kajiannya dibedakan berdasarkan kawasan administrasi kajian

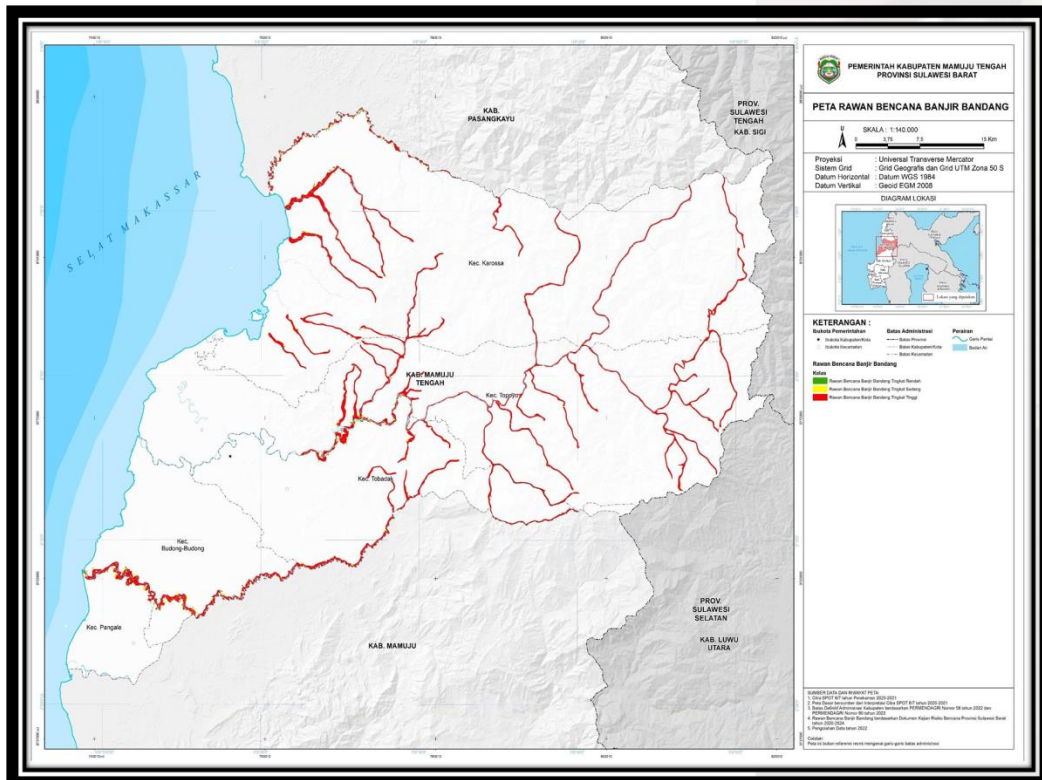
Berdasarkan data dari Data Informasi Bencana Indonesia BNPB dan BPBD Kabupaten Mamuju Tengah Jenis bencana dengan jumlah kejadian terbanyak dan dengan dampak terbesar adalah banjir, baik dampaknya terhadap keselamatan jiwa manusia, kerusakan bangunan permukiman dan kerusakan lahan, dan ancaman bencana lainnya gempa bumi, tsunami, tanah longsor, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi. Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), Kabupaten Mamuju Tengah memiliki indeks risiko tinggi.

Gambar 2. 5 Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Mamuju Tengah



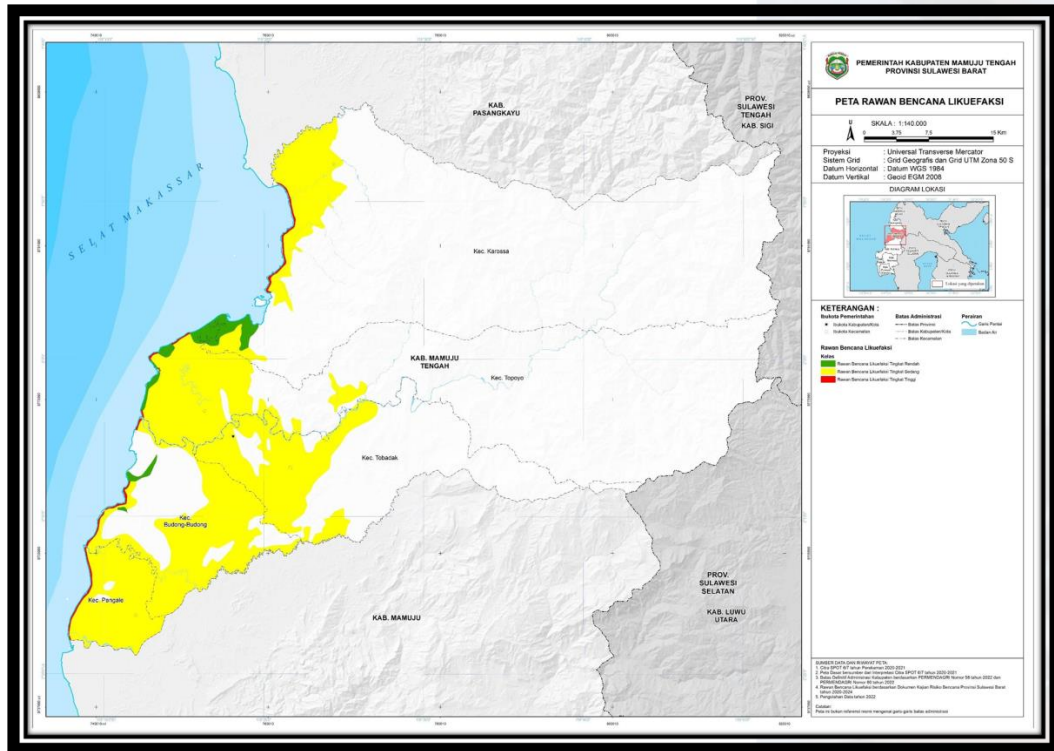
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Gambar 2. 6 Peta Bencana Banjir Bandang Kabupaten Mamuju Tengah



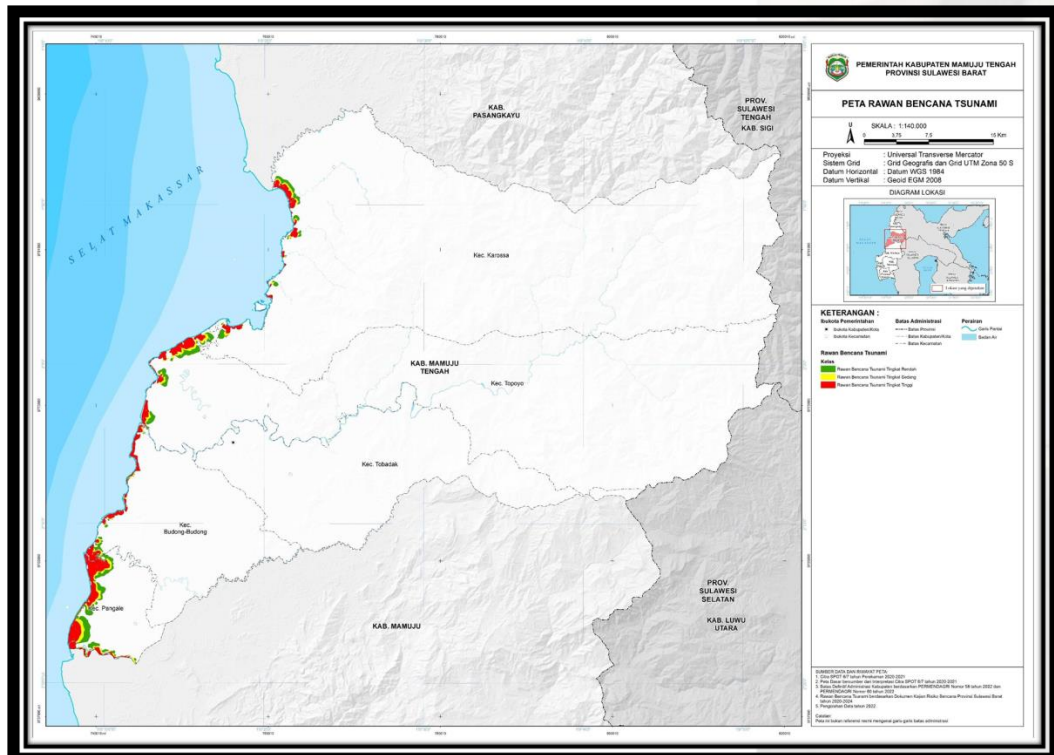
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Gambar 2. 7 Peta Rawan Bencana Likuefaksi Kabupaten Mamuju Tengah



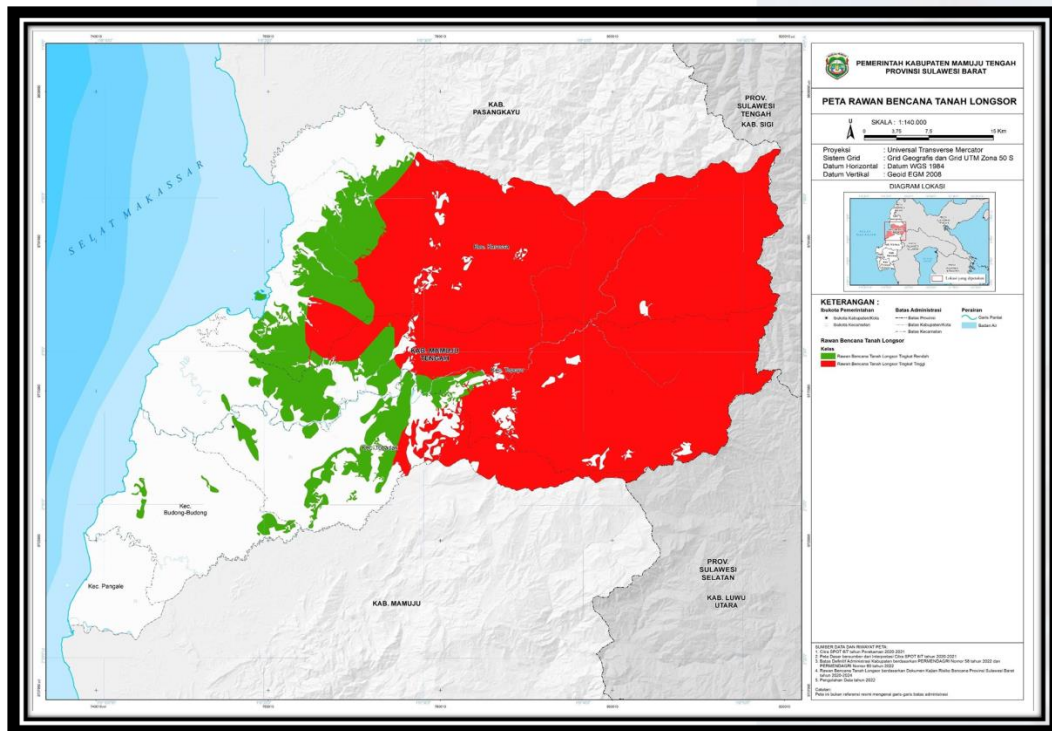
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Gambar 2. 8 Peta Bencana Tsunami Kabupaten Mamuju Tengah



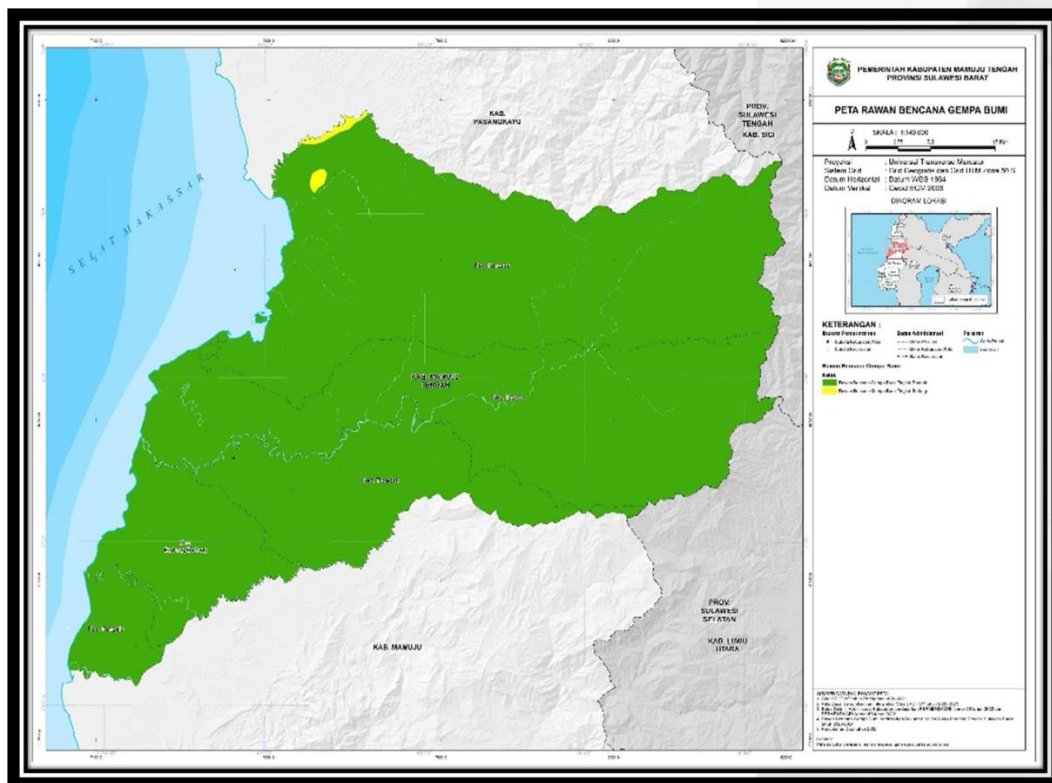
Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Gambar 2. 9 Peta Rawan Bencana Tanah Longsor Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

Gambar 2. 10 Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

2.1.2 Demografi

(1) Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 mencapai 140.028 jiwa. dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun sebesar 2,08 persen. Jika dilihat dari distribusi penyebarannya, jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Topoyo sebanyak 36.541 jiwa. Sedangkan sebaran jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Pangale sebanyak 14.986 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2. 5 Perbandingan Jumlah Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi / Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	115.188	118.188	121.384	124.380	127.601	130.827	134.028	135.280	137.380	140.028	142.455	143.274
Provinsi	1.234.251	1.258.090	1.282.180	1.306.478	1.330.961	1.355.554	1.380.256	1.419.229	1.436.842	1.458.606	1.481.077	1.503.232
Nasional	248.818,1	252.164,8	255.461,7	258.705,0	261.890,8	265.015,3	268.074,6	270.203,9	272.682,1	275.773,8	278.696,2	281.603,8

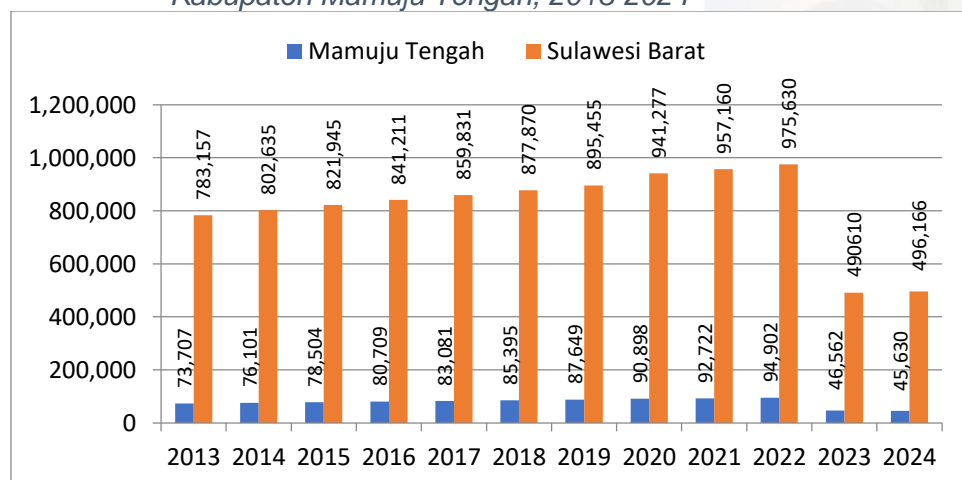
Ket: Jumlah penduduk Nasional dalam Ribuan Jiwa

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

(2) Jumlah Penduduk <15 Tahun - >64 tahun

Penduduk berusia kurang dari 15 tahun dan lebih dari 64 tahun merupakan penduduk dengan usia non produktif. Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan dari tahun 2013-2022.

Gambar 2. 11 Jumlah Penduduk Kurang dari 15 Tahun dan Lebih dari 64 Tahun Kabupaten Mamuju Tengah, 2013-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Jumlah Penduduk <15 Tahun

Tabel 2. 6 Jumlah Penduduk Kurang dari 15 Tahun di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	37.980	38.490	39.187	39.832	40.552	41.321	42.110	39.750	38.819	40.053	40.957	39.508
Sulawesi Barat	401.012	404.335	407.979	411.836	416.399	421.520	427.010	410.133	409.181	409.475	414.120	416.241

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Jumlah Penduduk >64 tahun

Tabel 2. 7 Jumlah Penduduk Lebih dari 64 Tahun di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	3.501	3.597	3.693	3.839	3.968	4.111	4.269	4.632	4.839	5.073	5.605	6.122
Sulawesi Barat	50.802	51.120	52.238	53.431	54.731	56.164	57.791	67.819	70.501	73.501	76.490	79.925

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

(3) Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya angka jumlah penduduk yang diakibatkan oleh meledaknya angka kelahiran. Ada tiga faktor demografi yang memengaruhi laju pertumbuhan penduduk yaitu fertilitas (kelahiran), mortalitas (kematian), dan migrasi (Anggraini, 2012). Khususnya fertilitas yang memiliki pengaruh besar terhadap tingginya laju pertumbuhan penduduk sehingga jumlah penduduk menjadi besar.

Tabel 2. 8 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	2,85	2,78	2,70	2,47	2,59	2,53	2,45	2,45	2,08	1,93	1,73	NA
Sulawesi Barat	2,65	2,04	1,91	1,90	1,87	1,96	1,95	1,98	1,66	1,55	1,54	1,52
Nasional	1,37	1,35	1,31	1,27	1,23	1,19	1,15	1,25	1,22	1,17	1,13	1,11

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Pertumbuhan penduduk mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, bertambahnya penduduk akan memperluas pasar, dan perluasan pasar akan mempertinggi tingkat spesialisasi dalam perekonomian.

(4) Rasio Jenis Kelamin

Rasio jenis kelamin adalah perbandingan antara jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita pada suatu daerah dan pada waktu tertentu, yang biasanya dinyatakan dalam banyaknya penduduk pria per 100 wanita.

Tabel 2. 9 Rasio dan Jenis Kelamin Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	107,27	106,90	106,88	106,53	106,56	106,30	106,11	106,94	106,85	106,77	106,07	105,79
Sulawesi Barat	100,54	100,59	100,64	100,68	100,72	100,75	100,79	103,02	102,95	102,88	102,80	102,73
Nasional	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	101,00	100,09	102,03	102,03	102,02	102,08	102,07

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025. diolah

Dilihat dari rasio jenis kelamin penduduk kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan angka 106,77 pada tahun 2022, hal ini berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 106 jiwa penduduk laki-laki. Perkembangan rasio jenis kelamin di Mamuju Tengah dalam 10 tahun terakhir menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Angka rasio jenis kelamin kabupaten Mamuju Tengah lebih tinggi jika dibandingkan dengan rasio jenis kelamin Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional.

(5) Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk adalah banyaknya penduduk per satuan luas. Kegunaannya adalah sebagai dasar kebijakan pemerataan penduduk dalam program transmigrasi. Kepadatan penduduk kasar atau crude population density (CPD) menunjukkan jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah.

Tabel 2. 10 Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

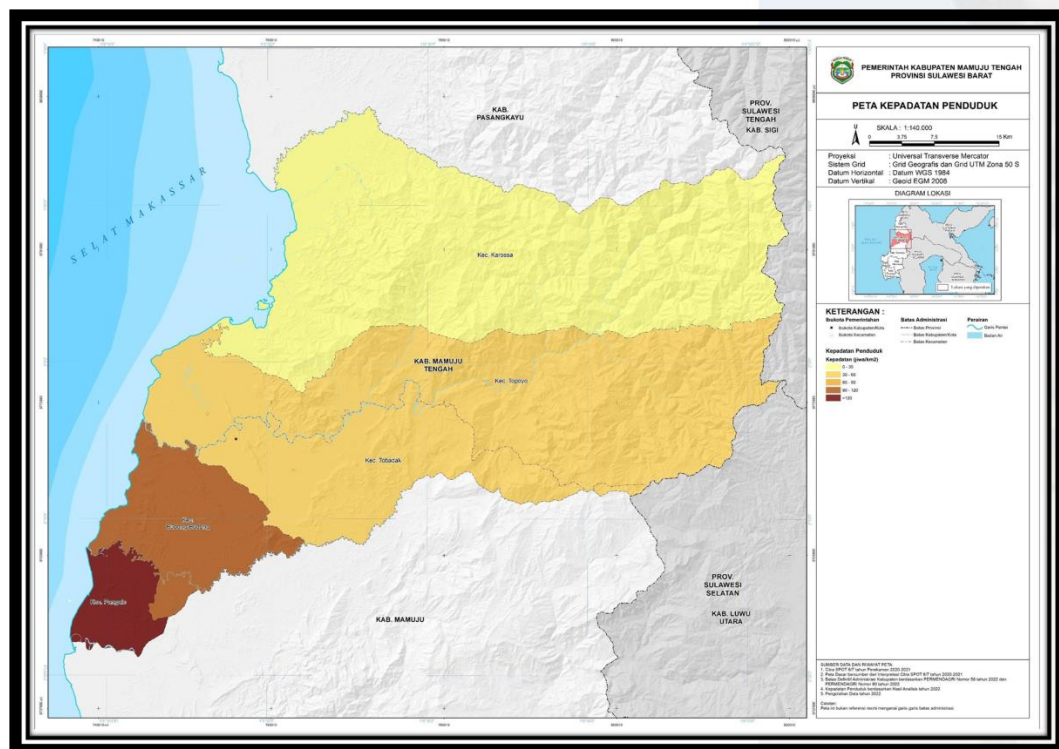
Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	38	39	40	41	42	43	44	45	46	51	46	46

Provinsi	73	74	76	77	79	81	82	84	86	88	89	91
Nasional	130	132	134	135	137	138	140	141	142	146	147	149

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025. diolah

Kepadatan Penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah terus meningkat dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2022 kepadatan penduduk Mamuju Tengah mencapai 51, artinya dalam setiap satu kilometer persegi wilayah terdapat 51 jiwa.

Gambar 2. 12 Peta Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah



Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Mamuju Tengah, 2022

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan Masyarakat dinilai dari dua aspek, pertama Ekonomi yang dinilai dari laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Kontribusi Sektor Pertanian, Industri dan Jasa Terhadap PDRB, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Angka Kemiskinan, Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Jumlah Penduduk di atas usia 15 tahun, Indeks Pembangunan Manusia dan Laju Inflasi. Kedua Aspek Sosial Budaya yang dinilai dari Indeks Keluarga Sehat, Indeks Kualitas Keluarga, Prevalensi Stunting, Tingkat Prevalensi Tuberculosis, Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Ketimpangan Gender, Indeks Perlindungan Anak dan Indeks Pembangunan Pemuda.

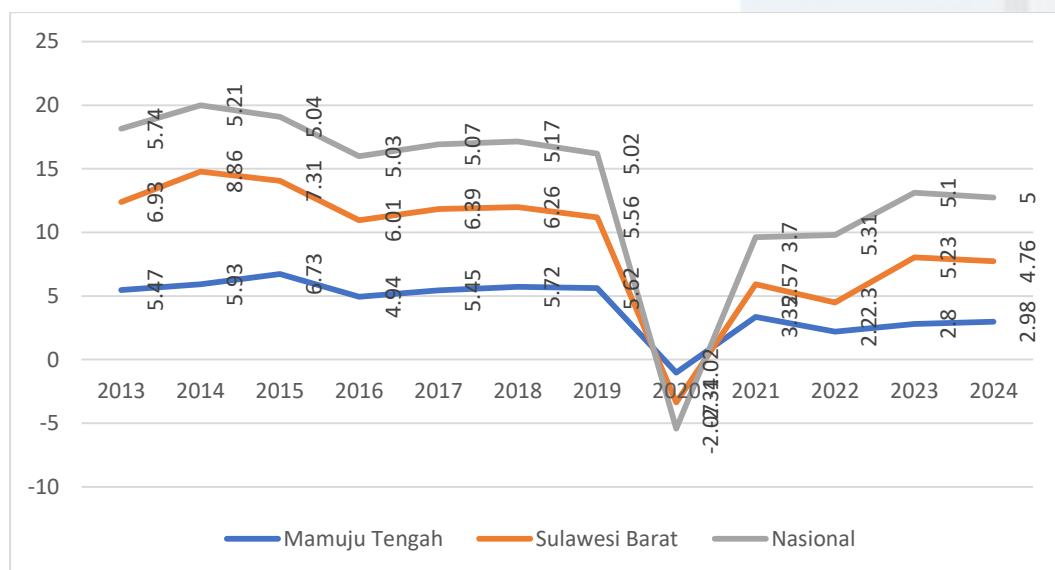
2.2.1 Ekonomi

Aspek ekonomi dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita ADHB, PDRB Per Kapita ADHK, Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Struktur PDRB, Kontribusi Sektor Industri Terhadap Struktur PDRB, Kontribusi Sektor Jasa terhadap Struktur PDRB, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, Angka Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Rasio Gini, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Jumlah Penduduk >15 tahun, Indeks Pembangunan Manusia, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Per Kapita dan Laju Inflasi.

(1) Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan PDRB yang biasa juga dikenal dengan Pertumbuhan Ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja ekonomi suatu wilayah. Capaian laju pertumbuhan ekonomi kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2. 13 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah selama kurun waktu sepuluh tahun (2013-2022) cukup fluktuatif. Pertumbuhan ekonomi tertinggi yang pernah dicapai pada tahun 2015 sebesar 6,73 persen dan paling rendah yakni pada tahun 2021 mengalami kontraksi sampai -1,02 persen akibat pandemic Covid-19. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Mamuju Tengah diatas rata-rata pertumbuhan PDRB Nasional namun masih dibawah pertumbuhan PDRB Provinsi Sulawesi Barat. Pasca Pandemi Covid-19 pemulihan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah mengalami akselerasi lebih besar dibandingkan Provinsi Sulawesi Barat tetapi masih dibawah Pertumbuhan PDRB Nasional. Hal ini disebabkan adanya kebijakan pembatasan ekspor CPO yang sangat mempengaruhi perekonomian di Mamuju Tengah yang mana share terbesar

dalam PDRB berasal dari Sektor pertanian khususnya sub sektor perkebunan kelapa sawit.

Dari data di atas dapat dilihat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sulawesi Barat maupun Nasional.

(2) *PDRB Per Kapita ADHB*

Indikasi positif yang ditunjukkan oleh angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mamuju Tengah juga diikuti oleh perbaikan dari sisi indikator pendapatan per kapita. PDRB Per Kapita merupakan PDRB suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per Kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk. Adapun PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Mamuju Tengah disajikan pada tabel berikut:

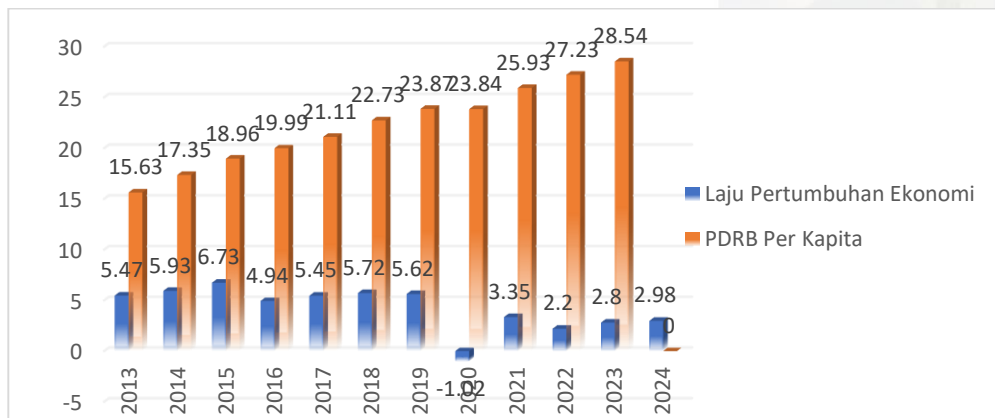
Tabel 2. 11 PDRB Per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan Nasional, 2013-2024 (juta rupiah)

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	15,63	17,35	18,96	19,99	21,11	22,73	23,87	23,84	25,93	27,23	28,54	-
Sulawesi Barat	20,45	23,41	25,73	27,51	29,67	32,06	34,11	32,83	35,19	37,03	39,55	42,72
Nasional	38,63	42,43	45,12	47,93	51,89	55,99	59,31	57,28	62,25	71,03	75,0	78,6

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

PDRB Per Kapita ADHB Kabupaten Mamuju Tengah meningkat dalam sepuluh tahun terakhir. Tetapi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita ADHB Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional masih jauh lebih rendah.

Gambar 2. 14 Perkembangan PDRB Per Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025

Kabupaten Mamuju Tengah masih dalam upaya memulihkan Kembali geliat ekonomi daerah pasca pandemic Covid-19. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan pertumbuhan ekonomi sebelum covid yang rata-rata di atas lima persen, perlahan mulai naik di tahun 2021 mencapai 3,35 persen dan Kembali melambat di tahun 2022 yakni 2,2 persen, akan tetapi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi ini tidak terlalu mempengaruhi pendapatan per kapita masyarakat Mamuju Tengah dilihat dari PDRB per kapita di tahun 2022 sebesar 27,24 juta lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan laju pertumbuhan ekonomi 3,35 persen dan PDRB per Kapita 25,95 juta rupiah.

(3) PDRB Per Kapita ADHK

PDRB Per Kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara atau daerah.

Tabel 2. 12 PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2022

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	N/A	N/A	N/A	15,29	15,71	16,20	16,92	16,38	16,61	16,65		
Sulawesi Barat	N/A	N/A	N/A	21,06	22,00	22,95	24,16	22,66	22,89	23,07		
Nasional	32,87	34,12	35,16	36,46	37,85	39,34	41,02	39,77	40,78	42,46		

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023

Rata-rata PDRB Per Kapita ADHK Kabupaten Mamuju Tengah meningkat dari tahun ke tahun. Akan tetapi jika dibandingkan dengan PDRB Per Kapita ADHK Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional masih lebih rendah.

(4) Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Struktur PDRB

Kontribusi sektor pertanian terhadap struktur PDRB dihitung dari kontribusi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Dengan sub sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian dari tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, jasa pertanian dan perburuan. Sub sektor kehutanan dan pibangan kayu, dan subsektor perikanan.

Tabel 2. 13 Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Struktur PDRB Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan PDB Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	71,78	71,12	71,61	70,43	70,43	71,41	70,70	71,65	72,80	73,04	72,92	74,18
Sulawesi Barat	42,28	41,76	41,99	41,47	41,52	42,17	41,50	42,94	43,83	44,25	44,68	46,11
Nasional	13,36	13,34	13,49	13,48	13,16	12,81	12,71	13,70	13,28	12,40	12,53	12,61

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Jika dibandingkan dengan provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, kontribusi sektor pertanian terhadap struktur PDRB Kabupaten Mamuju Tengah lebih tinggi. Lebih dari 73 persen PDRB Kabupaten Mamuju Tengah dikontribusi oleh sektor pertanian. Hal ini menandakan bahwa perekonomian di Kabupaten Mamuju Tengah masih ditopang oleh sektor primer yakni pertanian khususnya sub sektor perkebunan dengan komoditas perkebunan sawit.

(5) Kontribusi Sektor Industri terhadap Struktur PDRB

Kategori industri pengolahan (manufaktur) merupakan kategori yang memiliki peranan terbesar kedua dalam penciptaan nilai tambah di Mamuju Tengah. Pada tahun 2024, kategori ini menyumbang 8,71 persen terhadap total PDRB. Peranan kategori ini menurun dari tahun 2023 nilainya 9,23 persen. Jika dilihat dari tren selama 2013-2024, peranan kategori industri manufaktur ini mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun.

Sektor ini didominasi oleh industri pengolahan minyak kelapa sawit. Pada Kabupaten Mamuju Tengah, terdapat perusahaan pengolahan minyak kelapa sawit yang cukup besar dan mengekspor ke luar daerah. Selain industri pengolahan minyak kelapa sawit, sektor manufaktur di Mamuju Tengah juga didukung oleh industri barang galian bukan logam.

Tabel 2. 14 Kontribusi Sektor Industri Terhadap Struktur PDRB Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan PDB Nasional, 2013-2024

Kabupaten / Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	9,43	9,67	9,03	7,77	8,02	7,94	8,51	8,63	8,98	9,07	9,23	8,71
Sulawesi Barat	8,18	10,37	10,32	9,53	9,96	9,71	9,73	10,08	10,67	10,82	11,16	10,41
Nasional	21,03	21,08	20,99	20,52	20,16	19,86	19,70	19,87	19,24	18,34	18,67	18,98

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(6) Kontribusi Sektor Jasa terhadap Struktur PDRB

Kontribusi sektor jasa dihitung dari kumulatif jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa kesehatan dan kegiatan sosial serta jasa lainnya. Kontribusi kategori Jasa Perusahaan relatif stabil selama lima tahun terakhir, yaitu kurang dari 1 (satu) persen untuk tahun 2015-2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa peranan kategori ini relatif kecil dibandingkan dengan peranan kategori lain.

Kategori administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib meliputi kegiatan bersifat pemerintahan. Selama kurun waktu 2019-2023 peranannya menunjukkan sedikit penurunan, yaitu dengan nilai kontribusi sebesar 3,79-2,83 persen. Pada tahun 2023 jasa pendidikan menyumbang sebesar 2,73 persen terhadap total PDRB Mamuju Tengah, menurun dari tahun 2022 sebesar 2,88 persen. Tren pertumbuhan kategori ini cenderung stabil, dari 3,19 persen di tahun 2019 menjadi 2,26 persen pada tahun 2023.

Kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial mencakup kegiatan penyediaan jasa kesehatan dan kegiatan sosial yang cukup luas cakupannya. Pada tahun 2023

kontribusi sektor ini sebesar 0,25 persen dan laju pertumbuhan sebesar 3,85 persen. Selama tahun 2019-2023 peranannya stabil yaitu dengan nilai kontribusi sekitar 0,25 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya berfluktuatif selama periode 2019-2023.

Kontribusi jasa lainnya terhadap perekonomian Mamuju Tengah tahun 2023 relatif kecil yaitu 6,62 milyar rupiah, kontribusinya sejak 2019-2023 relatif stabil di kisaran 0,16 persen. Sedangkan laju pertumbuhannya cenderung berfluktuatif selama tahun 2019-2023.

Tabel 2. 15 Kontribusi Sektor Jasa Terhadap Struktur PDRB Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan PDB Nasional, 2013-2022

Kabupaten / Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mamuju Tengah	9,91	9,98	10,27	12,41	12,35	11,60	11,83	11,12	10,15	9,90		
Sulawesi Barat	21,90	21,68	21,38	22,23	21,83	21,58	21,90	21,30	19,94	19,65		
Nasional	17,76	17,86	18,50	18,71	18,55	18,47	18,90	19,98	18,79	17,36		

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023

(7) Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan rasio antara Indeks Harga yang diterima oleh petani dan indeks harga yang di bayar oleh petani. Dari indeks harga yang diterima petani, dapat dilihat perkembangan harga komoditas/ produk pertanian yang dijual oleh petani secara periodik. Dari indeks harga yang dibayar petani, dapat dilihat perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh petani di pedesaan maupun perkembangan harga barang dan jasa yang diperlukan untuk memproduksi komoditas/produk pertanian. NTP memberikan indikasi secara umum mengenai daya beli komoditas/produk pertanian terhadap barang dan jasa yang saat ini dibeli oleh petani baik untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari maupun untuk biaya produksi dan penambahan barang modal.

Tabel 2. 16 Nilai Tukar Petani Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Provinsi	104,06	102,95	104,35	108,6	106,93	110,1	111,84	109,45	118,51	117,72	121,47	144,62
Nasional	102,90	100,92	100,161	102,02	101,27	102,3	96,23	101,65	104,64	107,33	112,46	119,62

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

NTP>100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih besar daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami kenaikan dalam hal perdagangan ketika rata-rata tingkat harga yang mereka terima mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada tingkat rata-rata harga yang dibayarkan.

NTP=100 : Ketika hubungan secara umum antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani sama. Harga pertanian secara umum dianggap setara antara tingkat harga komoditas yang dijual petani dan harga barang yang dibeli petani.

NTP<100 : Indeks Harga yang Diterima oleh Petani lebih kecil daripada Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani. Petani mengalami penurunan dalam hal perdagangan ketika harga yang mereka bayar mengalami kenaikan yang lebih cepat daripada harga yang mereka terima.

(8) Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan terhadap indeks harga yang dibayar nelayan. NTN merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/ daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi.

Tabel 2. 17 Nilai Tukar Nelayan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nasional	N/A	104,63	106,14	108,23	111,01	113,53	100,23	N/A	104,69	106,45	105,40	101,76

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

(9) Angka Kemiskinan

Angka Kemiskinan (persentase kemiskinan) Head Count Index (HCI-P0) adalah persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).

Tabel 2. 18 Angka Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	-	-	6,86	6,83	6,95	7,14	6,87	6,79	7,13	7,17	7,32	7,72
Provinsi	12,30	12,27	12,40	11,74	11,30	11,25	11,02	10,87	11,29	11,75	11,49	11,21
Nasional	11,47	10,96	11,13	10,70	10,12	9,66	9,22	10,19	9,71	9,57	9,36	9,03

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(10) *Garis Kemiskinan*

Garis Kemiskinan mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non-makanan.

Tabel 2. 19Garis Kemiskinan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024 (ribu rupiah)

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	-	-	203.1 20	215.7 69	226.5 59	236.6 99	239.5 92	255.4 40	265.4 13	290.0 30	309.2 27	324.8 88
Provinsi	213.4 03	233.8 38	261.8 81	286.8 40	302.8 52	319.1 21	328.1 44	350.7 43	364.2 51	405.1 87	433.1 31	454.8 79
Nasional	275.7 79	312.3 28	344.8 09	361.9 90	387.1 60	410.6 70	440.5 38	458.9 47	486.1 68	535.5 47	550.4 58	595.2 42

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(11) *Jumlah Penduduk Miskin*

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Adapun jumlah penduduk miskin di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat

Tabel 2. 20Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024 (ribu jiwa)

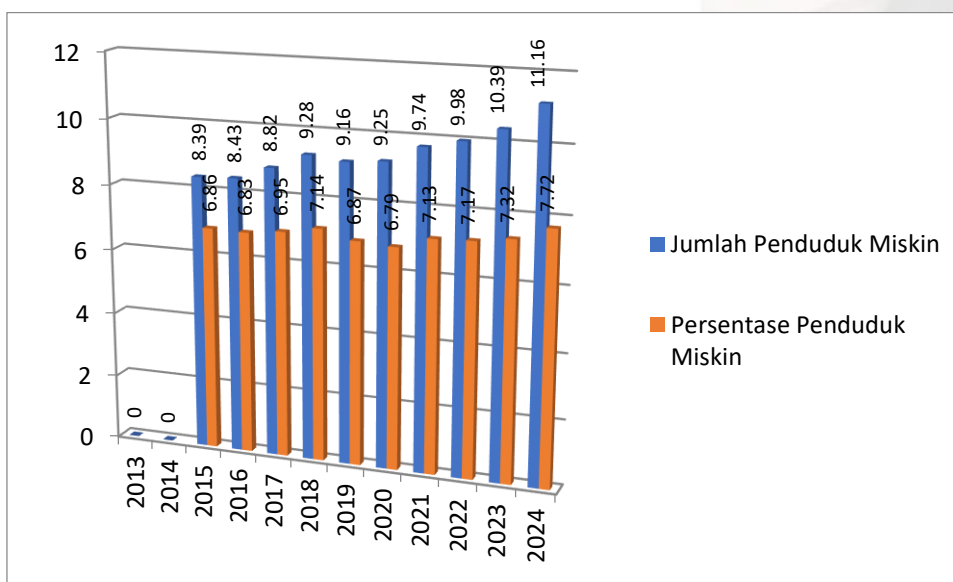
Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	-	-	8,39	8,43	8,82	9,28	9,16	9,25	9,74	9,98	10,39	11,16
Provinsi	151,1 1	153, 89	160,4 8	152,7 3	149,7 6	151,7 8	151,4	152,0 2	157,1 9	165,7 2	164,1 4	162,1 9
Nasional	1063 4,47	105 07,2	2851 3,57	2776 4,32	2658 2,99	2567 4,58	2478 5,87	2754 9,69	2650 3,65	2636 3,27	25.89 8,55	24.05 4,72

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Tingkat kemiskinan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat dan menekan laju pertumbuhannya menjadi salah satu tujuan pembangunan ekonomi suatu negara. Tingkat kemiskinan dapat dicerminkan melalui penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan (suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan nonmakanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin). Berdasarkan data yang dihimpun dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) oleh BPS, garis kemiskinan Mamuju Tengah itu sendiri mengalami kenaikan pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan garis kemiskinan dari tahun 2021 (Rp265.413/kapita /bulan) ke tahun 2022 (Rp290.030/ kapita/ bulan) adalah sebesar 9,27%.

BPS mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Mamuju Tengah pada tahun 2022 mencapai 9,98 ribu orang. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada tahun 2021 (9,74 ribu) dan tahun 2020 (9,25 ribu). Besaran jumlah penduduk miskin di Mamuju Tengah pada tahun 2022 ini menunjukkan peningkatan dari lima tahun terakhir sebelumnya. Secara persentase penduduk miskin juga menunjukkan hal yang sama, yang mana persentase penduduk miskin pada tahun 2022 tercatat sebesar 7,17 persen, tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Peningkatan ini sejalan dengan melambatnya perekonomian domestik Mamuju Tengah. Selain itu, kenaikan harga bahan bakar minyak menjadi pemicu kenaikan harga barang kebutuhan pokok yang mendorong peningkatan jumlah penduduk miskin.

Gambar 2. 15 Jumlah dan Presentase Penduduk Miskin Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2024



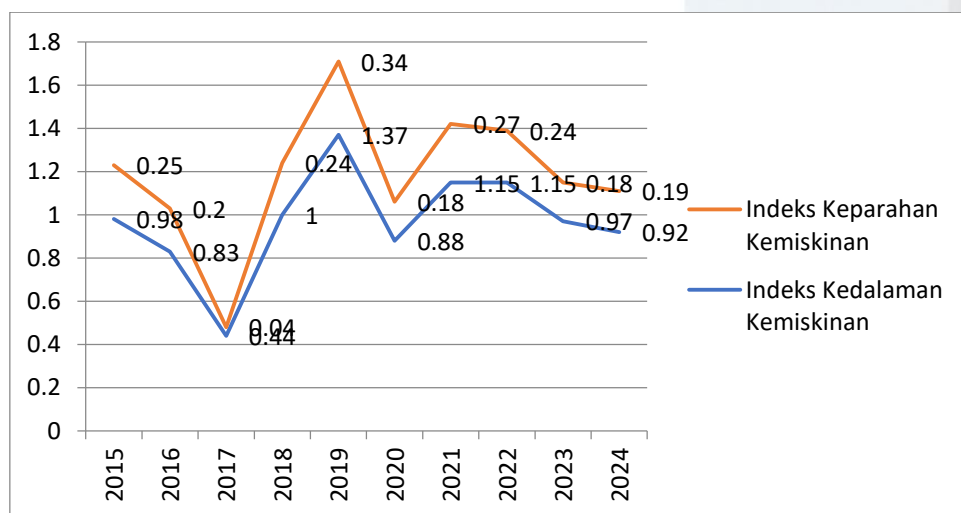
Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025. Diolah

Dilevel provinsi, daerah yang tercatat memiliki persentase penduduk miskin paling besar adalah Polewali Mandar (16,39%), diikuti dengan Majene (15,13%) dan Mamasa (14,51%). Daerah dengan persentase penduduk miskin terkecil di Sulawesi Barat adalah Pasangkayu (5,09%). Dimensi lain yang perlu menjadi perhatian dalam diskusi mengenai kemiskinan adalah sejauh mana

tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan¹. Pada tahun 2022, tercatat bahwa Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Mamuju Tengah tercatat sebesar 1,15, tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar 0,03 poin.

Pada tahun 2022, baik jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, maupun tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan meningkat dibandingkan tahun 2020. Sebagaimana yang telah diketahui bersama, salah satu penyebab utama peningkatan ini adalah karena adanya dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan aktivitas ekonomi secara cukup menyeluruh. Pandemi yang berakibat pada penurunan tingkat permintaan masyarakat akan barang dan jasa serta dirupsi pada rantai nilai secara global. Hal ini mempengaruhi penurunan aktivitas bisnis yang kemudian mempengaruhi permintaan tenaga kerja sehingga mendorong peningkatan tingkat kemiskinan.

Gambar 2. 16 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2015-2024



Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2025. Diolah

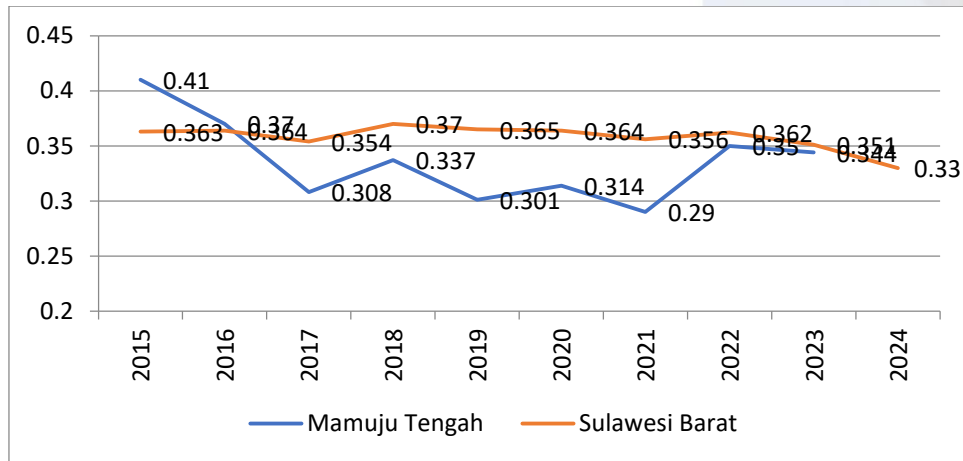
(12) Rasio Gini

Salah satu indikator lain yang dapat memberikan gambaran mengenai kondisi kesejahteraan masyarakat Mamuju Tengah adalah indikator ketimpangan yang dicerminkan melalui rasio gini. Sejak tahun 2015, BPS mencatat bahwa rasio gini Mamuju Tengah mencatatkan angka 0,41 dan merupakan capaian tertinggi dalam delapan tahun terakhir. Hingga tahun 2022, rasio gini Mamuju Tengah menunjukkan tren fluktuatif dengan capaian terendah pada tahun 2021 dengan tercatat sebesar 0,290. Pada tahun berikutnya rasio gini meningkat signifikan sebesar 0,06 poin menjadi 0,350. Peningkatan ini sejalan dengan angka

¹ Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

kemiskinan dan pengangguran yang meningkat akibat turunnya output produksi di sektor pertanian dan industri pengolahan.

Gambar 2. 17 Gini Ratio (Ketimpangan) Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015-2024

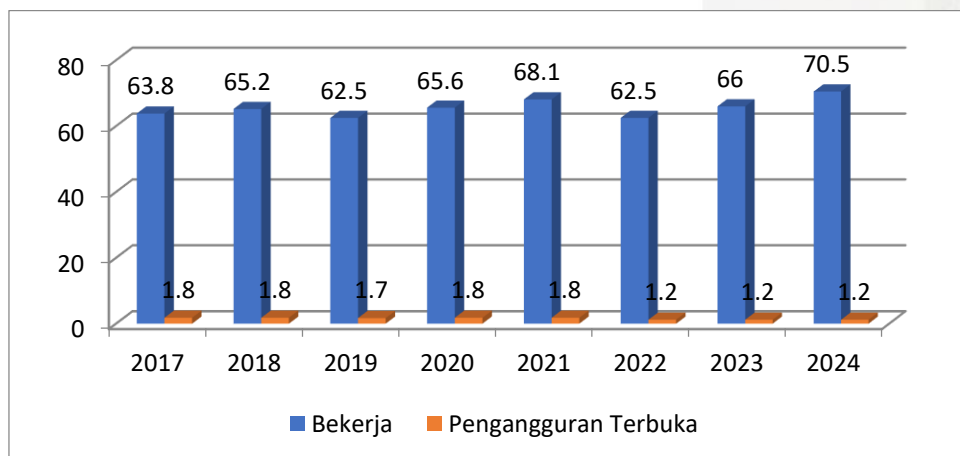


Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025. diolah

(13) Tingkat Pengangguran Terbuka

Perkembangan jumlah pengangguran Kabupaten Mamuju Tengah tergambarakan mengalami tren yang menurun dalam 6 tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat sebesar 1,2 ribu dibandingkan tahun 2017 sebesar 1,8 ribu orang atau terjadi penurunan sekitar 6 ratus orang. Namun penurunan tersebut selain didorong dari efek perluasan lapangan kerja dan perbaikan kinerja perekonomian yang terjadi di Kabupaten Mamuju Tengah juga dipengaruhi dari jumlah angkatan kerja yang juga mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir tercermin dari jumlah penduduk bekerja yang secara asumsi seharusnya mengalami peningkatan dimana justru mengalami penurunan yang sejalan dengan penurunan jumlah pengangguran pada tahun 2022.

Gambar 2. 18 Jumlah yang Bekerja dan Menganggur di Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2024

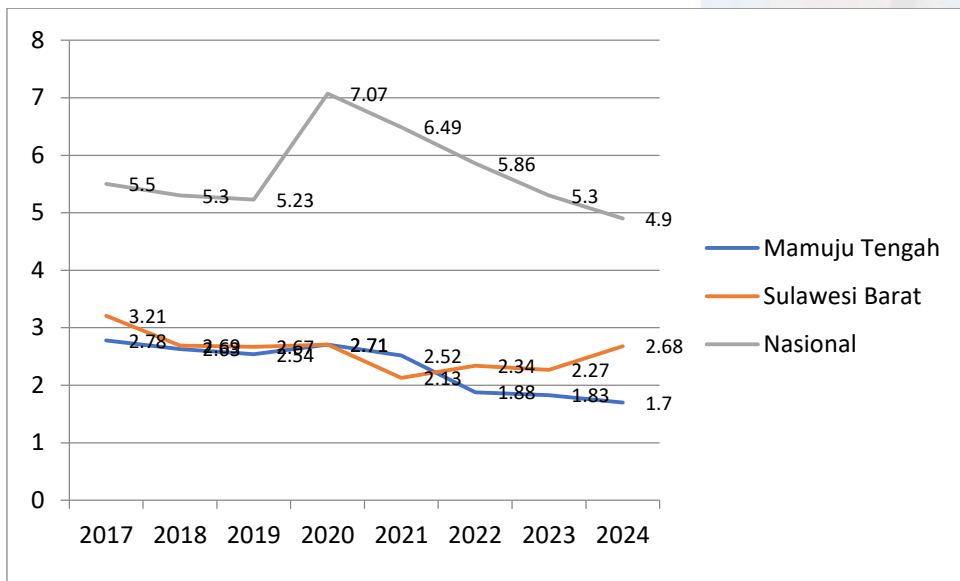


Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Adapun jika dilihat berdasarkan perkembangan TPT Mamuju Tengah juga tergambarakan mengalami tren penurunan. Pada tahun 2017 TPT Mamuju Tengah

sebesar 2,78 persen turun pada tahun 2022 yang hanya sebesar 1,88 persen atau terjadi penurunan sekitar 0,9 persen. Perkembangan tersebut sejalan dengan perkembangan TPT Sulawesi Barat dan Nasional yang juga mengalami penurunan. Kemudian, secara posisi relatif dibandingkan capaian Provinsi dan Nasional dimana kinerja TPT Kabupaten Mamuju Tengah berada dibawah capaian Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional. Posisi tersebut secara implisit menunjukkan bahwa kondisi angkatan kerja di Mamuju Tengah masih relatif lebih baik dibandingkan di level Provinsi dan Nasional.

Gambar 2. 19 Tingkat Pengangguran Terbuka Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2017-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(14) Jumlah Penduduk >15 Tahun

Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas dihitung sebagai angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Adapun penduduk usia 15 tahun ke atas Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 Jumlah Penduduk 15 Tahun ke atas Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten			82519		84471					100953	101498	103766
Provinsi	N/A	N/A	866634	887312	908056	947675	965438	982859	1000281	1040529	1066957	1086991

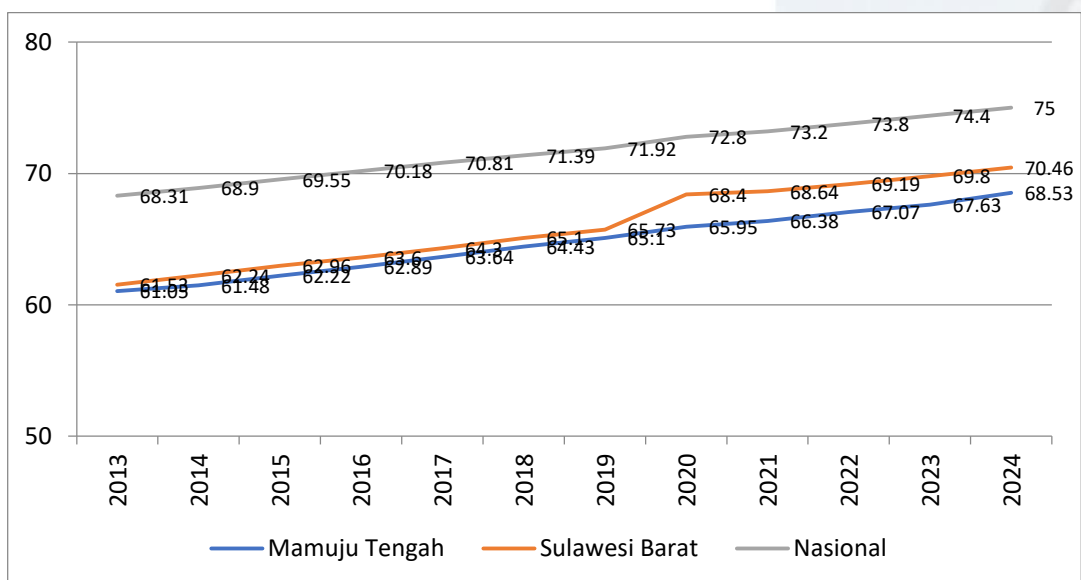
S Nasional (th org)	178873	181169	184599	187600	190587	196938	199785	202597	205360	208544	212121,1	214944,1
---------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	----------

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(15) Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Mamuju Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam 10 tahun terakhir. Pada tahun 2013, IPM Mamuju Tengah tercatat sebesar 61,05 meningkat 5,84 poin atau tumbuh 9,57 persen menjadi 66,89 (kategori sedang) di tahun 2022. Meskipun menunjukkan tren positif dalam 10 tahun terakhir, namun capaian IPM Mamuju Tengah masih di bawah capaian Provinsi dan Nasional. Sulawesi Barat mencatatkan angka IPM di tahun 2022 sebesar 66,92 poin, sedangkan Nasional tercatat sebesar 72,91 poin. Angka ini menunjukkan bahwa masih terjadi kesenjangan kualitas manusia pada level daerah Mamuju Tengah dan Sulawesi Barat dengan rata-rata nasional. Selisih atau kesenjangan itu sekitar 5-6 poin.

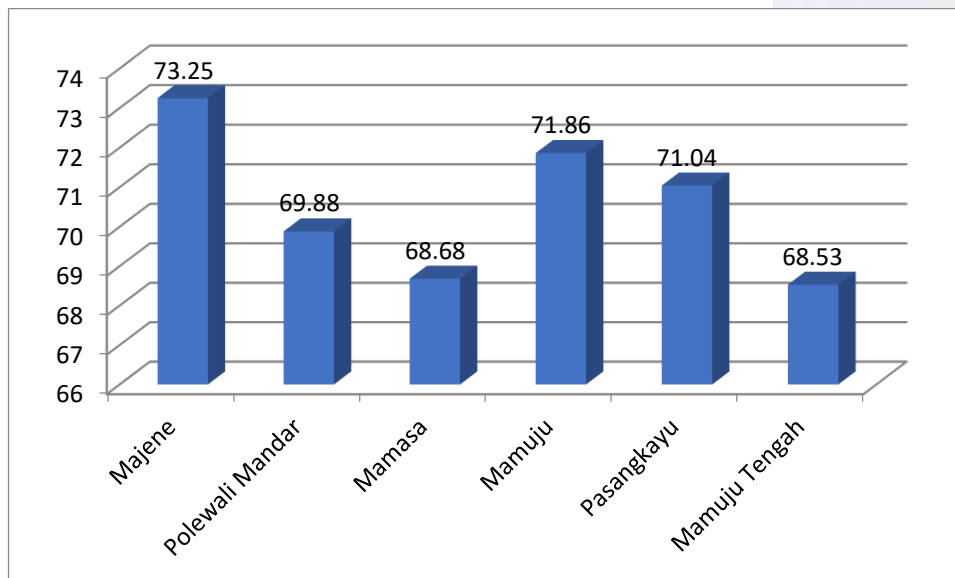
Gambar 2. 20 IPM Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dan Nasional, Tahun 2013-2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Pada level wilayah Provinsi, Mamuju Tengah menempati posisi kedua terendah untuk angka IPM di tahun 2022. Meskipun memiliki sumbangan ekonomi terbesar di Sulawesi Barat, Polewali Mandar menempati urutan terendah untuk IPM dengan angka sebesar 64,79 poin. Tiga daerah dengan angka IPM tertinggi antara lain Mamuju (68,88), Pasangakuyu (68,61) dan Majene (67,84). Tiga daerah ini juga memiliki IPM di atas rata-rata Provinsi. Sementara itu, Mamasa menempati urutan ketiga terendah dengan mencatatkan nilai IPM sebesar 67,21 poin.

Gambar 2. 21 Perbandingan IPM Kabupaten/ Kota Sulawesi Barat Tahun 2024



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Harapan Lama Sekolah

Kenaikan IPM Mamuju Tengah sejalan dengan kenaikan angka harapan lama sekolah. Angka harapan lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk yang berumur 7 tahun ke atas, dengan asumsi bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Dalam kurun waktu sepuluh tahun terakhir angka harapan lama sekolah Mamuju Tengah menunjukkan perkembangan positif. Angka harapan lama sekolah pada tahun 2013 mencapai 11,11 tahun. Kemudian terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun hingga mencapai 12,65 tahun pada tahun 2022 atau tumbuh sekitar 13,86 persen, kinerjanya lebih tinggi dari daerah lainnya. Hal ini berarti lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang yaitu 12,65 tahun. Meskipun demikian, capaian angka harapan lama sekolah Mamuju Tengah masih lebih rendah dari rata-rata Provinsi (12,87 tahun) dan Nasional (13,10 tahun). Jika dibandingkan dengan daerah lain, angka harapan lama sekolah Mamuju Tengah juga masih tertinggal dari Majene (13,63 tahun), Polewali Mandar (13,39 tahun) dan Mamuju (13,25 tahun).

Tabel 2. 22Harapan Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	11,11	11,23	11,36	11,49	11,57	11,71	11,92	12,23	12,53	12,65	12,66	12,68
Provinsi	11,46	11,78	12,22	12,34	12,48	12,59	12,62	12,77	12,86	12,87	12,88	12,89

Nasional	12,1 0	12,3 9	12,5 5	12,7 2	12,8 5	12,9 1	12,9 5	12,9 8	13,0 8	13,1 0	13,15	13,2 1
----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----------

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Rata-Rata Lama Sekolah

Sejalan dengan capaian harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah di Mamuju Tengah juga mengalami perkembangan positif dan bahkan tumbuh lebih tinggi sebesar 20,60 persen dari 2013 hingga 2022. Pada tahun 2013, rata-rata lama sekolah tercatat sebesar 6,31 tahun, naik 1,30 poin menjadi 7,61 tahun di tahun 2022. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk Mamuju Tengah usia 15 tahun ke atas hanya menempuh pendidikan sampai kelas 2 SLTP. Capaian rata-rata lama sekolah Mamuju Tengah di tahun 2022 masih lebih rendah dibanding Provinsi dan Nasional dengan masing-masing sebesar 8,08 tahun dan 8,69 tahun. Jika dibandingkan juga dengan daerah lain, rata-rata lama sekolah Mamuju Tengah masih tertinggal dari Majene (9,10 tahun), Pasangkayu (8,11 tahun), Mamuju (8,09 tahun), dan Mamasa (8,00 tahun).

Tabel 2. 23 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	6,31	6,49	6,86	7,1	7,13	7,23	7,24	7,46	7,51	7,61	7,73	7,94
Provinsi	6,87	6,88	6,94	7,14	7,31	7,50	7,73	7,89	7,96	8,08	8,13	8,15
Nasional	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Angka Harapan Hidup

Dalam aspek pembangunan manusia di bidang kesehatan, Mamuju Tengah juga menunjukkan perbaikan dalam 10 tahun terakhir, diatas rata-tata Provinsi. Meskipun bila dibandingkan dengan Nasional masih jauh lebih rendah. Usia harapan hidup Mamuju Tengah di tahun 2022 mencapai 68,97 tahun, meningkat 3,05 persen dari tahun 2013. Faktor yang mempengaruhi secara langsung perkembangan usia harapan hidup Mamuju Tengah adalah peningkatan kesehatan penduduk terutama kesehatan ibu dan anak. Berbagai usaha telah dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan kesehatan termasuk kesehatan ibu dan anak, antara lain pemberian imunisasi, peningkatan rasio kesehatan baik dari sisi sarana maupun tenaga kesehatan, sosialisasi pentingnya ASI, penolong kelahiran, larangan pernikahan dini dan pola hidup sehat. Jika disandingkan juga daerah lain di Sulawesi Barat, usia harapan hidup Mamuju Tengah menempati urutan tertinggi kedua setelah Mamasa (71,20).

Tabel 2. 24 Angka Harapan Hidup Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	66,93	67,00	67,20	67,36	67,52	67,79	68,06	68,33	68,55	68,97	69,37	69,68
Provinsi	63,32	64,04	64,22	64,31	64,34	64,58	64,82	65,06	65,25	65,63	66,01	66,27
Nasional	70,4	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85	72,13	72,39

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

Pengeluaran Per Kapita

Selanjutnya, dimensi hidup layak yang berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per kapita per tahun juga mengalami perbaikan di Mamuju Tengah, meskipun masih lebih rendah dari Provinsi dan Nasional. Rata-rata pengeluaran per kapita per tahun di Mamuju Tengah tahun 2022 sebesar Rp8,63 juta, meningkat 17,41 persen dari tahun 2013 yang hanya sebesar Rp7,35 juta. Ketika dibandingkan dengan daerah lain, Mamuju Tengah memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per tahun terendah kedua setelah Mamasa (Rp7,84 juta). Daerah dengan rata-rata pengeluaran per kapita per tahun tertinggi adalah Pasangkayu dengan sebesar Rp11,33 juta.

Tabel 2. 25 Pengeluaran per Kapita Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	7.353	7.374	7.404	7.521	7.931	8.243	8.501	8.414	8.408	8.633	8.821	9.250
Provinsi	8.148	8.170	8.260	8.450	8.736	9.051	9.235	9.168	9.153	9.358	9.718	10.208
Nasional	9.858	9.903	10.150	10.420	10.664	11.059	11.299	11.013	11.156	11.479	11.899	12.341

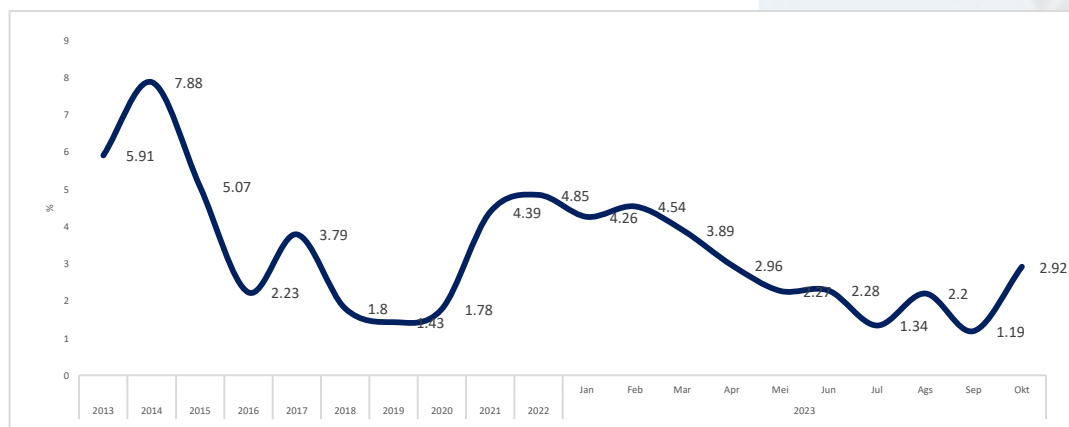
Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(16) Laju Inflasi

Laju inflasi adalah persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga konsumen (IHK). Perubahan barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam.

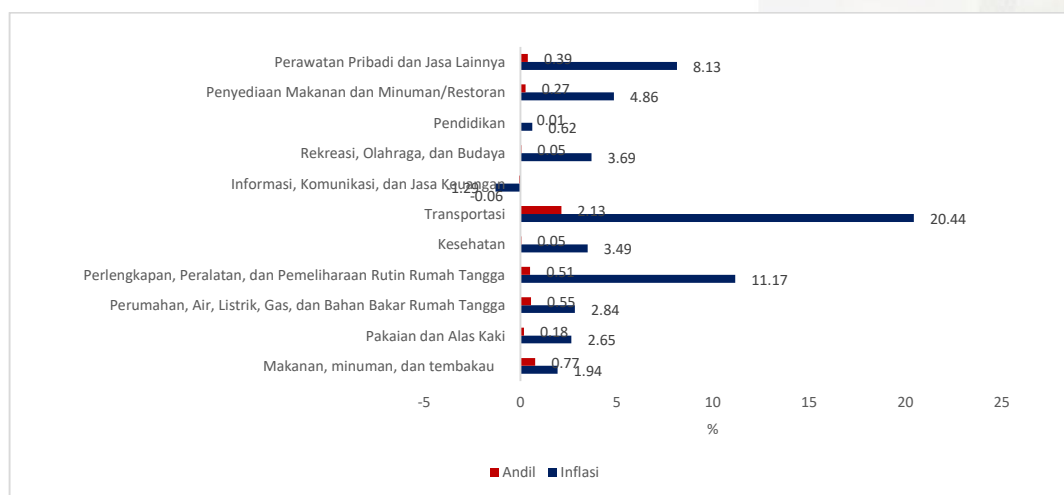
Sejalan dengan tekanan inflasi global dan nasional yang tinggi, laju inflasi Mamuju Tengah juga menunjukkan angka yang tinggi di tahun 2022 dengan tercatat sebesar 4,39 persen (yoy). Angka ini tertinggi dalam lima tahun terakhir. Penyebab tingginya laju inflasi dipengaruhi oleh kenaikan harga jasa transportasi (20,44%), harga perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rumah tangga (11,17%) serta perawatan pribadi dan jasa lainnya (8,13%). Tingginya laju inflasi di sektor jasa transportasi utamanya disebabkan oleh kenaikan harga jasa angkutan penumpang yang dipengaruhi oleh naiknya harga bahan bakar kendaraan baik darat maupun udara. Kemudian penguatan permintaan domestik telah mendorong peningkatan level harga barang perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rumah tangga serta perawatan pribadi. Bauran sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dengan Pemerintah Daerah kemudian mampu menekan laju inflasi selama periode Januari hingga Oktober 2023. Selama periode tersebut, inflasi mampu ditekan hingga rentang sasaran inflasi yang ditetapkan ($3,0 \pm 1,0$ %)

Gambar 2. 22 Inflasi di Mamuju Tengah Tahun 2013-Oktober 2023



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023

Gambar 2. 23 Inflasi dan Andil Inflasi Tahunan Menurut Pengeluaran di Mamuju Tengah Tahun 2022



Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023

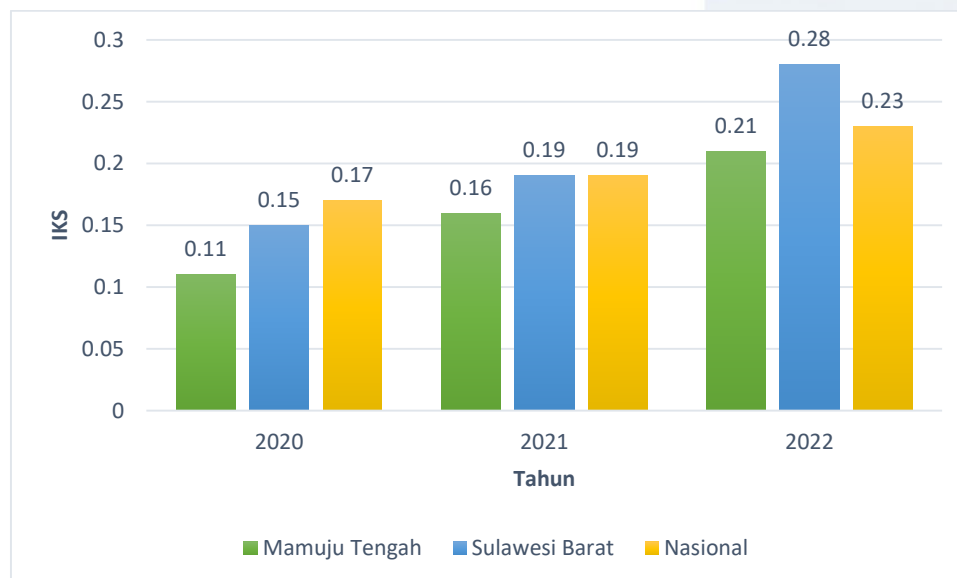
2.2.2 Sosial-Budaya

Aspek sosial-budaya dapat dijabarkan melalui Usia Harapan Hidup, Prevalensi Stunting, Tingkat Prevalensi Tuberculosis (per 100.000 penduduk), Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan, Indeks Pembangunan Kebudayaan, Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Ketimpangan Gender.

(1) Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) merupakan salah satu indikator yang digunakan oleh pemerintah untuk mengukur kesehatan masyarakat. IKS terdiri dari 12 indikator yang mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial dan lingkungan.

Gambar 2. 24 Indeks Keluarga Sehat Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2020-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Povinsi Sulawesi Barat, 2023

Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan nilai IKS dari tahun 2020 hingga 2022. Nilai IKS Provinsi Sulawesi Barat juga mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2020 hingga 2022. Secara nasional, terdapat tren kenaikan yang stabil dari tahun 2020 hingga 2022.

Dengan adanya kenaikan nilai IKS di tingkat Kabupaten dan Provinsi, hal ini menunjukkan adanya upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga di daerah, namun untuk Kabupaten Mamuju Tengah perlu melakukan perbaikan di beberapa indikator yang capaiannya masih rendah atau dibawah 60% yaitu: indikator keluarga mengikuti program KB; Penderita TB Paru yang berobat sesuai standar; Penderita hipertensi yang berobat teratur; Penderita gangguan jiwa berat, diobati dan tidak ditelantarkan; Anggota keluarga tidak ada yang merokok; Keluarga sudah menjadi anggota JKN;

(2) Prevalensi Stunting

Prevalensi balita stunting mengacu pada **persentase jumlah balita di suatu populasi yang mengalami stunting dalam pertumbuhan fisiknya**. Prevalensi

balita stunting digunakan sebagai indikator untuk menilai masalah gizi pada kelompok balita di suatu wilayah atau negara.

Tabel 2. 26 Prevalensi Stunting Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten						42,2	32,1	N/A	26,3	28,06	28,01	
Provinsi						41,8	40,36	N/A	33,80	35,00	30,3	
Nasional						30,8	27,67	N/A	24,41	21,60	21,5	19,8

Sumber: Survei Status Gizi (SSGI) 2025

Berdasarkan data dari Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dilaporkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2022, prevalensi stunting nasional di Indonesia berada pada angka 21,6%. Meskipun angka ini menunjukkan penurunan dari tahun sebelumnya, namun masih jauh dari target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang sebesar 14% di tahun 2024.

Untuk mencapai target penurunan stunting, pemerintah melakukan berbagai upaya seperti roadshow percepatan penurunan stunting di berbagai provinsi dan kabupaten/kota, serta mendorong kolaborasi multipihak untuk mencapai target penurunan stunting.

Dengan kondisi ini, penanganan serius terhadap isu stunting menjadi sangat penting, mengingat dampak stunting bisa berdampak pada berbagai aspek, mulai dari kesehatan masyarakat, kualitas SDM, pertumbuhan ekonomi, hingga kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Berdasarkan data di atas menunjukkan bahwa Sulawesi Barat merupakan salah satu provinsi dengan prevalensi balita stunting tertinggi kedua di Indonesia pada tahun 2022. Prevalensi balita stunting di provinsi ini sebesar 35% pada tahun tersebut, naik 1,2 poin dari tahun sebelumnya yang sebesar 33,8%.

Selain itu, data juga menunjukkan bahwa Kabupaten Mamuju Tengah memiliki prevalensi balita stunting sebesar 28,1% pada tahun 2022, yang merupakan angka terendah kedua di Sulawesi Barat. Penanganan stunting di Sulawesi Barat menjadi salah satu prioritas karena masih ada beberapa kabupaten di provinsi tersebut yang memiliki prevalensi balita stunting di atas rata-rata provinsi, dengan Kabupaten Majene memiliki prevalensi tertinggi yakni mencapai 40,6%.

Pola asuh yang salah juga disinyalir menjadi salah satu penyebab stunting di Mamuju Tengah. Data menunjukkan bahwa sebagian balita yang menderita stunting berasal dari keluarga yang dikategorikan mampu, dan banyak balita stunting bukan karena orang tuanya tidak mampu yang menyebabkan kekurangan gizi, namun karena faktor pola asuh yang kurang tepat.

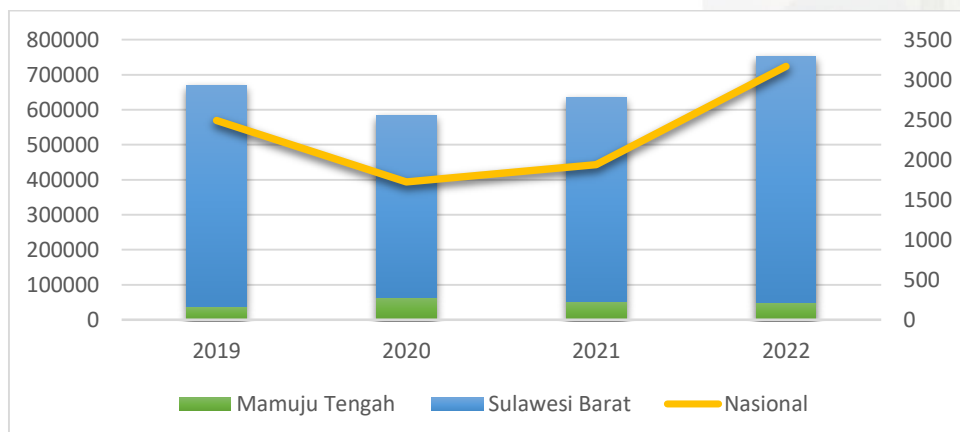
(3) Tingkat Prevalensi Tuberculosis

Tren kasus Tuberculosis (TB) di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan secara nasional dari tahun 2013 hingga 2022. Di Kabupaten Mamuju Tengah, data yang tersedia menunjukkan peningkatan jumlah kasus dari 164 pada tahun 2019 menjadi 276 pada tahun 2020. Peningkatan ini dapat diinterpretasikan sebagai hasil perbaikan dalam proses skrining dan deteksi, di mana semakin banyak pasien TB yang ditemukan dan didiagnosis. Penurunan kasus terjadi pada tahun 2021 menjadi 224 dan sedikit menurun lagi menjadi 216 pada tahun 2022, yang mungkin menunjukkan stabilisasi dalam penanganan dan pengobatan TB. Diperlukan peningkatan upaya pencegahan dan pengobatan TB di Kabupaten Mamuju Tengah, mengingat fluktuasi kasus yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan pelaksanaan program edukasi masyarakat tentang pencegahan TB dan pentingnya deteksi dini harus ditingkatkan.

Di tingkat provinsi, data menunjukkan tren yang mirip dengan fluktuasi kasus TB. Pada tahun 2019 tercatat 2.765 kasus, turun menjadi 2.274 pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 2.548 pada tahun 2021, dan mencapai 3.073 pada tahun 2022. Peningkatan signifikan pada tahun 2021 dan 2022 dapat dihubungkan dengan upaya skrining yang lebih agresif dan efektif, yang mengarah pada deteksi lebih banyak kasus.

Peningkatan jumlah kasus di berbagai tingkat ini menekankan pentingnya program skrining yang efektif dan konsisten. Diperlukan peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan dan tenaga medis untuk diagnosis dan pengobatan TB serta pemantauan pasien TB untuk memastikan pengobatan yang tuntas dan mencegah resistensi obat. Kolaborasi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan nasional sangat penting untuk berbagi sumber daya dan strategi dalam penanganan TB. Pengumpulan data yang konsisten dan akurat juga sangat penting untuk memahami tren jangka panjang dan merespons perubahan dengan tepat. Dengan demikian, strategi jangka panjang yang komprehensif dapat disusun untuk mengurangi kasus TB dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah

Gambar 2. 25 Kasus Tuberculosis Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2022



Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju Tengah, tbindonesia.or.id, 2023

(4) Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan merujuk pada jumlah individu atau kelompok yang memiliki akses terhadap manfaat perlindungan kesehatan yang disediakan oleh program jaminan sosial kesehatan. Cakupan ini mencakup berbagai aspek, seperti jumlah peserta program, jenis layanan kesehatan yang tersedia, besaran kontribusi atau premi yang harus dibayarkan, serta manfaat kesehatan yang diterima oleh para peserta.

Cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan dapat bervariasi dalam setiap negara, tergantung pada rancangan program jaminan sosial kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti struktur demografis, kondisi perekonomian, dan kebijakan kesehatan yang berlaku di suatu negara.

Dengan demikian, cakupan kepesertaan jaminan sosial kesehatan adalah indikator penting dalam menilai sejauh mana program jaminan sosial kesehatan dapat memberikan perlindungan kesehatan yang adil dan efektif bagi masyarakat.

Tabel 2. 27 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2022

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	90,46	92,45	88,19	89,42	85,80	80,89	81,37
Provinsi	N/A	N/A	N/A	95,15	93,86	92,75	93,78	92,05	78,42	83,77
Nasional	N/A	N/A	N/A	94,05	92,92	90,56	90,99	88,95	79,33	82,15

Sumber: <https://sismonev.djsn.go.id/kepesertaan/>, 2023

Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan penurunan yang signifikan dari 2018 hingga 2021. Cakupan kepesertaan di tingkat provinsi dan nasional juga mengalami fluktuasi, dengan penurunan yang signifikan terutama pada tahun 2020 dan 2021.

Penurunan cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan di tingkat kabupaten, provinsi, dan nasional menunjukkan adanya potensi masalah dalam penetrasi program jaminan kesehatan di wilayah tersebut.

Penurunan cakupan kepesertaan JKN di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi demografis hingga infrastruktur, sedangkan lebih spesifik penurunan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan di Mamuju Tengah, Sulawesi Barat dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Beberapa faktor yang mempengaruhi penurunan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan antara lain adalah penurunan dalam cakupan yang disponsori oleh pemberi kerja, kenaikan biaya asuransi kesehatan, serta faktor demografis dan ekonomi yang memiliki dampak terbatas terhadap cakupan keseluruhan. Untuk meningkatkan akses

masyarakat terhadap jaminan kesehatan, diperlukan perhatian pada faktor-faktor ini serta implementasi upaya perbaikan yang sesuai.

(5) *Indeks Pembangunan Kebudayaan*

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan. Penyusunan indeks tersebut melibatkan berbagai pemangku kebijakan dan data yang berkaitan dengan pembangunan kebudayaan nasional.

Tabel 2. 28 Indeks Pembangunan Kebudayaan, 2012-2022

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten										
Provinsi						46,90	48,41	47,14	45,86	
Nasional						53,47	55,91	54,65	51,90	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

(6) *Indeks Pembangunan Gender*

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. Penghitungan IPG mengacu pada metodologi yang digunakan oleh UNDP dalam menghitung Gender Development Index (GDI) dan Human Development Indeks (HDI) pada tahun 2010 yang tertuang dalam tiga dimensi yakni umur panjang dan sehat dengan indikator Angka harapan hidup pada saat lahir, laki-laki dan perempuan; dimensi pengetahuan dengan indikator harapan lama sekolah laki-laki dan perempuan, rata-rata lama sekolah laki-laki dan perempuan; dimensi kehidupan yang layak dengan indikator perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Tabel 2. 29 Indeks Pembangunan Gender, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	85,55	86,61	86,83	N/A	87,26	87,12	86,70	86,34	86,10	86,16	86,40	86,74
Provinsi	88,56	89,18	89,52	89,35	89,44	90,05	89,76	89,43	89,57	89,79	90,25	90,60
Nasional	90,19	90,34	91,03	90,82	90,96	90,99	91,07	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Rasio IPM Perempuan dan IPM laki-laki di Kabupaten Mamuju Tengah berada di bawah angka rasio provinsi dan nasional dan angka ini juga meningkat setiap tahunnya. IPG dapat dikategorikan rendah jika nilai IPG kurang dari 90,00 dan dikatakan tinggi jika nilai lebih besar sama dengan 90,00. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa angka IPG Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah.

(7) Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang memperlihatkan sejauh mana peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran Aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

Tabel 2. 30 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	61,46	64,58	N/A	62,73	60,88	65,86	66,56	67,11	67,01	57,26	55,84
Provinsi	64,47	67,14	69,40	71,71	73,37	71,95	65,92	65,92	65,93	66,55	66,93	67,16
Nasional	70,46	70,68	70,83	71,39	71,74	72,10	75,24	75,57	76,26	76,59	76,90	77,62

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

IDG dibangun dengan tiga komponen yaitu keterlibatan perempuan dalam parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional, dan sumbangan pendapatan perempuan. Berdasarkan hal tersebut maka angka keterlibatan perempuan di Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat masih dianggap rendah

(8) Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran ketimpangan gender yang menunjukkan capaian pembangunan manusia yang kurang optimal karena ketimpangan antara perempuan dan laki-laki dalam dimensi kesehatan reproduksi, pemberdayaan dan pasar tenaga kerja. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil.

Tabel 2. 31 Indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2024

Kabupaten/Provinsi/Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,49	0,50	0,54	0,48	0,50	0,491	
Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,54	0,55	0,54	0,54	0,51	0,494	
Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,499	0,488	0,472	0,465	0,459	0,447	0,421

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

Secara Umum Nilai Indeks Ketimpangan Gender mengalami penurunan, hal ini menandakan bahwa angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang tinggi. Dari data diatas terlihat adanya peningkatan dan juga penurunan angka IKG Kabupaten Mamuju Tengah beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 IKG kabupaten mengalami peningkatan hal ini juga dipengaruhi oleh angka keterwakilan parlemen, dimana nilai AKP laki-laki (76,00) lebih tinggi di banding perempuan (24,00) dan Tingkat Partisipasi Angka Kerja (TPAK) yang timpang dimana TPAK laki-laki 89,90 dan perempuan 48,04. Lalu pada tahun 2021 berhasil diturunkan namun meningkat lagi pada tahun 2022.

Beberapa indikator yang mempengaruhi IKG yaitu :

1. Proporsi persalinan tidak difasilitas kesehatan,
2. Proporsi wanita berusia 15-49 tahun
3. Persentasi penduduk laki-laki dan perempuan dengan pendidikan minimal SMA
4. Persentasi laki-laki dan perempuan yang duduk di parlemen
5. Persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja

Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah agar dapat menekan angka ketimpangan gender agar dapat menunjang potensi pembangunan yang optimal

(10) *Indeks Perlindungan Anak*

Salah satu upaya pemerintah yang telah dilakukan untuk mengukur capaian keberhasilan pembangunan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Indonesia adalah melalui Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang digagas oleh Kemen PPPA bersama dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Penyusunan IPA yang terdiri atas lima (5) klaster mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 klaster Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA).

Tabel 2. 32 Indeks Perlindungan Anak Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2022

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	58,18	57,45	52,50	N/A
Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,26	66,89	61,38	N/A

Sumber: Kementerian PPPA, 2023

Dari data di atas Indeks Perlindungan Anak terus menurun dari tahun 2019 sampai 2021, untuk meningkatkan kembali indeks ini perlu upaya peningkatan pemenuhan hak sipil dan kebebasan anak, penyedia layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya maupun upaya perlindungan khusus anak. Perlu melakukan koordinasi secara berjenjang dari tingkat pusat, provinsi sampai kabupaten/kota.

Proyeksi nilai Indeks Perlindungan Anak (IPA) harus disiapkan oleh Kabupaten/kota berdasarkan klaster yang diintervensi. Indikator IPA yang sudah ditentukan juga dimuat dalam pengisian KLA yang ada di sistem penilaian KLA. Berikut nilai KLA Kabupaten Mamuju Tengah.

Tabel 2. 33 Nilai Kabupaten Layak Anak Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2023

Kabupaten Mamuju Tengah	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	616,07	595,1

Sumber: Dinas DP3A2KB , 2023

Kabupaten Mamuju Tengah baru memulai perhitungan KLA pada tahun 2022, dengan memperhitungkan 24 indikator yang ada. Nilai ini juga dapat mewakili nilai dari Indeks Perlindungan Anak yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah, karena indikator yang dimuat dalam IPA juga dimuat dalam KLA.

(11) *Indeks Pembangunan Pemuda*

Pembangunan pemuda idealnya diarahkan untuk menciptakan pemuda yang berkualitas, yaitu pemuda memiliki kapasitas (terdidik), sehat fisik dan mental, mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif sebagai subjek pembangunan. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah sebuah instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks Pembangunan Pemuda dihitung dari lima dimensi dengan 15 indikator komposit. Adapun dimensinya yakni Pendidikan, Kesehatan dan Kesejahteraan, Lapangan dan Kesempatan Kerja, Partisipasi dan Kepemimpinan serta Gender dan Diskriminasi. Adapun Indeks Pembangunan Pemuda di Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut;

Tabel 2. 34 Indeks Pembangunan Pemuda Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2023

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A		
Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	49,50	47,33	49,17	53,33	55,50	
Nasional	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	51,00	53,33	55,33	56,33	

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024

Secara umum capaian beberapa indikator dari indeks pembangunan pemuda Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan tiap tahunnya. Hal ini didukung dengan adanya peningkatan pada domain pendidikan, dimana angka rata-rata lama sekolah terus bertambah setiap tahunnya. Dapat dilihat juga APK sekolah menengah terus mengalami peningkatan.

Angka pengangguran Terbuka di Kabupaten Mamuju Tengah masih cukup tinggi, angka tersebut merupakan jumlah penduduk usia 15 tahun keatas. Hal ini disebabkan masih kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia di Kabupaten Mamuju Tengah. Hal ini juga seharusnya menjadi perhatian pemerintah dan lembaga swasta agar menyediakan ruang dan lapangan pekerjaan khususnya untuk pemuda yang baru saja menyelesaikan pendidikannya. Hal ini dapat menunjang kualitas pembangunan pemuda yang ada di Kabupaten Mamuju Tengah.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Daya Saing Daerah dijabarkan dalam empat aspek, yakni Ekonomi, Sumber Daya manusia, Infrastruktur dan Iklim Investasi. Daya saing menunjukkan kemampuan suatu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam menerapkan strategi yang tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Daerah harus mencari dan mengenal potensi yang akan dikembangkan dan dapat berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat setempat. Apalagi dengan semakin terbukanya pasar bebas yang memungkinkan produk impor masuk ke daerah–daerah, tentunya usaha–usaha yang dilakukan daerah harus lebih nyata dan terukur. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Setiap daerah dituntut untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif yang dapat menciptakan ide– ide baru, perbaikan–perbaikan yang dapat mendorong tumbuhnya usaha–usaha baru, industry baru, lapangan kerja baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Aspek Ekonomi pada Daya Saing Daerah dijabarkan ke dalam Indeks Ekonomi Hijau, Indeks Daya Saing Daerah, Rasio Kewirausahaan dan Indeks Ketahanan Pangan.

(1) Indeks Ekonomi Hijau

Indeks Ekonomi Hijau adalah wujud nyata Indonesia dalam mengukur efektivitas transformasi ekonomi yang berkelanjutan dan rendah karbon dengan metodologi akurat. Prinsip utama Ekonomi Hijau adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, seiring mendorong kesejahteraan sosial dan menjaga kualitas dan daya dukung lingkungan, dengan berfokus pada peningkatan investasi hijau, mengelola aset dan infrastruktur yang berkelanjutan, memastikan transisi yang adil dan terjangkau, serta memberdayakan sumber daya manusia.

Kondisi Pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah saat ini masih fokus pada perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cenderung ekstraktif dan berjangka pendek tanpa menafikan adanya perbaikan kualitas sumber daya dan lingkungan, namun secara umum dapat dikatakan bahwa upaya mempertahankan fungsi lingkungan dan pemanfaatan sumber daya alam secara lestari masih jauh dari yang diharapkan. Sementara itu sinyal indikator pertumbuhan ekonomi seperti PDRB dan tingkat inflasi tidak diiringi dengan informasi tentang nilai susutnya sumber daya alam serta rusak dan tercemarnya lingkungan. Adapun capaian indikator Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 35 Indeks Ekonomi Hijau Kabupaten Mamuju Tengah 2013-2022

No	Keterangan	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Lingkungan											
L1	Tutupan Lahan	N/A	N/A	N/A	N/A	82,23	79,41	79,41	62,08	81,05	81,05
L2	Energi Baru Terbaharukan	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
L3	Kualitas Air	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	66,67	-	67,5	63,33
L4	Kualitas Udara	N/A	N/A	N/A	N/A	99,64	90,83	88,48	-	89,13	91,73
L5	Penurunan Emisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0,01
L6	Lahan Gambut Terdegradasi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Ekonomi											
E1	Intensitas Emisi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E2	Intensitas Energi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E3	GNI Perkapita	15,6	17,4	19,0	20,0	21,1	22,7	23,5	23,8	25,9	27,2
E4	Produktivitas Pertanian	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
E5	Produktivitas Tenaga Kerja	N/A	N/A	39,4	42,6	42,3	45,6	50,3	49,0	52,3	61,0
Sosial											
S1	Rata-Rata Lama Sekolah	7,61	7,73	7,84	7,95	8,1	8,17	8,34	8,48	8,54	8,69
S2	Angka Harapan Hidup	70,4	70,59	70,78	70,90	71,06	71,20	71,34	71,47	71,57	71,85
S3	Tingkat Kemiskinan	N/A	N/A	6,86	6,83	6,95	7,14	6,87	6,79	7,13	7,17
S4	Tingkat Pengangguran	N/A	N/A	2,92	N/A	2,78	2,63	2,67	2,71	2,52	1,88

Sumber: Data diolah, Tim RPJPN Tahun 2013-2023

Secara umum capaian beberapa indikator dari indeks ekonomi hijau Kabupaten Mamuju Tengah telah menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya. Pendapatan perkapita masyarakat meningkat dari 25,9 juta/pertahun menjadi 27,2 juta pertahun diiringi dengan indikator kesejahteraan masyarakat yang juga menunjukkan perkembangan yang semakin baik seperti rata-rata lama sekolah yang meningkat menjadi 8,69 tahun, angka harapan hidup yang meningkat sebesar 71,89 tahun, dan tingkat pengangguran yang menurun menjadi 1,88 persen. Selain itu kualitas lingkungan hidup seperti indeks kualitas udara meningkat dari 89,13 menjadi 91,73, tutupan lahan meningkat menjadi 81,05 dan emisi gas rumah kaca meningkat menjadi 0,10 poin. Akan tetapi yang masih perlu menjadi perhatian adalah pada angka kemiskinan yang meningkat dan kualitas air yang terus menurun. Data sampai pada tahun 2023 angka kemiskinan mencapai 7,23 persen dan kualitas air terus menurun dari 63,33 menjadi 54,44 sedangkan kemiskinan dan ketersediaan air bersih menjadi isu penting karena menjadi tolak ukur dari kesejahteraan masyarakat.

Hal ini tentu perlu menjadi perhatian yang serius bagi pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerahnya, dibutuhkan komitmen yang serius dengan semua stakeholder, serta kebijakan yang komprehensif dan terkoordinasi sebagaimana diharapkan bahwa penerapan ekonomi hijau dapat menghasilkan peningkatan ekonomi seiring dengan peningkatan kesejahteraan manusia yang berkeadilan sosial, sekaligus mengurangi resiko lingkungan dan kelangkaan ekologis secara signifikan untuk mendorong terciptanya pembangunan yang berkelanjutan.

(2) Indeks Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tujuan dari pengukuran IDSD ini adalah untuk memperoleh sebuah ukuran daya saing daerah yang komprehensif yang dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerahnya. Kerangka pengukuran IDSD 2022 terdiri dari empat komponen yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar dan ekosistem inovasi yang kemudian dielaborasi kedalam 12 pilar daya saing yaitu institusi, infrastruktur, adopsi TIK, kestabilan ekonomi makro, kesehatan, keterampilan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem keuangan, ukuran pasar, dimensi bisnis, dan kapabilitas inovasi. Adapun Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 2. 36 Indeks Daya Saing Daerah dan Nasional, 2012-2022

Keterangan		Nasional	Provinsi	Mamuju Tengah
Pilar 1	Institusi	4,14	4,18	4*
Pilar 2	Infrastruktur	2,91	2,57	2,04
Pilar 3	Adopsi TIK	3,57	3,45	2,52
Pilar 4	Kestabilan Ekonomi Makro	3,05	2,41	2,66
Pilar 5	Kesehatan	3,76	3,33	3,54
Pilar 6	Keterampilan	3,73	3,47	2,75
Pilar 7	Pasar Produk	2,68	3,98	3,55
Pilar 8	Pasar Tenaga Kerja	3,73	4,14	2,56

Pilar 9	Sistem Keuangan	2,66	3,23	1,13
Pilar 10	Ukuran Pasar	1,31	0,1	0,48
Pilar 11	Dimensi Bisnis	5	5	5
Pilar 12	Kapabilitas Inovasi	2,62	1,4	0,07
Skord IDSD		3,26	3,1	2,53

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2022

Capaian indeks daya saing Kabupaten Mamuju Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan provinsi dan nasional yang sudah mencapai angka rata-rata 3 poin. Jika melihat secara umum perbandingan dengan kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat dari 12 pilar indeks daya saing, Kabupaten Mamuju Tengah sudah menunjukkan progres yang baik pada pilar stabilitas ekonomi makro dengan nilai 2,66 point dan pilar pasar produk dengan nilai 3,55 point. Sementara itu ada 4 pilar yang masih perlu dilakukan upaya peningkatan yaitu, pilar pasar tenaga kerja sebesar 2,56 poin, pilar sistem keuangan sebesar 1,13 poin dan pilar kapabilitas inovasi sebesar 0,07 poin.

Sektor ketenagakerjaan merupakan sektor penting bagi pembangunan ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin. Akan tetapi permasalahan daerah sampai sekarang ini yaitu masih belum optimalnya akses lapangan kerja dan indikasi kualitas tenaga kerja yang masih rendah dimana hampir 88,78 persen tenaga kerja Mamuju Tengah didominasi oleh angkatan kerja dengan status pendidikan SMA kebawah sedangkan perguruan tinggi hanya sekitar 11,43 persen. Hal ini tentu akan berpengaruh pada jumlah pendapatan yang di dapatkan karena semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin tinggi juga upah yang akan diterima begitupun sebaliknya. Disisi lain distribusi kredit dan permodalan umkm juga masih rendah disebabkan karena rendahnya pendapatan masyarakat yang mengakibatkan tunggakan dalam mengembalikan pinjamannya sehingga menjadi evaluasi kebijakan pemberian kredit baik perbankan maupun lembaga pemberi kredit lainnya. Disisi lain permasalahan yang paling penting juga adalah pada masih rendahnya kapabilitas inovasi daerah yang baru mencapai 0.07 poin sangat tertinggal jika dibandingkan dengan nasional yang sudah mencapai 2,62 poin. Kapabilitas inovasi ini dapat dilihat dari keenakeragaman tenaga kerja, komersialisasi dagang, dan riset daerah yang dihasilkan.

(3) Rasio Kewirausahaan

Transformasi ekonomi menjadi prasyarat untuk mewujudkan Indonesia yang maju dengan berpendapatan tinggi. Keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan adanya peningkatan rasio kewirausahaan. Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dibandingkan dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Sampai saat ini, rasio kewirausahaan nasional tercatat meningkat dari 2,86 persen di tahun 2022 menjadi 3,47 persen di tahun 2023 dan ditargetkan setidaknya mencapai 12 persen di tahun 2045. Adapun capaian rasio kewirausahaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 37 Rasio Kewirausahaan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi barat dan Nasional, 2013-2022

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	N/A	1,63	1,63	4,48	1,04	1,90	3,39	1,67	0,11		
Provinsi	1,72	1,97	2,78	2,80	3,30	1,21	1,79	2,10	1,18	1,11		
Nasional	3,18	3,43	3,33	3,49	3,09	3,27	3,27	2,93	2,89	2,86	3,04	3,35

Sumber: Data diolah, BPS Tahun 2013-2023

Jika melihat trend data sejak 2015 rata-rata rasio kewirausahaan di Kabupaten Mamuju Tengah sebesar 1,92 persen dimana dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,11 persen ditahun 2022 atau dari 63.749 angkatan kerja hanya terdapat 67 orang dengan status pekerjaan yang dibantu dengan buruh tetap. Angka ini menunjukkan bahwa rasio kewirausahaan di Kabupaten Mamuju Tengah masih sangat rendah karena berada dibawah rata-rata Provinsi dan juga Nasional.

Salah satu penyebab masalah melambatnya pertumbuhan kewirausahaan di Mamuju Tengah adalah masih minimnya literasi dan minat wirausaha serta adanya perkembangan teknologi yang semakin pesat. Saat ini pelaku UMKM masih didominasi oleh pelaku usaha mikro yang memiliki tantangan dalam persaingan pasar apalagi ditambah derasnya laju produk impor mengakibatkan perang harga didalam platform digital. Selain itu UMKM juga masih didominasi oleh *reseller* daripada produsen. Hal ini mengakibatkan *multiplier effect* dari UMKM tidak begitu besar. Untuk itu diperlukan upaya dari pemerintah daerah untuk mendorong pengembangan UMKM melalui kebijakan permodalan, kemudahan perizinan usaha, dan yang terpenting adalah pemberdayaan yang berfokus pada inovasi transformasi berbasis digital yang membuat UMKM dapat menaikkan kapasitasnya sehingga mampu bersaing dalam pasar baik dari kuantitas dan juga kualitas yang tawarkan.

(4) Indeks Ketahanan Pangan

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah. Wilayah yang memiliki nilai IKP paling besar merupakan wilayah yang paling tahan pangan, sebaliknya nilai IKP paling kecil menunjukkan wilayah yang rentan terhadap kerawanan pangan. Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang terintegrasi yang terdiri dari tiga aspek utama yaitu aspek ketersediaan, keterjangkauan serta kualitas dan keamanan pangan. Adapun nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 38 Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat, 2013-2023

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	76,52	78,97	82,95	82,34	81,37	82,26	
Provinsi	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60,37	76,36	75,49	74,04	73,03	

Sumber: Badan Pangan Nasional, 2024

Aspek ketersediaan pangan mencakup aspek produksi, stok serta keseimbangan antara impor dan ekspor pangan. Pemenuhan konsumsi pangan terutama beras jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian menjadi hal yang penting karena merupakan bahan makanan pokok. Berdasarkan data dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian pada tahun 2022 semua produksi pada komoditi tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan rincian sebagai berikut: Produksi padi sawah dari 23.753,20 ton menjadi 23.726 ton, produksi padi lahan kering dari 176,84 ton menjadi 45,8 ton, produksi jagung dari 25.057,30 ton menjadi 15.933,6 ton, produksi umbi-umbian dari 1.808 ton menjadi 1.633 ton, dan produksi kacang-kacangan dari 28 ton menjadi 26 ton.

Ketersediaan beras dari produksi dalam daerah dapat memenuhi kebutuhan pangan namun sampai saat ini Mamuju Tengah belum memiliki ketersediaan beras dari hasil produksi yang dititipkan di Bulog karena belum memiliki lumbung pangan untuk penyediaan stok pangan daerah. Pada tahun 2023 Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian baru menandatangani MOU perjanjian jual beli dengan perum Bulog untuk ketersediaan cadangan beras Mamuju Tengah sebanyak 7.480 Kg.

Sementara dari aspek keterjangkauan, menunjukkan pengeluaran rata-rata bahan makan per kapita sebulan di Kabupaten Mamuju Tengah. Pada tahun 2022, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan di Mamuju Tengah untuk kebutuhan makanan adalah sebesar Rp.535.143,-. Nilai ini meningkat sekitar 2,31 persen dibandingkan dengan tahun 2021 yakni Rp.523.015,-. Proporsi pengeluaran makan terhadap total pengeluaran perkapita sebulan masyarakat Mamuju Tengah pada tahun 2022 adalah sebesar 47,53 persen dengan konsumsi terbesar ada pada kelompok makanan dan minuman jadi sebesar 9,18 persen sementara itu pengeluaran pada konsumsi bahan pangan mengalami penurunan dengan rincian sebagai berikut: padi-padian sebesar 7,65 persen, umbi-umbian sebesar 0,35 persen, kacang-kacangan sebesar 0,73 persen, daging sebesar 1,16 persen, telur dan susu sebesar 2,70 persen, sayur-sayuran 3,30 persen sedangkan untuk ikan/udang/cumi/kerang mengalami peningkatan pengeluaran konsumsi dari 5,85 persen menjadi 6,19 persen.

Skor Indeks Ketahanan Pangan Mamuju tengah mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar 82,34 menjadi 81,37 di tahun 2022. Angka ini masih tergolong cukup baik jika dibandingkan dengan rata-rata indeks ketahanan pangan provinsi yang berada pada angka 74,04. Secara regional pada tahun 2022 Ketahanan Pangan Mamuju Tengah berada di urutan kedua tertinggi setelah Kabupaten Mamuju, sedangkan jika diukur secara nasional Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Mamuju Tengah menempati peringkat 102 dari 416 kabupaten di seluruh Indonesia.

Tantangan terbesar dari ketahanan pangan di Mamuju Tengah adalah daya dukung penyediaan pangan. Berdasarkan data yang ada terdapat dua kecamatan yang telah melampaui batas antara ketersediaan dan kebutuhan pangan yaitu kecamatan Budong-Budong dan Pangale, kemudian di proyeksikan pada tahun 2045 kecamatan Tobadak juga berada pada status melebihi ambang batas. Untuk itu sangat diperlukan berbagai strategi yang dapat diimplementasikan ketika terjadi kekurangan ketersediaan pangan mengingat setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya angka kemiskinan, perubahan alih fungsi lahan pertanian serta perubahan iklim yang ekstrem

(5) Indeks Ekonomi Inklusif

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif mengukur inklusivitas pembangunan di Indonesia melalui aspek pertumbuhan ekonomi, ketimpangan dan kemiskinan, serta akses dan kesempatan. Angka indeks terdiri dari 3 Pilar dan 8 Sub-pilar serta 21 indikator pembentuk indeks pembangunan ekonomi inklusif.

Tabel 2. 39 Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2013-2022

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Provinsi	4,4 9	4,7 7	4,8 2	5,1 4	5,1 7	5,1 2	5,4 3	4,9 9	5,6 7	
Nasional	5,1 1	5,2 4	5,4 2	5,6 6	5,7 6	5,7 7	5,9 7	5,5 4	6,0 0	

Sumber: Bappenas, 2022

Paradigma pertumbuhan Ekonomi di masa depan tidak hanya difokuskan pada pertumbuhan ekonomi saja tetapi harus memperhatikan pembangunan ekonomi yang inklusif, sebagai pertumbuhan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah. Terdapat tiga pilar kebijakan pembangunan ekonomi inklusif yang

meliputi (1) Pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, (2) Pemerataan pendapatn dan pengurangan kemiskinan, (3) Perluasan akses dan kesempatan kerja.

Salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif adalah melalui kebijakan fiskal yang dapat mendukung peningkatan sumber daya manusia khususnya pengeluaran pemerintah melalui pengeluaran di bidang pendidikan dan bidang kesehatan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan sehingga mengarah kepada pemerataan pembangunan. Selain itu adanya jumlah tenaga kerja yang produktif juga merupakan hal penting dalam mendukung pembangunan karena apabila terjadi peningkatan tenaga kerja produktif maka output perekonomian juga dapat meningkat.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Aspek Sumber Daya Manusia dijabarkan dalam Indeks Pendidikan, Angka Literasi/Numerasi dan Indeks Literasi Digital.

(1) Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan pencerminan hasil pembangunan bidang pendidikan. Indikator komposit pembentuk indeks pendidikan adalah Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Capaian Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 40 Indeks Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2023

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	8.71	8.86	9.11	9.30	9.35	9.47	9.58	9.85	10.02	10.13
Provinsi	9.17	9.33	9.58	9.74	9.90	10.05	10.18	10.33	10.41	10.48
Nasional	9.86	10.06	10.20	10.34	10.48	10.54	10.65	10.73	10.81	10.90

Sumber: BPS Mamuju Tengah, 2024. Data diolah

Kabupaten Mamuju Tengah mencatat peningkatan yang stabil pada indeks pendidikannya dari tahun 2013 hingga 2022, naik dari 8.71 menjadi 10.13. Meskipun indikator ini mencerminkan komitmen terhadap peningkatan kualitas pendidikan di wilayah tersebut, perlu dicatat bahwa indeks pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah secara konsisten berada di bawah rata-rata Provinsi dan Nasional selama periode tersebut. Hal ini menandakan adanya tantangan dalam mencapai tingkat pendidikan yang sejajar atau melampaui rata-rata nasional.

Upaya peningkatan sektor pendidikan tampaknya telah dilakukan dengan serius, dan peningkatan tersebut mungkin mencerminkan keberhasilan berbagai inisiatif,

seperti peningkatan kualitas tenaga pendidik, perluasan aksesibilitas pendidikan, dan implementasi program-program pendidikan lokal.

Kabupaten Mamuju Tengah perlu merancang langkah-langkah strategis dan inovatif agar capaian pendidikan setara atau bahkan melampaui rata-rata Provinsi dan Nasional. Kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga pendidikan, dan masyarakat diharapkan dapat menjadi katalisator utama untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Evaluasi berkelanjutan terhadap kebijakan pendidikan dan implementasinya menjadi imperatif, bertujuan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah

(2) Angka Literasi/ Numerasi

Kemampuan literasi merupakan kemampuan peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat.

Tabel 2. 41 Angka Literasi SD dan SMP Kabupaten Mamuju Tengah dan Nasional, 2021-2023

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten	38.95	45.81	50.06	53.97	58.27	62.56
Nasional	48.55	52.48	58.09	59.24	62.56	66.60

Sumber: Rapor Pendidikan, 2024

Berdasarkan data literasi SD dan SMP pada tahun 2021 dan 2022 di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, serta tingkat literasi nasional, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, terdapat peningkatan yang signifikan dalam tingkat literasi SD dan SMP di Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2021 ke 2022, Capaian tiga tahun terakhir persentase jumlah responden yang telah mencapai kompetensi minimum untuk Kemampuan Literasi tahun ini 62,56% naik 4.29 dari tahun 2022 (62.56 %). Meskipun terjadi peningkatan, tingkat literasi SD dan SMP di Kabupaten Mamuju Tengah masih berada di bawah rata-rata nasional pada tahun 2023. Sementara itu, tingkat literasi nasional sebesar 58.09% untuk SD dan 62.56% untuk SMP. Analisis ini menunjukkan bahwa 40% - 70% peserta didik di Kabupaten Mamuju Tengah telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca namun perlu upaya mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum, namun perlu terus meningkatkan upaya literasi guna mencapai tingkat literasi predikat baik. Peningkatan literasi menjadi aspek kunci dalam mendukung pembangunan dan perkembangan masyarakat, sehingga langkah-langkah konkret perlu diambil untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah.

Kemampuan numerasi merupakan kemampuan peserta didik dalam berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia

Tabel 2. 42 Angka Numerasi SD dan SMP Kabupaten Mamuju Tengah dan Nasional, 2021-2023

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	Sekolah Dasar			Sekolah Menengah Pertama		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Kabupaten	30.74	34.58	39.88	51.63	51.94	56.19
Nasional	34.88	39.48	46.33	53.20	54.01	60.20

Sumber: Rapor Pendidikan, 2024

Angka Numerasi SD Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, dengan angka numerasi naik dari 30.74 pada tahun 2021 menjadi 39.88 pada tahun 2023. Untuk angka numerasi SMP Kabupaten Mamuju Tengah juga mengalami peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun, meningkat dari 51.63 pada tahun 2021 menjadi 56.19 pada tahun 2023.

Meskipun angka numerasi di Kabupaten Mamuju Tengah mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah rata-rata nasional untuk kedua tingkatan pendidikan, baik SD maupun SMP. Angka Numerasi SD dan SMP di Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat cenderung lebih rendah dibandingkan dengan tingkat nasional, namun terdapat tren peningkatan yang positif dari tahun ke tahun.

Meskipun terdapat peningkatan, perlu untuk terus memperhatikan dan memperbaiki kualitas pendidikan di Kabupaten Mamuju Tengah agar dapat mengejar atau bahkan melampaui angka numerasi nasional.

(3) Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya **literasi masyarakat**.

Tabel 2. 43 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah dan Provinsi Sulawesi Barat, 2013-2022

Kabupaten/Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten										35,76

Provinsi											17,64	
Nasional												

Sumber: Satu Data Indonesia, 2023

(4) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas. Adapun Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju Tengah ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 44 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	N/A	N/A	70,27	N/A	74,98	75,94	69,59	70,04	70,84	63,15	66,01	69,06
Provinsi	66,82	71,06	70,27	71,90	66,96	68,46	69,27	70,19	70,27	73,00	71,05	71,40
Nasional	93,83	94,06	94,19	94,5	94,67	94,9	95,02	95,06	93,74	94,17	69,5	70,6

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2025

(5) Angka Ketergantungan

Rasio ketergantungan adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan perbandingan antara jumlah penduduk yang tidak produktif secara ekonomi (seperti anak-anak dan lanjut usia) dengan jumlah penduduk yang produktif (yaitu usia kerja) Dimana rasio ketergantungan ini dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, sistem perawatan Kesehatan, dan sistem pensiun suatu negara. Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada table berikut

Tabel 2. 45 Angka Ketergantungan Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional Tahun 2013-2022

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten	-	-	55	54	54	53	53	49	48	48
Provinsi	58	57	56	55	55	54	54	51	50	50

Nasional	50,89	50,88	49,81	49,32	48,42	48,23	47,99	47,89	45,72	44,67
----------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber: BPS Sulawesi Barat, 2023. diolah

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/ Infrastruktur Wilayah

Aspek infrastruktur dijabarkan ke dalam Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur.

(1) Indeks Infrastruktur/ Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur

Konektifitas antar wilayah kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah sudah cukup bagus, karena sudah terhubung dengan fasilitas jalan nasional, provinsi, kabupaten maupun jalan poros desa. Panjang jalan di Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2023 mencapai 442,18 Km berkurang dari tahun sebelumnya di mana panjang jalan berdasarkan SK sebesar 465,879. Dari total panjang jalan kabupaten tersebut sebanyak 19,89 persen jalan dalam kondisi baik, 17,80 persen jalan dalam kondisi sedang, 56,28 persen jalan dalam kondisi rusak ringan dan sisanya 6,03 persen kondisi rusak berat.

Dengan adanya dana desa diharapkan konektifitas di dalam desa maupun antar desa dapat terhubung dengan baik sehingga tidak ada lagi dusun yang terisolir. Tinggal kualitas infrastruktur jalan dan moda transportasi yang memadai untuk mendukung konektifitas tersebut sehingga akan mendukung kelancaran mobilitas barang maupun orang, mendorong aksesibilitas kepada fasilitas pendidikan dan kesehatan serta dapat mengurangi inflasi karena distribusi barang yang lancar dan relatif mudah.

Tabel 2. 46 Indeks Infrastruktur Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2023

No	Indikator	2021			2022		
		Kinerja	Bobot	Indeks	Kinerja	Bobot	Indeks
1	Persentase Jalan Berkondisi Baik (jalan status kabupaten)	56,28	20%	11,26	52,95	20%	10,59
2	Persentase akses air minum	75	20%	15,00	87	20%	17,40
3	Persentase akses sanitasi layak	83	20%	16,60	86	20%	17,20
4	pemukiman layak	96,96	15%	14,54	98,99	15%	14,85
5	Rumah layak huni	79,79	15%	11,97	81,03	15%	12,15
6	Sarana prasarana jalan	5	10%	0,50	12	10%	1,20

S										
Indeks daya saing Infrastruktur	396,03	100%	69,87	324,94	100%	73,39				

ber: Tim RPJPD Mamuju Tengah, 2023. diolah

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

(1) Indeks Daya Saing Daerah

Tabel 2. 47 Indeks Daya Saing Daerah, 2013-2022

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten										
Provinsi										
Nasional										

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan Umum di jabarkan melalui Indeks Reformasi Birokrasi, Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah dan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

(1) Indeks Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 evaluasi reformasi birokrasi bertujuan untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima. Selain itu, evaluasi ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi. Indeks Reformasi Birokrasi sangat Ditentukan oleh hasil antara area perubahan yaitu Sistem Merit, ASN Profesional, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Kualitas Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa, Kualitas Pelayanan Publik, Kapabilitas APIP, Maturitas SPIP, Kepatuhan Terhadap Standar Pelayanan Publik, Kualitas Pengelolaan Arsip dan Reformasi Hukum. Capaian indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 48 Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2023

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten	C	40,61 (C)	46,00 (C)	46,15 (C)	44,36 (C)	
Provinsi	B	B	B	B	B	A-

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah selama 3 (tiga) tahun terakhir terus mengalami peningkatan dari segi nilai indeks walaupun masih pada kategori C. Capaian provinsi Sulawesi Barat masih lebih tinggi dari capaian Kabupaten Mamuju Tengah yaitu pada kategori B. Ini menunjukkan bahwa Mamuju Tengah masih harus terus melakukan akselerasi pada area reformasi birokrasi. Pada tahun 2023 Kementerian P

(2) Indeks Pelayanan Publik

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan dengan mengikutsertakan Masyarakat dan Pihak Terkait. Standar Pelayanan dimaksud merupakan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan. Capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Mamuju Tengah dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 49 Indeks Pelayanan Publik Birokrasi Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, 2012-2023

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Kabupaten									3,30 (B-)	3,48 (B-)
Provinsi					1,81 (D)	2,40 (C)	2,81 (C)	3,27 (B-)	3,43 (B-)	3,49 (B-)
Nasional					3,33 (B-)	3,38 (B-)	3,63 (B)	3,84 (B)	3,79 (B)	3,88 (B)

Sumber: Kementerian PAN-RB, 2023

Berdasarkan Tabel diatas bahwa perhitungan indeks pelayanan publik Kabupaten Mamuju Tengah baru dilakukan dalam 2 tahun terakhir sementara untuk Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional dilakukan sejak tahun 2017. Data menunjukkan bahwa capaian indeks pelayanan publik Kabupaten Mamuju Tengah dalam 2 tahun terakhir mengalami peningkatan dari nilai indeks 3,30 dengan predikat B- pada tahun 2021 menjadi 3,48 dengan predikat B-. Capaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Mamuju Tengah masih dibawah capaian Provinsi Sulawesi Barat walaupun masih memiliki predikat yang sama yakni B-. Demikian juga jika dibandingkan dengan capaian Nasional, capaian Kabupaten Mamuju Tengah dan Sulawesi Barat masih dibawah capaian Nasional.

(3) Indeks Inovasi Daerah

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik, secara optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing Daerah. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah dilakukan dalam rangka Memotivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan inovasi dalam pelayanan masyarakat sesuai dengan kategori sangat inovatif, inovatif, serta memotivasi pemerintah daerah kurang inovatif dan tidak dapat dinilai; 2. Mendorong penerapan good governance; 3. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap proses-proses inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah; dan 4. Memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang berhasil menerapkan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah secara transparan dalam upaya peningkatan pelayanan publik, kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah. Capaian indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2. 50 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat dan Nasional, m 2012-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten								3 (kurang Inovatif)	38,41 (inovatif)	50,56 (inovatif)	54,50 (Inovatif)	58,95 (Inovatif)
Provinsi								794 (inovatif)	36,64 (Inovatif)	46,41 (inovatif)	29,04 (Kurang Inovatif)	49,50 (Inovatif)
Nasional								85	87	29,75		

Sumber: Badan Riset dan Inovasi Nasional, 2025

Berdasarkan Tabel diatas bahwa Indeks inovasi Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2020 masih pada ketegori kurang inovatif, namun terus meningkat sampai dengan tahun 2022 mencapai predikat inovatif. Jika dibandingkan dengan capaian indeks inovasi Provinsi Sulawesi Barat, indeks inovasi Kabupaten Mamuju Tengah lebih tinggi dalam 2 tahun terakhir 2021-2022. Namun jika dibandingkan dengan capaian nasional pada tahun 2020-2021, capaian Kabupaten Mamuju Tengah masih rendah, sementara itu tahun 2022 capaian Kabupaten Mamuju Tengah lebih tinggi.

(4) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Indeks SPBE sendiri merupakan suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pusat maupun pemerintah daerah, yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan berbasis elektronik. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilaksanakan untuk menilai sejauh mana penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dapat berkontribusi pada kemajuan reformasi birokrasi. Pemantauan dan Evaluasi SPBE dilakukan dengan mengukur tingkat kematangan (maturity level) penerapan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang direpresentasikan dalam bentuk nilai indeks SPBE. Dimana tingkat kematangan penerapan SPBE adalah (merupakan area (penerapan SPBE); aspek (merupakan area spesifik penerapan SPBE); indikator (merupakan informasi spesifik dari aspek penerapan SPBE). Capaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Mamuju Tengah dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 2. 51 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 2013-2024

Kabupaten/ Provinsi/ Nasional	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten						1,40	NA	NA	NA	1,83	2,19	2,28
Provinsi						1,46	1,61	NA	2,03	2,28	2,89	3,70
Nasional						1,98	2,18	2,26	2,24	2,34	2,79	3,12

Sumber: Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bawa indeks SPBE Kab. Mamuju Tengah mengalami Peningkatan dari 1,40 tahun 2018 menjadi 1,83 pada tahun 2022, walaupun tahun 2019-2021 datanya tidak tersedia. Jika dibandingkan dengan capaian provinsi sulawesi barat dan Nasional menunjukkan bahwa capaian kabupaten Mamuju Tengan masih rendah.

2.5. Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2013-2015

Visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah tahun 2013-2025 yakni Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Daerah Agribisnis yang Sejahtera, Mandiri dan Berwawasan Lingkungan. Untuk mencapai Visi tersebut didukung dengan 8 misi, 21 tujuan dan 36 sasaran pokok.

Sasaran Pokok pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025 dijabarkan pada visi dan misi pada setiap tahapan dari 2(dua) tahap RPJMD 2013-2025. Evaluasi atas Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah telah dilakukan melalui beberapa tahap rapat tim evaluasi, juga melalui *Focus Group Discussion* yang melibatkan banyak stakeholder terkait. Adapun hasil dari capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2. 52 Evaluasi Terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2013-2025

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					(6)		(7)		(8)		(9)	(10)	
					2015-2019	2020-2025	2015-2019	2020-2025	2015-2019	2020-2025	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong	
Mengembangkan sistem agribisnis dan kawasan agropolitan sebagai basis pertumbuhan ekonomi daerah	meningkatnya volume produksi dan nilai produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura serta kesejahteraan petani	<i>Kontribusi pertanian dalam struktur PDRB (ADHB)</i>	15,34	17,00	16,34	16,67	31,28	22,64	100,00	100,00	Kontribusi sektor-sektor unggulan belum optimal	Adanya bantuan bibit dan pupuk gratis	
	terpeliharanya ketersediaan, keterjangkauan dan konsumsi pangan yang memenuhi pola pangan harapan secara berkelanjutan	<i>Indeks Pola Pangan Harapan (%)</i>	N/A	diatas rata-rata provinsi	sama dengan rata-rata provinsi	di atas rata-rata provinsi	95,6	N/A	100,00	30,00	Alih fungsi lahan pangan yang cukup tinggi, pengelolaan lahan kritis belum optimal	pemberian pelatihan dan penyuluhan terkait mutu dan kualitas produk pertanian	
	Terlindunginya lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi lahan dan degradasi kesuburan lahan	<i>berlakunya regulasi perlindungan atas lahan pertanian pangan berkelanjutan dari konversi dan degradasi kesuburan</i>	Belum ada perda PLPB	Perda PLPB berlaku dengan efektif	Perda PLPB berlaku dengan efektif	Perda PLPB berlaku dengan efektif	belum ada	Perbup LP2B	30,00	70,00	Terbatasnya infrastruktur pendukung pertanian,	Tersedianya pelayanan pemberian kredit atau lembaga pelayanan yang lain agar proses produksi dapat berjalan lancar	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
	meningkatnya populasi ternak dan nilai produksi hasil peternakan serta kesejahteraan peternak	<i>kontribusi peternakan dalam struktur PDRB (ADHB)</i>	3,78	4,25	4,00	4,25	3,15	2,28	78,75	53,65	serangan hama penyakit tanaman ternak	adanya bantuan bibit ternak gratis	
	meningkatnya volume produksi dan nilai produksi tanaman perkebunan serta kesejahteraan petani perkebunan	<i>kontribusi perkebunan dalam struktur PDRB (ADHB)</i>	43,24	45,24	44,24	44,74	49,41	39,1	100,00	87,39	perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman, belum optimalnya pengolahan pasca panen	pengendalian harga produk pertanian oleh pemerintah	
	meningkatnya volume produksi dan nilai produksi perikanan serta kesejahteraan nelayan dan pembudidaya ikan	<i>kontribusi perikanan dalam struktur PDRB</i>	8,33	10,33	9,33	9,83	12,08	8,49	100,00	86,37	keterbatasan modal sehingga penyediaan fasilitas kerja sulit dipenuhi	adanya bantuan dari pemerintah	
	meningkatnya keterkaitan fungsional antar subsistem agribisnis dan dukungan fasilitas/jasa dalam kawasan agropolitan	<i>Ketersediaan subsistem agribisnis di kawasan agropolitan (subsistem usaha tani, sarana produksi, pengolahan hasil level UKM maupun besar, pemasaran, subsistem pendukung: penyuluh)</i>	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	100,00	100,00	Keterbatasan modal, maka penyediaan fasilitas kerja berupa alat-alat usahatani sulit dipenuhi akibatnya intensitas penggunaan kerja semakin menurun	Tersedianya pelayanan pemberian kredit atau lembaga pelayanan yang lain agar proses produksi dapat berjalan lancar.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					dibawah rata-rata provinsi	dibawah rata-rata provinsi	6,79 (Sulbar= 10,87)	7,17 (Sulbar= 11,75)	100,00	100,00	ketergantungan pada sektor pertanian yang sangat tinggi, dan dengan value added pertanian yang rendah	adanya bantuan dari pemerintah, usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mendapatkan pekerjaan	
Mendorong kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan sosial berbasis kerakyatan	meningkatkan kemampuan sosial-ekonomi penduduk miskin	<i>angka kemiskinan (%)</i>	dibawah rata-rata provinsi	dibawah rata-rata provinsi	dibawah rata-rata provinsi	dibawah rata-rata provinsi	6,79 (Sulbar= 10,87)	7,17 (Sulbar= 11,75)	100,00	100,00	ketergantungan pada sektor pertanian yang sangat tinggi, dan dengan value added pertanian yang rendah	adanya bantuan dari pemerintah, usaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat agar mendapatkan pekerjaan	
	meluasnya jangkauan penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	<i>cakupan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tertangani (%)</i>	N/A	diatas rata-rata provinsi	sama dengan rata-rata provinsi	di atas rata-rata provinsi	di atas rata-rata provinsi	di atas rata-rata provinsi	100,00	100,00	data PMKS yang belum update		
	meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat	<i>PDRB per Kapita (Rp)</i>	Rp. 17,35 juta	lebih tinggi dari PDRB per Kapita Prov. Sulbar	lebih tinggi dari PDRB per Kapita Prov. Sulbar	lebih tinggi dari PDRB per Kapita Prov. Sulbar	23,76 (sulbar = 33,31)	27,24 (Sulbar= 37,07)	71,00	73,00			
	Berkembangnya lapangan kerja, lapangan usaha, dan daya saing tenaga kerja pada berbagai aspek kompetensi	<i>tingkat pengangguran terbuka (%)</i>	1,03	1,02	1,02	1,02	2,71	1,88	37,64	54,26	masih rendahnya tingkat pendidikan angkatan kerja	pemberdayaan UMKM atau sektor informal untuk membuka lapangan pekerjaan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten			Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					di atas persentase Prov. Sulbar	di atas persentase Prov. Sulbar	di atas persentase Prov. Sulbar	Dibawah rata-rata Sulbar	Dibawah rata-rata Sulbar					
	meningkatnya aktivitas koperasi, usaha kecil, usaha menengah dan Badan Usaha Milik Desa	<i>persentase koperasi aktif, persentase usaha kecil aktif, persentase usaha menengah aktif, persentase desa yang memiliki Bumdes aktif</i>	N/A	di atas persentase Prov. Sulbar	di atas persentase Prov. Sulbar	di atas persentase Prov. Sulbar	Dibawah rata-rata Sulbar	Dibawah rata-rata Sulbar	70,00	70,00	Sektor Koperasi dan Usaha Kecil Mikro juga belum memperhatikan peran yang signifikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi	partisipasi aktif para investor dalam mendanai pengusaha UMKM		
	berkembangnya kegiatan industri rumah tangga dan industri kecil serta perdagangan	<i>kontribusi industri dan perdagangan dalam PDRB (ADHB)</i>	N/A	20,00	15,00	20,00	12,99	9,07	86,60	45,35	Sektor Industri masih mengandalkan kerajinan dan industri rumah tangga	lebih diarahkan tumbuh berkembangnya kawasan industri pertanian (agroindustri) di samping industri kecil dan rumah tangga		
Memelihara stabilitas daerah, ketertiban umum, kerukunan beragama, serta persatuan dan kesatuan masyarakat	terbangunnya kepastian batas wilayah secara administratif antar desa, kecamatan di dalam kabupaten serta antar kabupaten	<i>jumlah insiden terkait batas desa dan batas kecamatan yang terjadi</i>	ada insiden	jumlah insiden berkurang	jumlah insiden berkurang	jumlah insiden berkurang	jumlah insiden berkurang	jumlah insiden berkurang	100,00	100,00	adanya kesenjangan ekonomi yang tinggi, heterogenitas budaya			

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					tercapai peningkatan cakupan	tercapai peningkatan cakupan	Tidak ada laporan kasus	50	100,00	50,00	belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait, belum adanya PP PNS pada dinas trantib	penerapan nilai Lalla'Tassisara	
	terpeliharanya ketertiban umum, ketenteraman hidup serta perlindungan masyarakat	<i>cakupan gangguan ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan (K3) masyarakat yang tertangani (%)</i>	(kosong)	tercapai peningkatan cakupan	tercapai peningkatan cakupan	tercapai peningkatan cakupan	Tidak ada laporan kasus	50	100,00	50,00	belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait, belum adanya PP PNS pada dinas trantib	penerapan nilai Lalla'Tassisara	
	terpeliharanya hubungan harmonis dan kerukunan antar umat beragama dalam daerah yang tangguh menangani konflik	<i>jumlah insiden terkait hubungan antar umat beragama (jumlah kejadian)</i>	tidak ada insiden	tidak ada kejadian	tidak ada kejadian	tidak ada kejadian	100	100	100,00	100,00	belum maksimalnya koordinasi antar perangkat daerah terkait, belum adanya PP PNS pada dinas trantib	penerapan nilai Lalla'Tassisara	
Meningkatkan kualitas manusia dan keberdayaan masyarakat	meningkatnya derajat pembangunan manusia sebagai dampak dari seluruh upaya pembangunan	<i>Indeks Pembangunan Manusia</i>	61,48	di atas IPM Prov. Sulbar	di atas IPM Prov. Sulbar	di atas IPM Prov. Sulbar	65,71 (sulbar=66,11)	66,89 (Sulbar: 66,92)	99,39	99,96	angka putus sekolah yang juga masih tinggi, Kesadaran hidup sehat yang masih rendah, Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita, Angka Kematian Ibu, Angka gizi buruk (BBLR), dan kasus penyakit menular, rata-rata masih menunjuk-kan angka yang tinggi	Meningkatkan pendidikan kesetaraan, pembangunan infrastruktur air bersih dan sanitasi, pemberdayaan ekonomi masyarakat	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					lebih tinggi dari AMH dan RLS Prov. Sulbar	lebih tinggi dari AMH dan RLS Prov. Sulbar	AMH 99,75 (Sulbar 99,49); RLS 7,24 (Sulbar: 7,73)	AMH 99,59 (sulbar: 99,52) RLS 7,61 (Sulbar: 8,08)	80,00	75,00	Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang masih sangat terbatas pada semua tingkatan pendidikan, SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang masih sangat terbatas,	Tersedianya sekolah, sebagai salah satu faktor penentu kualitas penduduk adalah fasilitas pendidikan	
	meningkatnya akses masyarakat secara merata antar wilayah dan antar kelompok masyarakat atas kemampuan literasi dan layanan pendidikan berkualitas	<i>angka melek huruf (%) dan angka rata-rata lama sekolah (tahun)</i>	RLS =6,49	lebih tinggi dari AMH dan RLS Prov. Sulbar	lebih tinggi dari AMH dan RLS Prov. Sulbar	lebih tinggi dari AMH dan RLS Prov. Sulbar	AMH 99,75 (Sulbar 99,49); RLS 7,24 (Sulbar: 7,73)	AMH 99,59 (sulbar: 99,52) RLS 7,61 (Sulbar: 8,08)	80,00	75,00	Sarana dan prasarana pelayanan pendidikan yang masih sangat terbatas pada semua tingkatan pendidikan, SDM tenaga pendidik dan kependidikan yang masih sangat terbatas,	Tersedianya sekolah, sebagai salah satu faktor penentu kualitas penduduk adalah fasilitas pendidikan	
	meningkatnya akses masyarakat secara merata antar wilayah dan antar kelompok atas layanan kesehatan berkualitas	<i>angka harapan hidup (tahun)</i>	67,00	70,00	68,50	70,00	AHH 68,06 (Sulbar 64,82)	AHH 68,97 (Sulbar: 65,63)	99,36	98,53	keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan; Kuantitas dan kualitas tenaga medis dan paramedis yang belum memadai dan belum terdistribusi secara merata	peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, memperluas pendampingan kesehatan	
	meningkatnya keberdayaan masyarakat, respositivitas gender dan perlindungan anak dalam pembangunan	<i>rata-rata jumlah kelompok yang dibina oleh LPM Desa (Kelompok)</i>	N/A	diatas rata-rata provinsi	diatas rata-rata provinsi	diatas rata-rata provinsi	2	2	50,00	50,00		BKKBN menyediakan PIK R/M atau Pusat Informasi Konseling Remaja/ Mahasiswa.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					Baik=30%	baik=40%	baik=21,07	Baik=45,52	70,23	87,87			
Mengembangkan kapasitas infrastruktur wilayah bagi kemandirian dan daya saing daerah	Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur transportasi daerah daam interkoneksi pusat pemukiman dan kegiatan ekonomi dari desa ke kecamatan dan kecamatan ke ibu kota kabupaten	<i>porsi panjang jalan kabupaten kualitas baik, sedang, rusak dan rusak berat (%)</i>	Baik =116.775; Sedang=124.071; Rusak=145.633; Rusak Berat=75.400	baik=40%	Baik=30%	baik=40%	baik=21,07	Baik=45,52	70,23	87,87	terdapat perubahan metode survey yang mengakibatkan hasil survey dan persentase kondisi jalan, bertambahnya ruas jalan status kewenangan kabupaten	adanya ruas jalan kewenangan kabupaten yang menjadi prioritas konektivitas antar wilayah.	
	terpenuhinya sarana dan prasarana perhubungan darat dan laut dalam mendukung pergerakan manusia dan barang di dalam wilayah kabupaten dan keluar wilayah kabupaten	<i>jumlah penumpang dan volume barang yang terangkut di terminal dan pelabuhan</i>	N/A	100% terangkut	100%	100%	77,85%	53,70%	77,85	53,70	belum memadainya infrastruktur terminal dan pelabuhan, belum tersedianya lahan untuk terminal Tipe B	ada komoditas unggulan yang menjadi barang ekspor keluar daerah, lokasi yang strategis	
	terpenuhinya kapasitas infrastruktur perumahan dan pemukiman bersanitasi	<i>persentase rumah bersanitasi baik</i>	N/A	75%	50%	62,5%	66,92%	81,21%	100,00	100,00	masih kurangnya kesadaran masyarakat terkait limbah rumah tangga	permukiman yang belum padat menjadi kesempatan untuk menata perencanaan	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
												sanitasi lebih mudah	
	terpenuhinya kapasitas infrastrukturnya air bersih	<i>persentase rumah yang mengakses air bersih</i>	N/A	75%	50%	62,5%	63,32%	77,41%	100,00	100,00	alat pengolah air bersih masih terbatas sehingga volume debit air yang akan didistribusikan masih kurang, sumber air tanah yang kurang	dilintasi DAS budong2 sebagai sumber air, masih terdapat potensi air baku yang belum dikelola	
	terpenuhinya kapasitas infrastruktur energi	<i>rasio elektrifikasi (persentase rumah yang mengakses listrik)</i>	N/A	75%	50%	75%	100%	100%	100,00	100,00		tersedianya gardu induk pembangkit tenaga listrik	
Mewujudkan pemerintahan yang baik	terbangunnya sistem perencanaan pembangunan daerah yang terpadu antar urusan, dengan basis data yang valid, akuntabel, transparan dan partisipatif sesuai kalender perencanaan	<i>ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMDm Renstra SKPD, Rencja SKPD dan RKPD sesuai kalender perencanaan</i>	ketersediaan dokumen RPJPD, RPJMDm Renstra SKPD, Rencja SKPD dan RKPD sesuai kalender perencanaan	Dokumen belum sepenuhnya terpenihi	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	masih kurangnya tenaga perencana ahli	adanya sistem informasi data	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
					WTP	WTP	WTP	WTP					
	berkembangnya sistem pengelolaan administrasi pemerintahan dan keuangan daerah yang akurat, akuntabel dan transparan	<i>opini laporan keuangan dan laporan kinerja daerah (LPPD)</i>	opini laporan keuangan dan laporan kinerja daerah (LPPD)	Tanpa Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	100,00	100,00	belum optimalnya PAD yang berdampak pada ketergantungan terhadap Pemerintah pusat, masih terbatasnya jumlah dan kualitas pengelolaan keuangan dan auditor daerah		
	meningkatnya kompetensi dan profesionalisme SDM aparat sipil negara dalam menjalankan fungsi kelembagaan birokrasi secara efektif dan efisien serta adaptif terhadap dinamika perubahan	<i>persentase SDM aparatur yang menempati fungsi sesuai keahlian/kompetensinya</i>	persentase SDM aparatur yang menempati fungsi sesuai keahlian/kompetensinya	N/A	100%	75%	70%	60%	70,00	80,00	masih belum optimalnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi		
	meningkatnya kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan pelayanan dasar	<i>Indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dasar (%)</i>	Indeks kepuasan masyarakat atas penyelenggaraan dasar (%)	N/A	50%	75%	70%	62,50%	100,00	83,33			
	meningkatnya kapasitas dan kinerja pemerintahan kecamatan dalam	<i>indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah kecamatan (%)</i>	indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan pemerintah	N/A	50%	75%	70%	62,50%	100,00	83,33	masih rendahnya budaya kerja dalam birokrasi sehingga etos		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
	mengoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan dan pelayanan		kecamatan (%)									kerja dan produktivitas kerja belum efektif.	
	meningkatkan kapasitas pemerintahan dan masyarakat desa dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhan lokal	<i>jumlah dan persentase Desa Mandiri (desa dan %)</i>	jumlah dan persentase Desa Mandiri (desa dan %)	N/A	25%	37,5%	1 desa = 1,85%	3 desa = 5,55%	7,40	14,80		masih rendahnya kualitas SDM pemerintah desa dan aparat, belum optimalnya peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan untuk turut berperan dalam proses pembangunan.	

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Usulan Tindak Lanjut
Mengoptimalkan Keberlanjutan Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Kelestarian Lingkungan Hidup	terlindungnya kualitas lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan flora/fauna langka karena tekanan ekstensifikasi pertanian dan perkebunan, perkembangan pemukiman, eksploitasi pertambangan dan kerusakan hutan	<i>Indeks Mutu Lingkungan Hidup</i>	N/A	Minimal sama dengan IMLH Prov. Sulbar	Minimal sama dengan IMLH Prov. Sulbar (67,25)	Minimal sama dengan IMLH Prov. Sulbar (74,91)	NA	71,38	NA	95,29	masih banyaknya kegiatan alih fungsi hutan, rusaknya dan berkurangnya luasan mangrove dan terumbu karang, sedimentasi sungau dan abrasi pantai		
	meningkatnya kapasitas dan kinerja pelayanan dalam penanganan sampah dan limbah, bahan beracun dan berbahaya, pencemaran tanah, air dan udara serta kebersihan dan keindahan kota	<i>perolehan penghargaan kebersihan kota (adipura)</i>	N/A	Piala Adipura Kategori Kota Kecil	Sertifikat Adipura kategori Kota Kecil	Piala Adipura kategori Kota Kecil	tidak ada	tidak ada	10,00	10,00	sarana prasarana pengolahan persampahan yang sangat terbatas		
	berkembangnya kapasitas penanganan	<i>luas kawasan rawan banjir</i>	N/A	maksimal 10%	Maksimal 20%	maksimal 10%	7	8	35,00	80,00	Tingginya risiko bencana banjir yang		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten		Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)		Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten	Usulan Tindak Lanjut
	sumberdaya air dan kawasan pesisir (rawa, sungai, waduk, irigasi, drainase, embung, lahan gambut, lahan pasang surut dan pesisir) dalam mencegah kejadian bencana yang bersumber dari alam										lebih banyak dipengaruhi oleh faktor alam	
	berkembangnya kapasitas penanganan bencana dalam pengelolaan kawasan rawan banjir, kawasan rawan longsor, kawasan rawan banjir bandang, kawasan rawan kebakaran lahan, kawasan rawan gelombang besar dan tsunami, serta kawasan rawan gempa bumi	<i>cakupan korban bencana yang tertangani</i>	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100,00	100,00	masih kurangnya sarana prasarana penanggulangan bencana	
	berkembangnya kapasitas pengurangan emisi gas rumah kaca dan kemampuan adaptasi/mitigasi terhadap perubahan iklim pada berbagai	<i>adanya rencana aksi pengurangan emisi gas rumah kaca dan adaptasi/mitigasi perubahan iklim yang terimplementasikan</i>	N/A	5 aksi	2 aksi	5 aksi	NA	NA	NA	NA		

Misi Daerah	Sasaran Pokok	Indikator	Data Capaian Awal Tahun Perencanaan	Target Capaian pada Akhir Tahun Perencanaan	Target Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten	Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten	Tingkat Capaian Kinerja RPJMD Kabupaten terhadap Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten (%)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Capaian Kinerja Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten	Usulan Tindak Lanjut
	aspek kehidupan								
Rata-rata capaian kinerja (%)							81,57	78,05	
Predikat Kinerja							Tinggi	Tinggi	
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional:									
1. Terwujudnya masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab									
2. terwujudnya bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan sejahtera									
3. terwujudnya Indonesia yang demokratis, berlandaskan hukum dan berkeadilan									
4. Terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat serta terjaganya kebutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari ancaman baik dari dalam negeri maupun luar negeri									
5. Terwujudnya pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan									
6. Terwujudnya Indonesia yang asri dan lestari									
7. Terwujudnya Indonesia sebagai negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional									
8. Terwujudnya peranan Indonesia yang meningkat dalam pergaulan dunia internasional									
Sasaran pokok pembangunan jangka panjang Prov. Sulawesi Barat:									
1. Terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat Sulawesi Barat									
2. Meningkatnya taraf hidup masyarakat Sulawesi Barat									
3. Terwujudnya pembangunan yang merata antar sektor dan antar wilayah									
4. Terwujudnya pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup									
5. Terwujudnya pemerintahan yang kuat dan kehidupan demokrasi yang sehat dan dinamis									
6. Terwujudnya karakter manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang berakhlak mulia, bermoral tinggi, dan berbudaya luhur									
7. Terwujudnya manusia dan masyarakat Sulawesi Barat yang bderdaya saing dengan ualitas pengetahuan dan kesehatan yang tinggi									

RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah dievaluasi berdasarkan dua periode RPJPD yakni 2014-2019 dan 2020-2025 dimana tahun evaluasi periode akhir dilaksanakan berdasarkan capaian di tahun 2022. Secara umum capaian kinerja atas indikator yang ditetapkan meliputi indikator kinerja makro kesejahteraan sosial dan indikator kinerja ekonomi selama periode RPJPD diperoleh hasil yang baik atau dengan kategori tinggi.

Beberapa indikator kinerja makro kesejahteraan sosial masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain tingkat pengangguran terbuka yang dan kemiskinan masih berada pada kategori rendah. kondisi ini terutama terjadi pada periode pertama RPJPD dimana pada akhir periode pertama RPJPD terjadi peningkatan tingkat pengangguran melampaui capaian awal tahun perencanaan. Beberapa indikator kinerja makro ekonomi masih ditemukan dengan capaian kinerja yang belum baik antara lain pertumbuhan ekonomi yang berada pada kategori rendah. kondisi ini terjadi pada akhir periode kedua . Hal ini dipengaruhi oleh kondisi global yakni dampak Pandemi Covid-19.

Berdasarkan dengan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, beberapa rekomendasi tindak lanjut dalam rangka perbaikan periode yang akan datang, yakni:

1. Berkaitan dengan indikator kesejahteraan sosial dengan capaian kinerja yang belum mendapat kategori baik, diharapkan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah mampu merancang dan merencanakan berbagai kebijakan dan program yang *pro poor, pro growth dan pro human development* seperti menciptakan atau menyediakan lapangan kerjaya luas pada berbagai sector ekonomi, kemudahan dan insentif bagi pelaku UMKM, dan peningkatan kapasitas bagi tenaga kerja.
2. Berkaitan dengan kinerja beberapa indikator makro ekonomi yang juga masih dalam kategori belum baik, diharapkan kedepannya dalam perencanaan RPJPD periode berikutnya Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah semakin mampu merancang dan merencanakan berbagai program yang mampu menarik investor serta berbagai kebijakan dan program yang mampu mendorong pemulihan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi terutama untuk sector-sektor ekonomi yang berkontribusi dominan terhadap perekonomian daerah.
3. Diharapkan pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah tetap berinovasi dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja Daerah.

2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

2.6.1 Analisa Proyeksi kependudukan 2025-2045

Penduduk adalah salah satu faktor penting dalam pembangunan. Oleh karena itu data kependudukan memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan. Perencanaan Pembangunan perlu ditunjang dengan informasi terkait besaran dan komposisi kependudukan yang lengkap dan berkesinambungan. Penyusunan perencanaan dan kebijakan sesuai dinamikan waktu di masa mendatang membutuhkan informasi proyeksi penduduk di masa depan. Proyeksi penduduk akan membantu pembuatan kebijakan untuk memonitor dan mengevaluasi program, mengidentifikasi kesenjangan dalam implementasi, serta merancang kebijakan selanjutnya. Proyeksi penduduk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini bersumber dari hasil proyeksi penduduk Badan Pusat Statistik

a. *Proyeksi Jumlah Total Penduduk*

Penduduk dasar yang digunakan dalam proyeksi penduduk 2020-2035 adalah penduduk pertengahan tahun hasil Sensus Penduduk 2020 (SP2020). Secara umum, asumsi mengenai kecenderungan angka kelahiran, angka kematian, serta perpindahan penduduk ditentukan oleh kecenderungan yang terjadi di masa lalu. PBS menggunakan program *Rural Urban Projection (RUP)*.

Jumlah penduduk Kabupaten Mamuju Tengah pada bulann Juni 2020 sebesar 134.556 orang. Proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2023 adalah 142.455 jiwa. Pertumbuhan penduduk berlanjut sepanjang periode proyeksi. Jumlah penduduk diproyeksikan mencapai 147.788 pada tahun 2025, 161.029 orang di tahun 2030 dan 173.621 orang pada tahun 2035.

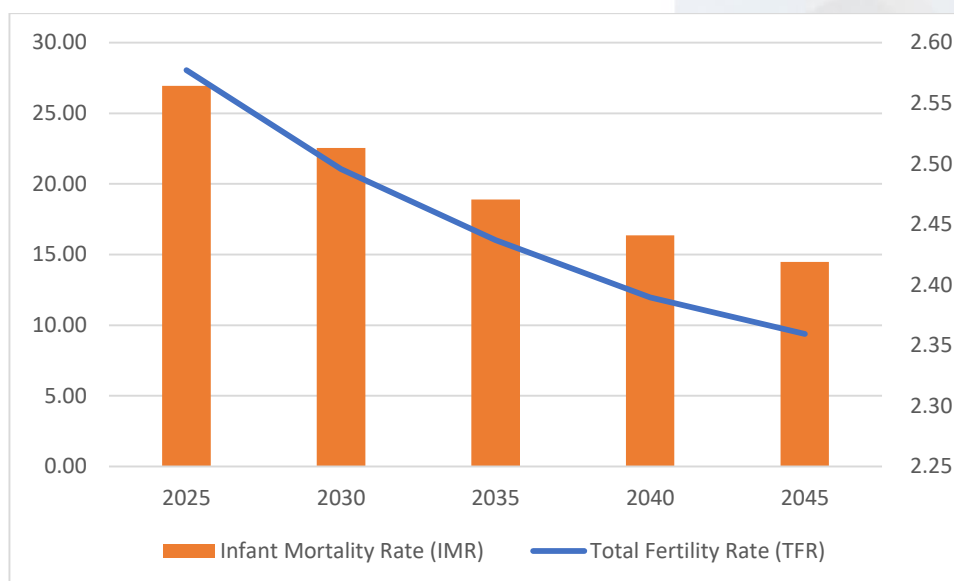
Tabel 2. 53 *Proyeksi Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, 2025-2045*

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
142455	147788	161029	173621	185144	195877

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Dalam Grand Design Kependudukan Kabupaten Mamuju Tengah, proyeksi fertilitas menggunakan asumsi yang telah disesuaikan dengan kondisi Kabupaten Mamuju Tengah yang meliputi Crude Birth Rate (CBR) dan Child Women Ratio (CWR). CBR atau tingkat kelahiran kasar dapat diartikan sebagai banyaknya kelahiran hidup pada tahun tertentu tiap 1000 penduduk pada pertengahan tahun. Sedangkan CWR atau rasio ibu dan anak adalah rasio dari anak-anak di bawah 5 per 1000 wanita usia reproduksi. Biasanya dihitung dengan membagi jumlah anak dalam kelompok usia 0-4 (dari kedua jenis kelamin) dengan jumlah wanita usia reproduksi (15-49 tahun) dan kemudian mengalikan dengan 1000. Adapun proyeksi CBR dan CWR Kabupaten Mamuju Tengah 2020-2035 dengan model geometrik.

Gambar 2. 26 Proyeksi Fertilitas Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045



Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2024

Kepadatan penduduk dihitung berdasarkan jumlah penduduk dibagi total luas wilayah. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013, luas wilayah Kabupaten Mamuju Tengah adalah 3.014,37 km². Berdasarkan peta RBI 2014 pada dokumen RTRW Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2017-2037 Kabupaten Mamuju Tengah memiliki luas wilayah 3.100,87 Km² (310.086,92) Ha, yang merupakan 18,33 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Barat (16.916,02 km²). Proyeksi jumlah penduduk Mamuju Tengah Tahun 2025 sejumlah 147.788 orang.

Tabel 2. 54 Proyeksi Kepadatan Penduduk Kabupaten Mamuju Tengah, 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
142455	147788	161029	173621	185144	195877
47,26	49,03	53,42	57,60	61,42	64,98

Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2024

b. *Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin*

Jumlah penduduk perempuan Kabupaten Mamuju Tengah di tahun 2020 adalah 65.020 orang dan penduduk laki-laki berjumlah 69.536 orang. Jumlah proyeksi penduduk perempuan di tahun 2025 sebesar 71.906 orang dan laki-laki berjumlah 75.882 orang, 78.819 penduduk Perempuan dan 82.210 penduduk laki-laki di tahun 2030, serta 85.418 penduduk Perempuan dan 88.203 penduduk laki-laki di tahun 2035.

Tabel 2. 55 Proyeksi Penduduk Menurut Jenis Kelamin Kabupaten Mamuju Tengah, 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	73324	75882	82210	88203	93638	98644
Perempuan	69131	71906	78819	85418	91509	97233
Rasio	106,07	105,53	104,30	103,26	102,33	101,45

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat sex ratio penduduk Mamuju Tengah. Pada tahun 2023, sex ratio mencapai 106,07. Artinya pada tahun 2023 di setiap 100 orang Perempuan terdapat 106 orang laki-laki. Proyeksi sex ratio pada tahun 2025 turun menjadi 105,53 dan terus turun pada tahun 2035 menjadi 103,26. Hal ini menunjukkan proyeksi rasio perbandingan jumlah penduduk Perempuan dan penduduk laki-laki akan semakin seimbang.

Analisis bonus demografi dihitung dengan membandingkan antara penduduk usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif. Bonus demografi adalah masa di mana penduduk usia produktif (15-64 tahun) akan lebih besar dibanding usia non produktif (65 tahun ke atas) dengan proporsi lebih dari 60 persen dari total jumlah penduduk.

Gambar 2. 27 Proyeksi Penduduk Mamuju Tengah Tahun 2020, 2035 dan 2045



Sumber: BPS Kabupaten Mamuju Tengah, 2024. diolah

Proyeksi penduduk Mamuju Tengah pada gambar 2.3 menunjukkan peningkatan jumlah penduduk umur 60 tahun keatas pada tahun 2020, 2035 dan 2045. Proporsi penduduk umur 60 tahun ke atas pada 2020 sebesar 8035 orang atau 5,97 persen dari total penduduk, meningkat menjadi 18.173 orang atau 10,46 persen dari total penduduk di tahun 2035. Sedangkan pada tahun 2045 proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas meningkat menjadi 26.152 orang atau 13,35 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut menunjukkan bahwa kabupaten Mamuju Tengah memasuki fase struktur umur penduduk menua, yang ditandai dengan proporsi penduduk berusia 60 tahun ke atas di Mamuju Tengah yang sudah melebihi 10 persen dari total penduduk.

c. *Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur*

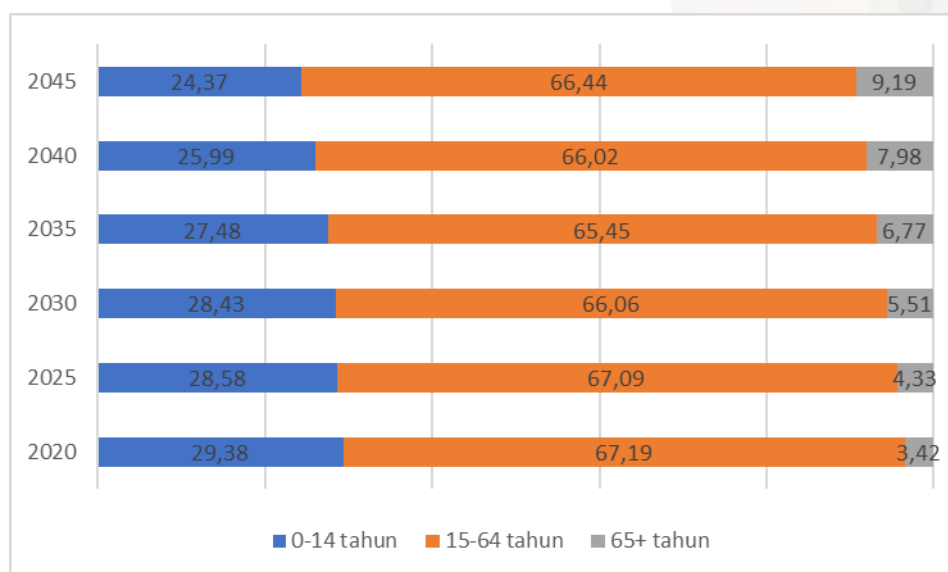
Jumlah penduduk berdasarkan umur dikategorikan berdasarkan tiga kelompok umur, yakni 0-14 tahun, 15-64 tahun dan 65 tahun ke atas.

Tabel 2. 56 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Mamuju Tengah, 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Proyeksi Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	40957	42235	45778	47713	48119	47736
15-64 Tahun	95893	99149	106373	113641	122243	130139
>65 Tahun	5605	6404	8878	11759	14782	18002
Angka Ketergantungan	48,56	49,06	51,38	52,33	51,46	50,51

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Gambar 2. 28 Komposisi Umur Penduduk Mamuju Tengah 2020-2045

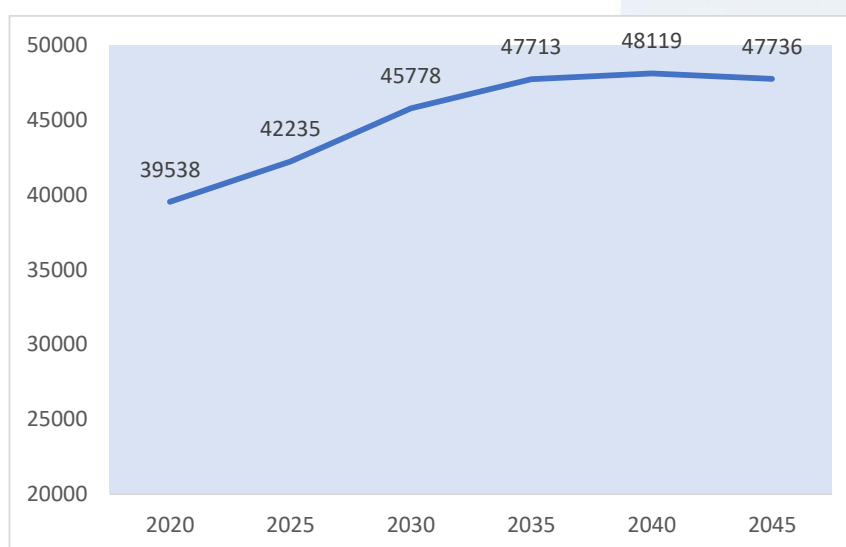


Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2024. diolah

Proporsi penduduk usia 0-14 tahun diproyeksikan turun dari 29,38 persen pada tahun 2020 menjadi 27,48 persen pada tahun 2035. Selama tahun 2020-2045, cenderung terjadi peningkatan penduduk usia 15-64 tahun dari 67,19 persen menjadi 66,44 persen. Terdapat peningkatan penduduk usia 65 tahun ke atas dari 3,42 persen di tahun 2020 9,19 persen di tahun 2045.

Hasil proyeksi memperlihatkan adanya peningkatan jumlah penduduk usia 0 - 14 tahun dari 39.538 orang pada tahun 2020 menjadi 42.235 orang pada tahun 2025, dan terus meningkat menjadi 47.713 orang pada 2035. Proporsi penduduk usia kurang dari 15 tahun mewakili 29,38 persen dari total populasi pada tahun 2020. Pada tahun 2035, proporsi penduduk berumur kurang dari 15 tahun diproyeksikan akan menurun menjadi 27,48 persen.

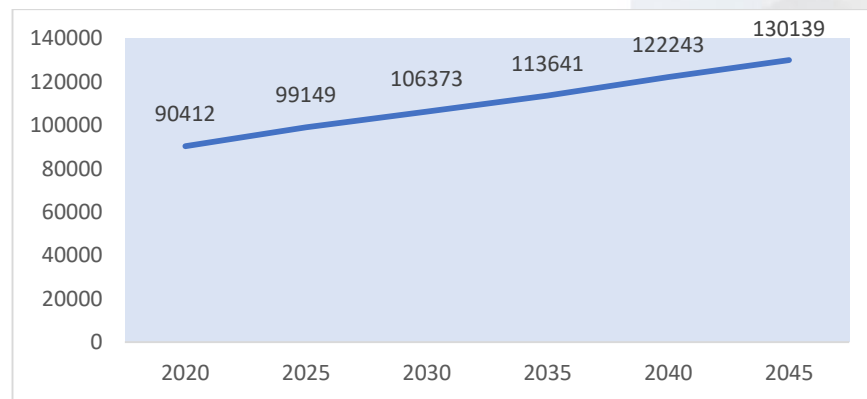
Gambar 2. 29 Proyeksi Penduduk Mamuju Tengah Kelompok Umur 0-14 Tahun, 2020-2045



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Komposisi penduduk umur 15-64 tahun diproyeksikan pada tahun 2020 mencapai 90.412 orang dan terus meningkat hingga mencapai 113.641 orang pada tahun 2035. Proporsi penduduk umur 15-64 tahun sebesar 67,19 persen pada tahun 2020 dan cenderung meningkat menjadi 65,45 persen dari jumlah total penduduk di Mamuju Tengah tahun 2035.

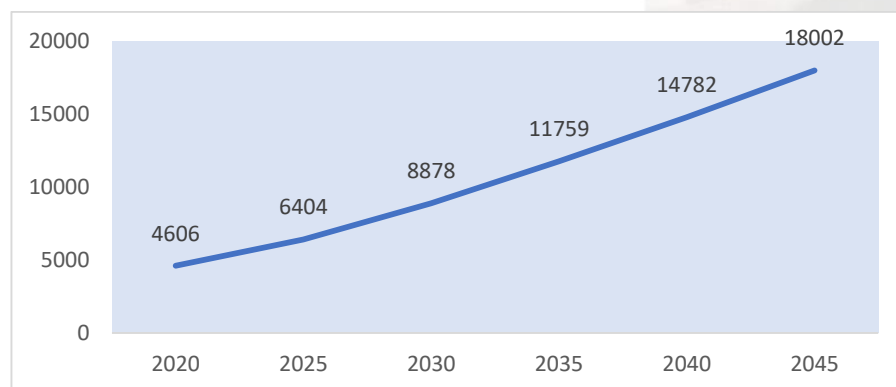
Gambar 2. 30 Proyeksi Penduduk Mamuju Tengah Kelompok Umur 15-64 Tahun, 2020-2045



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Penduduk yang berumur 65 tahun ke atas meningkat dengan cepat dari tahun 2020 hingga tahun 2035. Berdasarkan hasil perhitungan proyeksi, terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah umur 65 tahun ke atas pada tahun 2020 hingga 2035, dimana terdapat 4.606 orang pada tahun 2020 menjadi 11.759 orang di tahun 2035. Proporsi penduduk 65 tahun ke atas sebesar 3,42 persen dari total penduduk di tahun 2020 meningkat menjadi 6,77 persen di tahun 2035.

Gambar 2. 31 Proyeksi Penduduk Mamuju Tengah Kelompok Umur 65 Tahun ke atas, 2020-2035



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2023

Rasio ketergantungan atau rasio beban tanggungan (*dependency ratio*) adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk di bawah 15 tahun dan penduduk di atas 65 tahun) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun).

Semakin tinggi presentase rasio ketergantungan mengindikasikan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk usia produktif untuk membiayai penduduk usia belum produktif dan tidak produktif lagi.

Dari tabel 2.70 dapat dilihat rasio ketergantungan penduduk Mamuju Tengah terus meningkat dari tahun 2020-2035. Proyeksi rasio ketergantungan penduduk tahun 2025 sebesar 49,06. Rasio ketergantungan ini meningkat di tahun 2030 menjadi 51,38 dan 52,78 di tahun 2035. Artinya, di tahun 2035 terdapat 52 penduduk usia nonproduktif untuk setiap 100 penduduk usia produktif.

2.6.2 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana 2025-2045

Analisis proyeksi kebutuhan sarana dan prasarana per lima tahun sampai dengan tahun 2045 berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) dari kementerian/ lembaga (K/L) terkait. Kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan publik dimaksud meliputi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/ listrik, persampahan, kesehatan, pendidikan dan lainnya.

Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi jumlah penduduk dan proyeksi penduduk berdasarkan kelompok umur, maka kebutuhan sarana dan prasarana dapat diproyeksi untuk tahun 2025 sampai dengan 2045.

a. Proyeksi Kebutuhan Rumah dan Permukiman

Dari hasil analisis proyeksi jumlah KK (rumah tangga), maka kebutuhan rumah pada tahun-tahun proyeksi dapat diperkirakan pula. Sebelum memperkirakan kebutuhan rumah pada tahun proyeksi, maka perlu diketahui terlebih dahulu kebutuhan rumah yang harus dipenuhi akibat pertumbuhan penduduk Kabupaten Mamuju Tengah. Kebutuhan rumah akibat pertumbuhan penduduk dapat dihitung dengan cara menghitung selisih antara jumlah KK eksisting dengan jumlah bangunan eksisting. Sedangkan untuk mendapatkan jumlah kebutuhan rumah tahun proyeksi akibat pertumbuhan penduduk tahun proyeksi maka di jumlahkan KK proyeksi dengan jumlah kebutuhan rumah eksisting (backlog).

Setelah diketahui kebutuhan rumah pada tahun proyeksi, maka dapat ditentukan pula perkiraan kebutuhan lahan untuk permukiman pada tahun-tahun proyeksi. Adapun untuk menghitung luas lahan permukiman dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Setelah diketahuinya kebutuhan unit rumah, kemudiandi konversikan kedalam luasan lahan permukiman dengan menggunakan proporsi : 1 kavling besar (500 m²) : 2 kavling sedang (300 m²) : 3 kavling kecil (150m²). Perhitungan tersebut di dasari oleh pola pembangunan perumahan di Indonesia yang menggunakan rumus 1 : 3 : 6 untuk setiap ukuran kavling perumahan, serta ukuran standar kavling rumah hunian di Indonesia.

Asumsi - asumsi tersebut menjadi landasan dalam menghitung kebutuhan-kebutuhan perencanaan yang berkaitan dengan penyediaan perumahan dan permukiman, serta berbagai sarana dan prasarana pendukungnya. Analisis yang telah dilakukan untuk pemenuhan perumahan bagi penduduk di Kabupaten Mamuju Tengah khususnya untuk pengembangan kawasan

permukiman baru akan di lakukan melalui pendekatan yaitu perumahan swadaya, dan perumahan bagi pengembang/pemerintah. Perumahan swadaya lebih diutamakan di kembangkan pada kawasan-kawasan permukiman lama (eksisting). Sedangkan perumahan developer/pemerintah akan di kembangkan di wilayah dari tiap kecamatan yang memiliki lahan yang luas dan masih sesuai dengan peruntukan lahan untuk permukiman dengan pola penyediaan perumahan skala besar (KASIBA) akan di distribusikan pada kawasan-kawasan di pusat kota dengan demand rumah tinggi atau pada kawasan-kawasan yang di remajakan/ direvitalisasi. Yang perlu di perhatikan selanjutnya adalah pola alokasi ruang bagi pembangunan perumahan, karena setiap pembangunan fisik akan di ikuti dampak perkembangan fisik lainnya yang dapat mengubah struktur pemanfaatan lahan yang sudah di tata sebelumnya.

Tabel 2. 57 Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Rumah/ Tempat Tinggal (Unit)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877
Proyeksi Kebutuhan Rumah (unit)	31104	32171	34819	37337	39642	41788
Proyeksi kebutuhan lahan (ha)	394	407	441	473	502	529

Sumber: Dinas Perumahan dan Permukiman Mamuju Tengah, 2024

- b. **Proyeksi Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pengelolaan Sumberdaya Air**
Perhitungan kebutuhan air minum didasarkan pada jumlah penduduk, jumlah dan jenis kegiatan perkotaan yang memerlukan air, dan standar pemakaian air. Kebutuhan air terdiri dari domestik dan non domestik, Kebutuhan domestik adalah kebutuhan yang berdasarkan jumlah penduduk dan pemakaian air per orang. Kebutuhan non domestik adalah kebutuhan air untuk kegiatan penunjang kota, yang terdiri dari kegiatan komersial yang berupa industri, perkantoran, dan lain-lain, maupun kegiatan sosial seperti sekolah, rumah sakit dan tempat ibadah.

Dalam menganalisis kebutuhan air bersih di Kabupaten Mamuju Tengah dengan menggunakan kriteria perencanaan Ditjen Cipta Karya tahun 2000 dengan mengelompokkan Kebutuhan Air Bersih Penyediaan air bersih untuk kebutuhan penduduk hingga akhir tahun 2045 dengan memperhatikan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan. Sumber air baku sebagai potensi untuk digunakan antara lain Menggunakan potensi :sumber air, sumur bor/tanah, Menggunakan sungai sebagai sumber air, diolah dalam bak penampungan

Adapun standar kebutuhan air bersih yang mengacu pada Kriteria Perencanaan Ditjen Cipta Karya PU, 1996 yang menjadi pedoman estimasi kebutuhan di Kabupaten Mamuju Tengah merencanakan sistem jaringan air bersih untuk memenuhi kebutuhan air bersih perhari. Oleh sebab itu, maka perlu ada asumsi yang digunakan meliputi; Kebutuhan air kota Mamuju Tengah adalah 60 liter/orang/hari.

Berikut besar proyeksi kebutuhan air minum kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 58 Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	8547300	8867280	9661740	10417260	11108820	11752620

Sumber: Dinas PU Mamuju Tengah, 2024

c. **Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana Energi dan Listrik**

Proyeksi kebutuhan listrik satu kabupaten adalah suatu usaha untuk memperkirakan seberapa besar kebutuhan daya listrik yang diperlukan oleh seluruh aktivitas dan kebutuhan energi di suatu wilayah kabupaten dalam jangka waktu tertentu di masa depan. Proyeksi ini penting sebagai panduan untuk perencanaan dan pengembangan infrastruktur energi, membantu pemerintah dan badan usaha energi dalam memastikan ketersediaan daya listrik yang memadai sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan wilayah.

Pemenuhan kebutuhan listrik dilaksanakan oleh unit-unit pembangkit listrik untuk melayani kebutuhan akan penerangan. Dengan demikian akan memerlukan peningkatan daya listrik dan kapasitas pembangkit. Kebutuhan akan daya listrik dimanfaatkan untuk mendistribusikan kebutuhan penerangan perumahan, penerangan jalan dan kegiatan aktivitas lainnya, standar yang digunakan untuk estimasi kebutuhan listrik di Kabupaten Mamuju tengah dihitung berdasarkan berdasarkan konsumsi listrik per kapita Indonesia pada 2022 mencapai 1.173 kWh/kapita.

Tabel 2. 59 Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Listrik				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877

Jumlah Rumah						
Proyeksi Kebutuhan Listrik	167099715	173355324	188887017	203657433	217177431	229763721

d. **Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan**

Pengelolaan sampah bukan suatu hal yang mudah, oleh karena itu perlu adanya penanganan khusus dan penyediaan fasilitas penunjang dalam pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah merupakan upaya-upaya untuk mencegah dan mengendalikan dampak negatif yang diakibatkan dari masalah sampah. Seiringbertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh pada peningkatan permukiman dan aktivitas masyarakat di dalamnya. Kualitas lingkungan permukiman dapat ditentukan oleh optimalisasi fungsi prasarana lingkungannya. salah satunya dari prasarana lingkungan yang sangat diperlukan adalah prasarana persampahan (Andrianto dan Damayant).

Kabupaten Mamuju Tengah merupakan salah satu wilayah yang mengalami perkembangan penduduk saat ini dengan jumlah penduduk sebanyak 140.028 jiwa (2022) yang terus bertambah pesat setiap tahunnya dan wilayah Kabupaten Mamuju juga sebagai kawasan perkebunan industri. Di sisi lain dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk yang mempengaruhi kuantitas dan kualitas sampah yang menghasilkan serta mempengaruhi timbulan sampah tersebut.

Sampah, baik kuantitas maupun kualitasnya sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya sampah, antara lain: jumlah penduduk, keadaan sosial ekonomi, dan kemajuan teknologi. Berdasarkan SNI 19-3983-1995 terkait spesifikasi timbulan sampah untuk kota kecil dan kota sedang di Indonesia:

- Kota sedang : 2,75 – 3,25 liter/orang/hari
- Kota kecil : 2,5 – 2,75 liter/orang/hari

Adapun acuan lain yang digunakan dalam analisis ini ialah SNI 03-1733-2002 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan klasifikasi kota sedang sehingga volume timbulan sampah per orang satu hari yaitu 2,75-3,25 liter dan standar berat timbulan sampah per Kg dalam sehari yaitu 0,80.

Berikut besar proyeksi kebutuhan Sarana prasarana persampahan kabupaten Mamuju Tengah:

Tabel 2. 60 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Timbunan Sampah				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877
Proyeksi Timbunan Sampah (L/org/Hari)	391751	406417	442830	477458	509154	538662
Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana (Unit)						
TPA	1	1	1	2	2	3
TPS	2	5	6	8	10	11
Truck	2	4	5	6	7	8
Pick up	5	5	6	6	7	8
Roda 3	3	4	4	4	6	6
Dozer	1	1	1	2	2	2

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Mamuju Tengah, 2024

e. **Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan**

Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Mamuju Tengah dari tahun 2020 hingga 2035, dengan asumsi pertumbuhan penduduk yang berkelanjutan, perlu dirancang proaktif kebijakan infrastruktur kesehatan. Pada bulan Juni 2020, jumlah penduduk mencapai 134.556 orang, dan diharapkan akan terus meningkat menjadi 147.788 pada tahun 2025, 161.029 pada tahun 2030, dan 173.621 pada tahun 2035.

Pertumbuhan ini membutuhkan peningkatan kapasitas sarana dan prasarana kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah. Oleh karena itu, proyeksi ini menunjukkan perlunya pengembangan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik di berbagai wilayah untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang memadai.

Selain itu, perlu diperhatikan kepadatan penduduk dalam perhitungan kebutuhan infrastruktur kesehatan. Dengan luas wilayah sekitar 3.100,87 Km², perencanaan infrastruktur harus mencakup area yang luas dan mungkin

terpencar. Kepadatan penduduk perlu menjadi pertimbangan utama dalam menentukan lokasi strategis untuk pembangunan fasilitas kesehatan, sehingga pelayanan dapat merata dan efektif.

Sementara proyeksi jumlah penduduk pada tahun 2025 mencapai 147.788 orang, perlu dipertimbangkan juga untuk meningkatkan daya dukung fasilitas kesehatan yang sudah ada, serta memperkuat sistem distribusi obat dan peralatan medis. Ini akan memastikan bahwa pertumbuhan penduduk tidak hanya diimbangi dengan peningkatan fisik bangunan, tetapi juga dengan peningkatan kapasitas dan efisiensi layanan kesehatan.

Dalam keseluruhan proyeksi kebutuhan infrastruktur kesehatan ini, implementasi program *Rural Urban Projection* (RUP) perlu menjadi pedoman, sehingga pembangunan kesehatan dapat sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, juga untuk memastikan bahwa pembangunan kesehatan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat setempat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat lokal juga penting untuk mencapai tujuan ini.

Adapun kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan untuk Kabupaten Mamuju Tengah antara lain :

1. Rumah Sakit Umum
 - a. Pembangunan rumah sakit umum dengan fasilitas yang memadai, termasuk unit gawat darurat, ruang operasi, dan unit perawatan intensif.
 - b. Peningkatan kapasitas rumah sakit yang sudah ada agar dapat menangani peningkatan jumlah pasien.
2. Puskesmas
 - a. Pendirian puskesmas di berbagai wilayah untuk memastikan akses pelayanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat.
 - b. Penguatan fasilitas puskesmas yang sudah ada dengan peningkatan peralatan medis dan tenaga kesehatan.
3. Klinik Kesehatan
 - a. Pendirian klinik kesehatan di daerah yang mungkin sulit dijangkau oleh fasilitas kesehatan utama.
 - b. Peningkatan kualitas klinik kesehatan yang sudah ada.
4. Tenaga Kesehatan
 - a. Pelatihan dan perekrutan tenaga kesehatan, termasuk dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan layanan kesehatan yang meningkat.
 - b. Peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan lokal.
5. Sistem Informasi Kesehatan
 - a. Pengembangan sistem informasi kesehatan yang terintegrasi untuk memantau dan mengelola data pasien, persediaan obat, dan kebutuhan kesehatan lainnya.
 - b. Penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan kesehatan.
6. Distribusi Obat dan Peralatan Medis

- a. Peningkatan infrastruktur distribusi obat dan peralatan medis untuk memastikan pasokan yang memadai ke seluruh fasilitas kesehatan.
- b. Pengembangan sistem distribusi yang efisien dan dapat diandalkan.
7. Aksesibilitas
 - a. Peningkatan infrastruktur transportasi untuk memudahkan aksesibilitas ke fasilitas kesehatan, terutama di daerah yang terpencil.
 - b. Pengembangan jaringan jalan dan sarana transportasi lainnya.
8. Pencegahan dan Promosi Kesehatan
 - a. Program pencegahan penyakit dan promosi kesehatan aktif, termasuk kampanye vaksinasi, edukasi kesehatan, dan pemeriksaan rutin.
 - b. Pembangunan fasilitas olahraga dan rekreasi untuk mendukung gaya hidup sehat.

Untuk kebutuhan sarana kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah melalui Dinas Kesehatan dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Puskesmas
 - ✓ Lokasi Strategis: Pemilihan lokasi puskesmas harus mempertimbangkan proyeksi pertumbuhan penduduk di wilayah-wilayah tertentu. Prioritaskan pembangunan puskesmas di daerah yang diperkirakan akan mengalami peningkatan populasi signifikan, sesuai dengan proyeksi tahun 2025 dan seterusnya.
 - ✓ Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Desain puskesmas harus mencakup ruang pemeriksaan umum, ruang persalinan, dan ruang gawat darurat. Peralatan medis yang memadai dan tenaga kesehatan yang memadai harus disediakan untuk melayani jumlah pasien yang diantisipasi.
2. Pustu/Poskesdes
 - ✓ Penyebaran Merata : Pembangunan pustu/poskesdes harus merata di seluruh wilayah Kabupaten Mamuju Tengah, terutama di daerah terpencil yang mungkin sulit dijangkau oleh puskesmas utama.
 - ✓ Fasilitas Dasar : Meskipun dalam skala yang lebih kecil, pustu/poskesdes harus menyediakan fasilitas dasar seperti ruang pemeriksaan, apotek kecil, dan tempat tunggu.
3. Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
 - ✓ Jumlah yang Mencukupi : Dalam mengantisipasi peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang dibutuhkan, perlu dibangun rumah dinas yang cukup untuk menampung dokter, perawat, dan staf kesehatan lainnya.
 - ✓ Lokasi yang Nyaman : Rumah dinas harus ditempatkan di lokasi yang strategis, memudahkan tenaga kesehatan untuk mengakses fasilitas kesehatan tempat mereka bekerja.
4. Gedung Rumah Sakit
 - ✓ Kapasitas yang Diperluas : Dengan pertumbuhan proyeksi penduduk, gedung rumah sakit utama perlu diperluas atau bahkan dibangun kembali untuk meningkatkan kapasitas pelayanan dan fasilitas yang disediakan.

- ✓ Fasilitas Modern : Memastikan gedung rumah sakit dilengkapi dengan fasilitas modern seperti ruang operasi yang memadai, unit perawatan intensif, dan laboratorium diagnostik.
5. Labkesda
- ✓ Peningkatan Kapasitas : Laboratorium kesehatan daerah (Labkesda) perlu ditingkatkan kapasitasnya untuk mengakomodasi meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium seiring pertumbuhan penduduk.
 - ✓ Teknologi Canggih : Investasi dalam peralatan laboratorium canggih untuk mendukung diagnosis dan pemantauan kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

*Tabel 2. 61*Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877
Proyeksi Fasilitas Kesehatan	(unit)					
▪ Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1
▪ Puskesmas	11	13	13	14		
▪ Poskesdes/ Pustu	80	82	86	89		
▪ Pengembangan Gedung PSC	0	1	1	1		
▪ Labkesda	0	1	1	1		

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah, 2024

f. **Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan**

Standar Sarana dan Prasarana pendidikan adalah kriteria minimal sarana dan prasarana yang harus tersedia pada satuan pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Standar Sarana dan Prasarana digunakan sebagai pedoman bagi pemerintah, pemerintah daerah, satuan pendidikan, dan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana satuan pendidikan.

Tabel 2. 62 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan				
		2025	2030	2035	2040	2045

Jumlah Penduduk	142455	147788	161029	173621	185147	195877
Proyeksi Fasilitas Pendidikan	(unit)					
▪ TK	132	134	133	133		
▪ SD/MI	116	116	116	117		
▪ SMP/ MTs	37	38	38	35		

Sumber: Dinas Pendidikan Mamuju Tengah, 2024

2.7. Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pengembangan pusat pertumbuhan wilayah dan indikasi program/ proyek strategis yang dapat mempengaruhi perkembangan daerah berdasarkan RTRW yang berisi arahan rencana tata ruang yang utamanya meliputi struktur ruang, pola ruang dan kawasan-kawasan strategis daerah.

2.7.1 Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Indikasi Program

a. Rencana Pengembangan Sistem Perkotaan

- 1) Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Tobadak (ibukota Mamuju Tengah) sebagai pusat pengembangan Kota Terpadu Mandiri, yang berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor, pusat berbagai kegiatan final manufacturing, pusat berbagai kegiatan tersier agrobisnis dan pusat berbagai pelayanan;
- 2) Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) meliputi Topoyo berfungsi atau berpotensi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, yang berfungsi sebagai kota perdagangan yang berorientasi ekspor, pusat berbagai kegiatan final manufacturing, pusat berbagai kegiatan tersier agrobisnis dan pusat berbagai pelayanan;
- 3) Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi kawasan perkotaan PPK di Babana, Karossa dan Mahahe yang merupakan pusat distrik agropolitan yang berfungsi sebagai pusat perdagangan wilayah, pusat kegiatan agro industri, pusat pelayanan agro industri khusus;
- 4) Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi kawasan permukiman PPL yang merupakan pusat kawasan pertanian dengan fungsi sebagai pusat perdagangan lokal, pusat koleksi komoditas pertanian, pusat penelitian, pusat pelayanan kebutuhan permukiman dan pusat informasi pasar.

a. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi

1) Rencana pengembangan sistem transportasi darat

a) Jaringan lalu lintas angkutan jalan dan jembatan

(1) Jaringan jalan dan jembatan

- Jaringan jalan kolektor primer (K1) di Kabupaten meliputi: Ruas

jalan Karossa – Topoyo, ruang jalan Topoyo – Pangale, ruas jalan Tobadak (Bneteng) – Tobadak VII, ruas jalan Tobadak - VII – Tobadak VIII (Bts. Tommo); dan Ruas jalan Akses Pelabuhan Budong – Budong.

- Jaringan jalan kolektor sekunder (K2) meliputi: Ruas jalan Lingkar (Pangale – Lamba-lamba – Lumu – Kire – Babana – Budong budong – Tumbu – Kabubu – Topoyo).
 - Peningkatan status jalan lokal primer (L1) menjadi jalan kolektor primer (K1) merupakan jalan yang menghubungkan ke ibukota kecamatan ke pelabuhan utama, yaitu: Ruas jalan simpang L1 di Topoyo sampai ke Pelabuhan Tumbu; dan Ruas jalan simpang L1 di Budong-Budong sampai perkotaan Babana dan Pelabuhan Pangajoang di Babana.
 - Peningkatan jalan lingkungan (L2) menjadi jalan lokal primer (L1), meliputi: Jalan L2 Desa Pangale ke Desa Kuo di Kecamatan Pangale, Jalan L2 Desa Budong-Budong ke Desa Pontanakayang Kecamatan Budong- budong, Jalan L2 Desa Mahahe ke Desa Batuparigi di Kecamatan Tobadak; Jalan L2 Desa Mahehe ke Desa Sulobaja di Kecamatan Tobadak, Jalan L2 Desa Karossa Ke Desa Kadaila di Kecamatan Karossa, dan Jalan L2 Desa Karossa ke Desa Benggaulu di Kecamatan Karossa.
 - Rencana pembangunan jembatan penyeberangan sungai, meliputi:
 - Desa Lamba – Lamba Kecamatan Pangale – Desa Lumu Kecamatan Budong-Budong
 - Desa Babana Kecamatan Budong–Budong– Desa Budongbudong Kecamatan Topoyo
 - Desa Sejati Kecamatan Tobadak – Desa Leling Kecamatan Tommo Kabupaten Mamuju;
 - Desa Benggaulu Kecamatan Karossa – Desa Dapurang Kabupaten Mamuju Utara;
 - Desa Lemo – Lemo Kecamatan Pangale – Desa Kalonding Kecamatan Sampaga
 - Desa Batu Parigi Kecamatan Toobadak _ Desa Saluleko Kecamatan Topoyo;
 - Desa Pangalloang Kecamatan Topoyo – Desa Babana (Polohu) Kecamatan. Budong-budong;
 - Desa Kambunong Kecamatan Karossa – Desa Sanjango Kecamatan Karossa;
 - Desa Kambunong Kecamatan Karossa – Desa Kambunong Kecamatan Karossa; dan
 - KTM Tobadak Kecamatan Tobadak – Desa Topoyo Kecamatan Topoyo.
- (1) Jaringan prasarana lalu lintas angkutan jalan
- Terminal penumpang tipe A3 terdapat di Kecamatan Budong – Budong

- Terminal tipe C terdapat di Perkotaan Karossa, Babana, Mahahe, Topoyo, dan Pangale
- (2) Jaringan pelayanan lalu lintas angkutan jalan
- Jaringan lintas angkutan barang, meliputi angkutan barang hasil perkebunan dan pertanian, hasil tambang, peti kemas, dan ekspedisi, meliputi: Polohu – Palu dan Polohu – Makassar
 - Trayek angkutan penumpang, terdiri atas:
 - Angkutan Perdesaan (Angdes) meliputi: Polohu – Karossa, Polohu – Mahahe, Polohu – Babana, Polohu – Pangale dan Polohu – Topoyo
 - Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP), meliputi: Polohu – Mamuju dan Polohu – Pasangkayu di Kabupaten Mamuju Utara.
 - Angkutan Kota Antar Provinsi (AKAP), meliputi: Polohu – Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan, Polohu – Palu di Provinsi Sulawesi Tengah dan Polohu – Sulawesi Utara
- a) Jaringan sungai dan penyeberangan.
- (1) Alur pelayaran sungai yaitu Seko – Batu Parigi – Topoyo – Babana
 - (2) Penyeberangan Desa Pangale Kecamatan Pangale – Desa Sampaga Kecamatan Sampaga
 - (3) Penyeberangan Desa Batuparigi Kecamatan Tobadak – Desa Salulebo Kecamatan Topoyo
 - (4) Penyeberangan Desa Budong-Budong Kecamatan Topoyo – Desa Babana Kecamatan Budong-Budong.
- b) Jaringan jalan bebas hambatan
- 2) Rencana pengembangan sistem rel kereta api
- a) Jaringan jalur kereta api merupakan jaringan jalur kereta api umum antar kota yang meliputi Jaringan Jalur Kereta Api Lintas Barat Pulau Sulawesi Bagian Barat yang menghubungkan perbatasan Kabupaten Mamuju – Pangale – Budong-Budong - Tobadak – Topoyo – Karossa - Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara.
 - b) Stasiun kereta api ditetapkan di Kecamatan Tobadak dalam rangka memberikan pelayanan kepada pengguna transportasi kereta api melalui persambungan pelayanan dengan moda transportasi lainnya.
 - c) Fasilitas operasi kereta api diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 3) Rencana pengembangan sistem transportasi laut

- a) Tatanan kepelabuhanan, terdiri atas:
 - (1) Pelabuhan Pengumpulan Regional di Desa Babana Kecamatan Budong-Budong;
 - (2) Pelabuhan Khusus Desa Tumbu dan Desa Budong-budong di Kecamatan Topoyo, Desa Tasokko di Kecamatan Karossa; dan
 - (3) Dermaga penyeberangan dari pelabuhan nelayan di Pulau Kambunong ke Desa Kambunong Kecamatan Karossa.
 - b) Alur pelayaran, terdiri atas:
 - (1) Alur Makasar – Pare-pare – Mamuju – Mamuju Tengah – Palu – Toli-toli – Bitung;
 - (2) Mamuju Tengah – Balikpapan/Samarinda;
 - (3) Mamuju Tengah – Mamuju Utara – Donggala/Palu;
 - (4) Mamuju Tengah – Mamuju – Makassar; dan
 - (5) Mamuju Tengah – Mamuju – Balikpapan/Samarinda.
 - 4) Rencana pengembangan sistem transportasi udara
 - a) Tatanan kebandarudaraan meliputi Bandar Udara Pengumpulan di Kecamatan Pangale
 - b) Jalur penerbangan meliputi alur penerbangan nasional, penetapan kawasan keselamatan operasional penerbangan akan diatur oleh menteri perhubungan dan lebih lanjut diatur oleh peraturan bupati
- b. Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- 1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi
 - a) Pembangkit tenaga listrik
 - (1) Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) terdapat di Batumakodo Kecamatan Budong-Budong, Salu Lisu Kecamatan Tobadak dan Kurao Balu Kecamatan Karossa;
 - (2) Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) terdapat di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo dan Desa Babana Kecamatan Budong-Budong;
 - (3) Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) terdapat di Kecamatan Tobadak, Kecamatan Topoyo dan Kecamatan Karossa;
 - (4) Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dikembangkan di daerah-daerah terpencil khususnya di wilayah pegunungan;
 - (5) Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dikembangkan di daerah-daerah potensial; dan
 - (6) Pembangkit Listrik Energi Baru Terbarukan dikembangkan di daerah-daerah potensial.

- b) Jaringan prasarana energi
 - (1) Jaringan transmisi tegangan ekstra tinggi (SUTET) terdapat di Kecamatan Tobadak, Kecamatan Pangale, Kecamatan Topoyo,
 - (2) Kecamatan Budong – Budong dan Kecamatan Karossa; dan
 - (3) Gardu Induk di Kecamatan Tobadak dan/ Kecamatan Budong- budong.
- 2) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi
 - a) Sistem jaringan kabel, terdiri atas:
 - (1) Jaringan mikro digital meliputi Ibukota Kabupaten Mamuju Tengah – Topoyo – Pasangkayu;
 - (2) Stasiun Telepon Otomat (STO), yaitu STO Tobadak; dan
 - (3) Rencana pengembangan sistem jaringan kabel dengan mengikuti pola jaringan jalan.
 - b) Sistem jaringan nirkabel berupa pengembangan Base Transceiver Sistem (BTS) dengan sistem pengelolaan menara telekomunikasi bersama yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten.
- 3) Rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air
 - a) Wilayah Sungai (WS) meliputi WS Lintas Provinsi Kalukku – Karama yaitu mencakup DAS Karossa, DAS Benggaulu, DAS Budong-Budong, DAS Panggajoang, DAS Kamansi, DAS Lumu, dan DAS Karama
 - b) Daerah Irigasi (DI), terdiri atas:
 - (1) DI Kewenangan Pemerintah Pusat, yaitu DI Masabo;
 - (2) DI Kewenangan Pemerintah Provinsi, yaitu DI Permukaan Tobadak;
 - (3) DI Kewenangan Pemerintah Kabupaten, terdiri atas:
 - DI Permukaan Hopo
 - DI Permukaan Salubiro
 - DI Permukaan Muhajir
 - DI Permukaan Kuo
 - DI Permukaan Pololereng
 - DI Permukaan Polocamba
 - DI Permukaan Sartanamaju
 - DI Permukaan Pangale
 - DI Permukaan Polopangale
 - DI Permukaan Salumanurung
 - DI Permukaan Sikeang Kire

- DI Permukaan Tinali
- DI Permukaan Pontanakayang
- DI Permukaan Babana
- DI Permukaan Tasantung
- DI Permukaan Mahahe
- DI Permukaan Polongaan
- DI Permukaan Batuparigi
- DI Permukaan Bambadaru
- DI Permukaan Sulobaja
- DI Permukaan Salobadak
- DI Permukaan Tabolang
- DI Permukaan Paraili
- DI Permukaan Tumbu
- DI Permukaan Patulana
- DI Permukaan Sanjango
- DI Permukaan Lesang
- DI Permukaan Lara
- DI Permukaan Salubarana
- DI Permukaan Tomemba
- DI Permukaan Salubijau
- DI Permukaan Manisi

c) Bendung dan Bendungan, terdiri atas:

- (1) Bendung Pangale di Kecamatan Pangale;
- (2) Bendung Karama di Kecamatan Pangale;
- (3) Bendung Budong-Budong di Kecamatan Tobadak;
- (4) Bendung Karossa di Kecamatan Karossa;
- (5) Bendungan Budong-Budong di Kecamatan Tobadak; dan
- (6) Bendungan Karossa di Kecamatan Karossa.

d) Sistem Prasarana air baku untuk air minum

- (1) Rencana pengembangan sumber air baku, meliputi:
 - Embung dan bendung di wilayah Kabupaten
 - Sungai Budong-Budong, Sungai Karama, dan Sungai Benggaulu
 - Mata air yang ada di seluruh wilayah Kecamatan
- (2) Prasarana air minum meliputi intake air baku, jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku, dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat permukiman di sekitar wilayah ibukota kecamatan.

e) Sistem pengendalian banjir

- (1) Pengoptimalan jaringan drainase primer di seluruh sungai besar dan anak sungainya
- (2) Pengoptimalann jaringan drainase sekunder berupa

jaringan drainase buatan di seluruh wilayah kecamatan

- (3) Pembuatan pengendalian banjir terdiri dari:
 - Pembuatan pengendalian banjir sungai Karossa
 - Pembuatan Pengendalian banjir sungai Budong–Budong
 - Pembuatan Pengendalian banjir sungai Salubiro
 - Pembuatan Pengendalian banjir sungai Salulebbo
 - Pembuatan Pengendalian banjir sungai Barakkang
 - Pembuatan Pengendalian banjir sungai Karama
- (4) Penyesuaian dimensi saluran (normalisasi saluran) dengan luas area tangkapan;
- (5) Pembuatan bendali (bendungan pengendali) pada alur anak-anak sungai untuk mengatur debit yang masuk ke sungai utama;
- (6) Rencana pengembangan kawasan permukiman di wilayah rawan banjir dilengkapi dengan kolam retensi dengan sistem pompa;
- (7) Rehabilitasi dan pemeliharaan bantaran dan tanggul sungai.

f) Sistem pengendalian erosi/longsor, meliputi:

- (1) Melakukan penghijauan dan/atau penanaman vegetasi yang mampu menahan erosi pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam, dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 (dua puluh lima) persen hingga lebih dari 40 (empat puluh) persen;
- (2) Melakukan rekayasa teknik berupa pembuatan tanggul, turap, talud, dan bronjong serta saluran pembuang pada lahan-lahan berlereng dengan kategori agak curam, curam, dan sangat curam yang memiliki kemiringan mulai 25 (dua puluh lima) persen hingga lebih dari 40 (empat puluh) persen;
- (3) Melakukan pembangunan konstruksi penahan (tanggul) sebagai pengaman pada lokasi-lokasi yang diindikasikan memiliki kerawanan terjadinya erosi dan longsor; dan
- (4) Melakukan pelandaian atau penyesuaian tingkat kecuraman lereng pada lokasi-lokasi yang dimungkinkan.

g) Sistem pengamanan pantai, meliputi:

- (1) Melakukan reboisasi atau penanaman kembali tanaman bakau pada kawasan hutan bakau (mangrove) yang telah mengalami penggundulan;
- (2) Melakukan pembangunan konstruksi pemecah

- ombak pada lokasi-lokasi dengan gelombang air laut yang relatif besar;
- (3) Melakukan rekayasa teknik berupa pembangunan tembok penyokong (talud) pada lokasi-lokasi yang dinilai memiliki kerawanan terhadap abrasi dan tsunami.
- 4) Rencana pengembangan sistem jaringan pengelolaan lingkungan
- a) Sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
 - (1) Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tabolang dengan sistem sanitary landfill seluas 4 (empat) hektar di Dusun Puncak Indah diarahkan untuk melayani wilayah perkotaan;
 - (2) Tempat Pemrosesan Sementara (TPS) di wilayah-wilayah permukiman dan perkotaan; dan
 - (3) Pengolahan sampah dilakukan dengan mengembangkan sistem 3R (reduce, reuse dan recycle) dengan paradigma sampah sebagai bahan baku industri menggunakan teknik pengolahan modern di perkotaan dan teknik pengolahan konvensional di perdesaan yang menghasilkan kompos maupun bahan baku setengah jadi.
 - b) Sistem jaringan air limbah
 - (1) Sistem jaringan air limbah industri, terdiri atas:
 - Sistem perpipaan air limbah di kawasan industri diarahkan ke instalasi pengolahan air limbah
 - Penempatan lokasi IPAL tidak jauh dari kawasan-kawasan industri agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah
 - (2) Sistem jaringan air limbah dari tambang, terdiri atas
 - Sistem perpipaan air limbah di kawasan pertambangan diarahkan ke instalasi pengolahan air limbah
 - Penempatan lokasi IPAL tidak jauh dari kawasan-kawasan pertambangan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem pengelolaan limbah
 - (3) Sistem jaringan air limbah domestik, terdiri atas:
 - Sistem pengolahan on site, yaitu berupa Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang melayani kawasan perkotaan Topoyo-Tobadak dan sekitarnya
 - Sistem on site, yaitu berupa tangki septik di Kawasan-kawasan permukiman

(4) Sistem pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), terdiri atas:

- Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Industri yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) pada Rumah Sakit yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pengembangan Pengolahan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) lainnya yang menghasilkan B3 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

c) Sistem jaringan air minum

(1) Sistem perpipaan, terdiri atas:

- Pengembangan sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya pada kawasan perkotaan ibu kota kecamatan, terdiri atas:
 - SPAM IKK Tobadak terdapat di Kecamatan Tobadak;
 - SPAM IKK Karossa terdapat di Kecamatan Karossa;
 - SPAM IKK Tabolang terdapat di Kecamatan Topoyo;
 - SPAM IKK Pangale terdapat di Kecamatan Pangale;
 - SPAM IKK Babana terdapat di kecamatan Budong– Budong.
- Pengembangan sistem jaringan berdasarkan hirarki (primer- sekunder-tercier) dan tetap memperhatikan kondisi topografi pada jalur-jalur yang akan dilalui dengan mengikuti pola jaringan jalan dan peletakan bangunan.

(2) Sistem non perpipaan, terdiri atas:

- Sumur bor/tanah baik sumur dangkal maupun sumur dalam;
- Hidran umum.

(3) Untuk jaringan perpipaan di kecamatan dilakukan secara bertahap selanjutnya akan diatur oleh peraturan bupati.

d) Sistem jaringan drainase

(1) Drainase primer, meliputi sungai-sungai besar dan

kanal yang bermuara ke laut;

- Drainase sekunder, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan sebagai pengumpul dari drainase tersier;
- Drainase tersier, yaitu berupa saluran-saluran buatan yang dikembangkan di kawasan perkotaan dengan pola mengikuti jaringan jalan.

e) Jalur evakuasi bencana, terdiri atas:

- (1) Jalur evakuasi bencana banjir yang dikembangkan pada kawasan- kawasan rawan banjir di Kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Karossa, Kecamatan Tobadak, dan Kecamatan Pangale yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - (2) Jalur evakuasi bencana longsor yang dikembangkan pada kawasan-kawasan rawan longsor Kecamatan Karossa yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang mengarahkan evakuasi menjauhi lokasi bencana ke arah lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih datar;
 - (3) Jalur evakuasi dan gelombang pasang dan bencana tsunami yang dikembangkan pada kawasan-kawasan pesisir rawan tsunami dan ombak besar terutama di Kecamatan Karossa, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Budong-Budong dan Kecamatan Pangale yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan dan jalur pejalan kaki yang bersifat tegak lurus menjauhi dari garis pantai mengarah pada lokasi dan/atau bangunan evakuasi yang telah ditentukan pada lokasi yang lebih tinggi;
 - (4) Jalur evakuasi bencana gempa bumi yang dikembangkan pada kawasan-kawasan perkotaan rawan gempa bumi, yaitu dengan memanfaatkan jaringan jalan menuju ruang-ruang terbuka di kawasan perkotaan terutama Kecamatan Pangale, Kecamatan Budong-Budong, Kecamatan Topoyo, Kecamatan Karossa, dan Kecamatan Tobadak.
- f) Sistem prasarana lainnya merupakan system proteksi kebakaran yang terdiri atas penyediaan hidran umum di kawasan-kawasan perkotaan.

Upaya perwujudan rencana struktur dan pola ruang kabupaten, khususnya di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah tertuang dalam indikasi program yang menjadi bagian dari dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Setelah lima tahun pelaksanaannya, terdapat beberapa dinamika pembangunan yang terjadi dan mempengaruhi pemanfaatan ruang.

Adapun hasil penilaian realisasi program pemanfaatan ruang adalah sebagai berikut.

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH SECARA MERATA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA								
A	Peningkatan pelayanan dan jaringan prasarana yang menjangkau seluruh pusat kegiatan dan juga mengembangkan prasarana dasar di kawasan permukiman							
A1	Menetapkan sistem perkotaan yang berfungsi sebagai pusat pelayanan skala kabupaten (PKL dan PKLp), maupun pusat pelayanan skala kawasan (PPK) dan pusat pelayanan skala lingkungan (PPL)							
a	Program Perencanaan Tata Ruang di Perkotaan PKL dan PKLp							
1	Penyusunan RDTR pada kota-kota PKL dan PKLp	2 Dokumen		Tidak sesuai	Dokumen PKL Tobadak sudah terealisasi	Dokumen PKLp Topoyo belum terealisasikan		
2	Penyusunan RTBL kawasan pusat pemerintahan Kabupaten Mamuju Tengah di KTM Tobadak	1 Dokumen		Tidak sesuai		(sudah ada dokumen masterplan kawasan pemerintahan Mateng)		
3	Penyusunan RTBL kawasan perdagangan Kabupaten Mamuju Tengah di Topoyo	1 Dokumen		Tidak sesuai		(sudah ada dokumen masterplan kawasan pemerintahan Mateng)		

b	Program Perencanaan Tata Ruang di Perkotaan PPK						
1	Penyusunan RDTR perkotaan Karossa	1 Dokumen		Tidak sesuai		Belum terealisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran			Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
			Sesuai	Tidak Sesuai				
2	Penyusunan RDTR perkotaan Mahahe	1 Dokumen		Tidak sesuai		Belum terealisasi		
3	Penyusunan RDTR perkotaan Babana	1 Dokumen		Tidak sesuai		Belum terealisasi		
4	Penyusunan RDTR perkotaan Pangale	1 Dokumen		Tidak sesuai		Belum terealisasi		
c	Program pengembangan Fasilitas perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum							
1	Pembangunan Fasilitas perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum skala Kabupaten	2 Unit	Sesuai		Terealisasi 93,59%			

2	Pembangunan dan peningkatan Fasilitas perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum skala Kecamatan	5 Unit					Tidak ada keterangan realisasi	
A2	Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana dan sarana wilayah, meliputi jaringan prasarana transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air							
a	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan				Terealisasi 90.65 %		Terealisasi pembangunan jalan baru	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Realisasi Rencana		Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih			
			Sesuai	Tidak Sesuai					
	kolektor primer Provinsi								
1	Peningkatan fungsi jalan lokal (L1) menjadi jalan kolektor primer (K1) dari Topoyo – Pelabuhan Tumbu	7 Km							

2	Peningkatan fungsi jalan lokal (L1) menjadi jalan kolektor primer (K1) dari Jalan K1 Tobadak menuju Kota Mahahe	10 Km						
3	Peningkatan fungsi jalan lokal (L1) menjadi jalan kolektor primer (K1) dari Jalan K1 Budong-Budong menuju Kota Babana sampai Pelabuhan Pangajoang di Babana	6,5 Km						
b	Program Pembangunan Jalan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional	
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi			Belum Terealisasi/ Selisih
	dan Jembatan Lokal primer Kabupaten							

1	Perkerasan dan peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan lokal primer dari Jalan K1 Pangale ke Desa Kuo di Kecamatan Pangale	3,7 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
2	Perkerasan dan peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan lokal primer dari Jalan K1 Budong-Budong ke Desa Pontanakayang Kecamatan Budong- budong	4 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
3	Jalan dari Mahahe – Desa Batuparigi di Kecamatan Tobadak	7 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
4	Perkerasan dan peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan lokal primer dari Jalan dari Mahehe ke Sulobaja	5 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran			Realisasi Rencana	Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana				

			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	di Kecamatan Tobadak							
5	Perkerasan dan peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan lokal primer dari Jalan K1 Karossa Ke Desa Kadaila di Kecamatan Karossa	6 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
6	Perkerasan dan peningkatan fungsi jalan lokal menjadi jalan lokal primer dari Jalan K1 Karossa ke Desa Banggaulu di Kecamatan Karossa	7 Km		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
c	Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan		Sesuai		Terealisasi 89.48 %		Terealisasi pada peningkatan kualifikasi jalan	
1	Peningkatan Jalan dan Jembatan trans Sulawesi yang melalui Kabupaten Mamuju Tengah		Sesuai		Terealisasi 89.48 %			
d	Program pengembangan sarana transportasi Darat							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
1	Pengoperasian dan pemeliharaan terminal Type A3 di KTM Tobadak	5 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	Pembangunan terminal type C di Ibu Kota Kecamatan Di Mahahe	2 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	Pembangunan terminal type C di Ibu Kota Kecamatan Di Karossa	2 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
4	Pembangunan terminal type C di Ibu Kota Kecamatan Di Pangale	2 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
5	Pembangunan terminal type C di Ibu Kota Kecamatan Di Babana	2 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Terdapat keterangan realisasi dengan persentase 0%	
6	Pembangunan Jembatan Timbang di Karossa	1 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
7	Pembangunan unit pengujian kendaraan bermotor di Topoyo	5000 M ²		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

e	Program pengembangan				Terealisasi		Penyediaan Angkutan Umum	
---	----------------------	--	--	--	-------------	--	--------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih		
	angkutan Antar kota Antar Provinsi (AKAP)						untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
1	Pengembangan angkutan AKAP Tobadak - Makassar						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
2	Pengembangan angkutan AKAP Tobadak - Palu						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
f	Program pengembangan angkutan Antar kota Dalam Provinsi (AKDP)				Terealisasi		Tidak terdapat persentase	
1	Pengembangan angkutan AKDP Tobadak - Mamuju						Tidak dapat penjabaran secara rinci	

2	Pengembangan angkutan AKDP Tobadak - Pasangkayu Mamuju Utara						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
g	Program pengembangan				Terealisasi		Tidak terdapat persentase	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	Angkutan Perdesaan (Angdes)							
1	Pengembangan angkutan perdesaan Tobadak - Karossa						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
2	Pengembangan angkutan perdesaan Tobadak - Mahahe						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
3	Pengembangan angkutan perdesaan Tobadak - Babana						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
4	Pengembangan angkutan perdesaan Tobadak - Pangale						Tidak dapat penjabaran secara rinci	

h	Program Pengembangan angkutan rel / Kereta Api			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Pembangunan jalur KA lintas barat Sulawesi dari Majene - Mamuju Utara			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
2	Pembangunan stasiun Kad di Topoyo	5000 M ²						
i	Program Pengembangan angkutan sungai dan penyeberangan				Terealisasi 100%		Pembangunan dan Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
							Pelabuhan Sungai dan Danau	
1	Pembangunan Dermaga angkutan sugai di Babana	1 Ha					Tidak dapat penjabaran secara rinci	
2	Pembangunan Dermaga penyeberangan di Pulau Kambunong	1 Ha					Tidak dapat penjabaran secara rinci	
3	Pengembangan angkutan sungai di Babana						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
4	Pengembangan angkutan penyeberangan ke Pulau Kambunong						Tidak dapat penjabaran secara rinci	
j	Program Pengembangan angkutan laut			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Operasionalisasi dan pemeliharaan Pelabuhan Pangajoang di Babana	5 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	

2	Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Karondang	3 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
---	---	------	--	--------------	--	-------------------	--------------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
3	Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Tasokko	3 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
4	Pembangunan dan peningkatan Pelabuhan Tumbu	3 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
k	Program Pengembangan Angkutan Darat			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Pembangunan Bandar Udara Pengumpun	50 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
l	Program pengembangan energi listrik			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Pembangunan PLTD di Kecamatan Tobadak	500 KK		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
2	Pembangunan PLTD di Kecamatan karossa	500 KK		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
3	Pembangunan PLTD di Kecamatan Babana	500 KK		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	

4	Pengembangan jaringan listrik sampai ke Pusat-pusat desa			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
---	--	--	--	--------------	--	-------------------	--------------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih		
5	Pengembangan listrik tenaga mikro hidro (PLTMA) Tobadak	3-5 MW		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
6	Pengembangan listrik tenaga mikro hidro (PLTMA) Karossa	3-5 MW		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
7	Pengembangan Listrik Tenaga Air (PLTA) Batumakado	15 MW		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
8	Pengembangan Listrik Tenaga Air (PLTA) Salulesu	15 MW		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
9	Pengembangan Listrik Tenaga Air (PLTA) Kuraobalu	15 MW		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
m	Program Pengembangan jaringan telekomunikasi			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Pembangunan STO di Tobadak			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
2	Pembangunan BTS di seluruh wilayah Kabupaten mamuju Tengah			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
n	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
1	Pembangunan bendung di Pangale			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
2	Pembangunan bendung Sungai karama di Pangale			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
3	Pembangunan bendung di Sungai Budong-Budong			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
4	Pembangunan bendung karossa			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
5	Pengembangan jaringan irigasi di Kecamatan pangale			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
A3	Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana dan sarana wilayah, meliputi jaringan prasarana transportasi, jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air							
a	Program pembangunan prasarana							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
1	Pengembangan sistem penyediaan air bersih di setiap kota kecamatan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
2	Pengembangan sistem pengelolaan persampahan yang melayani kawasan perkotaan Tobadak dan Topoyo			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
3	- pembangunan TPA Tabolang dengan sistem controled landfill di Kawasan perkotaan Tobadak dan Topoyo			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
4	-pengadaan alat angkut sampah (gerobak/becak motor, truk)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak ada keterangan realisasi	
5	-pengadaan alat berat di TPA (buldozer, wheel loader, lanfill compactor dll)		sesuai		Terealisasi 100 %			

6	pembangunan tempat pembuangan sementara (TPS)		sesuai		Terealisasi 26 %		Penanganan timbulan sampah	
---	---	--	--------	--	------------------	--	----------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Realisasi Rencana	Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional	
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi				Belum Terealisasi/ Selisih
			Sesuai	Tidak Sesuai					
	sampah di kawasan permukiman								
7	pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman		sesuai		Terealisasi 22,11%				
8	pembangunan instalasi pembuangan lumpur tinja (IPLT)		Sesuai		Terealisasi 73%		Pengurangan timbulan sampah		
9	pengadaan truk tangki tinja		Sesuai		Terealisasi 100%				
10	pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan-kawasan industri			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi		
11	pembangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) di kawasan-kawasan pertambangan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi		

12	pengembangan sistem drainase permukiman		sesuai		Terealisasi 59.47 %			
A4	Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, perdagangan, dan pemerintahan) secara merata dan berjenjang skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan							
a	Program peningkatan kualitas dan perluasan ketersediaan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	sarana dan prasarana sosial ekonomi							
1	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas pendidikan (Tmana Kanak-Kanak, Sekolah dasar, Sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas kesehatan (rumah sakit dan puskesmas)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas Perkatoran pemerintahan (kabupaten, Kecamatan, dan Desa)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	Pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perdagangan (pasar)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH SECARA MERATA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA								
A	Pengembangan kawasan pertanian, perkebunan dan perikanan berdasarkan sistem agrobisnis secara terpadu dan berkelanjutan							
A1	Menetapkan pusat-pusat kawasan agrobisnis yang berfungsi sebagai pusat pelayanan agrobisnis skala kabupaten (orde-1), maupun pusat pelayanan skala							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
a	Program penyusunan masterplan Pengembangan Kawasan Agropolitan di Kabupaten Mamuju Tengah			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	revisi masterplan kota terpadu mandiri (KTM)Tobadak			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

2	penyusunan Masterplan Kawasan Agropolitan di Kabupaten mamuju Tengah			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A2	Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan prasarana dan sarana yang mendukung pengembangan agribisnis, meliputi sarana dan prasarana sub-sistem arabisnis hulu, usaha tani, pengolahan hasil, pemasaran hasil dan subsistem penunjang							
a	Program pengembangan sarana kawasan agropolitan di Kota Orde 1			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pembangunan perkantoran pusat penelitian dan pengembangan (balitbang) pertanian, perkebunan dan perikanan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	pembangunan perkantoran pusat pelayanan promosi kawasan agropolitan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan terminal agribisnis			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

	pembangunan perkantoran jasa keuangan (Bank dan Asuransi)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	Pembangunan fasilitas pergudangan dan coolstorage			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan kawasan industri pengolahan pertanian			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
b	Program pengembangan sarana kawasan agropolitan di Kota Orde 2			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan pusat pelatihan dan pemuliaan tanaman unggulan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan SMK Pertanian			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Realisasi Rencana	Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi			
			Sesuai	Tidak Sesuai				

	pembangunan sub terminal agribisnis			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan perkantoran jasa keuangan (BPR dan koperasi)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	Pembangunan fasilitas pergudangan dan sortasi			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
c	Program pengembangan sarana kawasan agropolitan di Kota Orde 3			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan sarana produksi pertanian	1 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan pusat pembibitan dan percontyohan komoditas	1 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan fasilitas keuangan (koperasi)	600 m ²		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A3	Mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang sesuai dengan agroekosistem dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
a	program pengembangan komoditas unggulan Kabupaten Mamuju Tengah			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pengembangan lahan pertanian lahan basah menjadi lokasi lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan didukung pengembangan jaringan irigasi teknis	4.356,06 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	penelitian agroekosistem dan sosial budaya untuk menentukan komoditas unggulan kabupaten	2 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	menetapkan "one vilage one product" untuk pengembangan kawasan sentra komoditas unggulan di Kabupaten Mamuju tengah	50 Ha		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	pengembangan prasarana dan sarana penunjang produksi (saprodi)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	peningkatan akses pemasaran kawasan- kawasan pertanian			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A4	Mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan minapolitan;							
a	program pengembananagan minapolitan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	menyusun rencana pengembangan kawasan minapolitan	1 Dokumen		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	penataan infrastruktur yang mendukung kegiatan minapolitan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	pembangunan sarana khusus penunjnag kegiatan perikanan (tangkap dan budidaya)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

4	pengembangan kegiatan pengolahan ikan dan pemasaran hasil perikanan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A5	Mengembangkan teknik budidaya pertanian dan perkebunan yang ramah lingkungan dan terpadu (integrated green farming);							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih		
a	Program peningkatan SDM dan kelembagaan petan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	peyuluhan dan pelatihan budi daya tanaman unggulan bagi petani	30 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	penyediaan tenaga penyuluhan pertanian lapangan di setiap desa (dari alumni sekolah menengah pertanian)	30 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	pengembangan dan penguatan kelembagaan petani (kelompok tani/POKTAN)	30 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

a	program pengembangan pertanian terpadu dan ramah lingkungan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	peyuluhan dan pelatihan budi daya pertanian ramah lingkungan	30 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A6	Meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan pasca panen berupa kegiatan pengolahan dan pemasaran;							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
a	program peningkatan perekonomian masyarakat			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	peyuluhan dan pelatihan pengolahan hasil pertanian kepada masyarakat	30 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	pengembangan sentra industri rumah tangga dan industri kecil yang pengolahan hasil pertanian	100 Orang		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
TERWUJUDNYA 3 PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH SECARA MERATA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA								
A	Peningkatan fungsi hidrologis di daerah aliran sungai (DAS) untuk menjaga keseimbangan tata air							

A1	Meningkatkan konservasi sumber daya air melalui perlindungan sumber air dan perlindungan ekosistem pantai dan ekosistem DAS dari mulai hulu sampai hilir							
a	Program perlindungan kawasan sempadan pantai			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pengamanan kawasan sempadan pantai dari kegiatan yang merusak fungsi lindung (hutan bakau) Kabupaten Mamuju Tengah rehabilitasi			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	kawasan sempadan pantai (hutan bakau)							
2	rehabilitasi kawasan sempadan pantai (hutan bakau) yang rusak akibat pembukaan tambak			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	pengendalian pemanfaatan kawasan sempadan pantai untuk kegiatan budidaya			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

4	pantai, terutama di kawasan hutan mangrove, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
5	pembangunan tanggul penahan ombak pada kawasan permukiman di pinggir pantai			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
b	Program perlindungan kawasan sempadan sungai			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
1	penertiban bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

2	normalisasi dan rehabilitasi kawasan sempadan sungai			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	pembangunan jalan inspeksi di sepanjang pinggir sungai yang melalui kawasan perkotaan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
4	konservasi lahan pada jalur sungai yang potensial erosi dan longsor			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A2	Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air melalui pemanfaatan sumber air sungai untuk kesejahteraan masyarakat							
a	program pendayagunaan sumber daya air			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pembangunan bendung dan pengembanagn irigasi			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional	
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi			Belum Terealisasi/ Selisih

	pemanfaatan air sungai sebagai airbaku bagi instalasi pengolah air minum (IPAM)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	pemanfaatan sungai untuk pembangkit tenaga listrik mikro hydro di wilayah yang potensial khususnya di desa terpencil			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A3	Meningkatkan pengendalian daya rusak air melalui upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan akibat bencana							
a	Program Pengendalian Sungai terhadap Banjir, longsor			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan bangunan pengendali banjir			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	pembangunan bendungan pengendali banjir			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
3	melakukan penghijauan pada			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/Selisih		
	pinggiran sungai yang curam							
4	melakukan rekayasa teknik, berupa pembangunan tanggul, turap, talud dan bronjong di sepanjang sungai yang potensial longsor			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A4	Meningkatkan pengelolaan wilayah sungai dan DAS secara terpadu							
a	Program pengelolaan wilayah DAS secara terpadu			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pembentukan badan pengelola DAS yang terkait dengan pengelolaan DAS di provinsi dan nasional (balai besar wilayah sungai/BBWS)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

2	kerjasama pengelolaan DAS dengan Kabupaten sekitar (kabupaten dengan DAS yang sama di Kabupaten sekitar)			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
---	--	--	--	--------------	--	-------------------	-------------------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
A5	Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan-kawasan perlindungan sumber daya air							
a	program pengendalian pemanfaatan Ruang di sekitar sumber air			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	penertiban bangunan yang berada di sepanjang sempadan sungai, sempadan pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

2	penertiban kegiatan budidaya berada di sepanjang sempadan sungai, sempadan pantai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan kearifan lokal			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH SECARA MERATA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA								
A	Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya pada kawasan kritis lingkungan dan pemulihan pada kawasan sudah terdegradasi							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
A1	menetapkan zonasi kawasan perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat dan kawasan rawan bencana							
a	Program Pengendalian pemanfaatan Ruang di kawasan lindung dan kawasan rawan bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

1	pengendalian kegiatan budidaya di kawasan lindung (kawasan bergambut, kawasan resana air, kawasan sempadan pantai, kawasan sempadan sungai, dan kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya serta di kawasan rawan bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	pengendalian pembangunan fisik dan pengembanaan kegiatan budidaya di kawasan rawan banjir, longsor, gempa bumi dan rawan tsunami			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Realisasi Rencana	Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi			
			Sesuai	Tidak Sesuai				
A2	mempertahankan luasan hutan di kawasan DAS seluas minimal 45 % untuk menjaga keseimbangan tata air							
a	program perwujudan kawasan hutan di kawasan DAS			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan	

							realisasi	
1	perlindungan dan pelestarian fungsi ekologis kawasan hutan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	penetapan kawasan- kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber daya air			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A3	merehabilitasi kawasan yang berfungsi lindung yang terdegradasi dalam rangka memelihara keseimbangan							
a	Program perwujudan kawasan lindung di kawasan DAS			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pemantapan batas kawasan lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	rehabilitasi dan rebisasi di kawasan kawasan yang berfungsi lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A4	menyelenggarakan upaya mitigasi dan adaptasi bencana sesuai dengan karakteristik							

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
a	Program mitigasi dan adaptasi bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	penguatan kapasitas masyarakat dan lembaga BPBD dalam menghadapi bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A Pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu pada kawasan-kawasan yang berfungsi lindung								
A1 kegiatan pemanfaatan ruang di kawasan hutan lindung, kawasan resapan air, sempadan sungai, dan sempadan pantai								
a	program pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
1	pengendalian pembangunan fisik dan pengembanaan kegiatan budidaya di kawasan yang berfungsi lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
2	Mengendalikan permukiman yang secara eksisting sudah ada di kawasan lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
3	Penguatan program dan pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan lindung			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
A2	Mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan dengan keterenggan >40 persen							
B	program pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan lindung							
1	pengendalian pembangunan fisik dan pengembanaan kegiatan budidaya di kawasan dengan keterenggan > 40 %			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN KABUPATEN MAMUJU TENGAH SECARA MERATA, TERPADU DAN BERKELANJUTAN DENGAN BERBASIS AGRIBISNIS YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN MENUJU MASYARAKAT MAJU DAN SEJAHTERA								
A	Perwujudan kawasan permukiman yang layak dan berkelanjutan							
A1	Meningkatkan kualitas permukiman didukung oleh prasarana dan sarana yang memadai							
a	Program Lingkungan Sehat Permukiman perkotaan			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	penyediaan hunian yang layak yang dilayani oleh sarana dan prasarana permukiman yang memadai	500 Rumah		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	peningkatan penyehatan lingkungan permukiman	500 Rumah		Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
	penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
b	Program Lingkungan Sehat Permukiman perdesaaan							
	penataan, perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman		Sesuai		Terealisasi 35,4%			
	pengembangan sistem jaringan jalan						Tidak terdapat keterangan realisasi	
	penyediaan sarana dan prasarana permukiman		Sesuai		Terealisasi			
A2	Mengendalikan perkembangan permukiman yang berada di kawasan kritis lingkungan dan rawan bencana							
a	Program Perumahan dan Permukiman Layak Huni							

1	memindahkan permukiman di kawasan kritis			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
---	--	--	--	--------------	--	-------------------	-------------------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran					Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi Rencana			
			Sesuai	Tidak Sesuai	Realisasi	Belum Terealisasi/ Selisih		
	lingkungan secara bertahap							
2	Penyediaan perumahan layak huni melalui bantuan pemerintah dan pembangunan perumahan swadaya		sesuai		Terealisasi 68,77%			
A3	Mewujudkan kawasan permukiman dengan prinsip mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerugian akibat bencana							
1	Pengendalian pembangunan permukiman pada kawasan rawan bencana		Tidak sesuai	0%				
2	Penerapan standar konstruksi bangunan tahan gempa			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	
3	Penerapan sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan tsunami.			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat data realisasi	

4	Penetapan Kawasan Rawan Bencana dan Mitigasi Bencana melalui Studi Mitigasi Bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	
---	---	--	--	--------------	--	-------------------	-------------------------------------	--

No	Indikasi Program 5 Tahun Pertama RTRW Kab. 2014-2034	Jenis dan Besaran				Realisasi Rencana	Persentase Realisasi Pemanfaatan Ruang	Dampak Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang thd lingkungan, kabupaten, regional dan nasional
		Besaran / Volume	Kesesuaian Kondisi Eksisting dan Aktual di Lapangan dengan Rencana		Realisasi			
			Sesuai	Tidak Sesuai				
5	pembangunan prasarana, sarana dan jalur evakuasi bencana			Tidak sesuai		Belum terealisasi	Tidak terdapat keterangan realisasi	

2.7.2 Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah dan Sarana Prasarana Wilayah

Posisi geografis Wilayah Sulawesi yang terletak diantara ALKI II dan III berpotensi untuk mendukung peran wilayah Sulawesi sebagai *hub* dan pintu gerbang internasional KTI. Selain itu, dengan adanya pembangunan IKN di Wilayah Kalimantan, menjadi peluang untuk peningkatan aktivitas ekonomi di Wilayah Sulawesi sebagai daerah penyangga. Adapun komoditas dan sektor potensial bernilai tambah untuk mendukung arah pengembangan Wilayah Sulawesi di masa mendatang adalah komoditas pertanian, perkebunan (kakao, kelapa sawit, cengkeh, pala, rempah), perikanan tangkap (tuna, cakalang, kerapu, selar, teri), industri logam dasar (nikel, tembaga, dan emas-perak), mineral aspal serta pariwisata.

Secara geografis letak Sulawesi Barat sangat strategis terhadap letak IKN. Arah pengembangan Wilayah Kabupaten di Sulawesi Barat

2.7.3. Kebijakan Umum Kewilayahan

Kebijakan umum kewilayahan RPJPN

1. Tata Ruang dan Pertanahan
2. Urbanisasi dan Perkotaan
3. Perdesaan dan Daerah Afirmasi
4. Konektivitas
5. Ketenagalistrikan
6. Teknologi, Informasi dan Komunikasi
7. Sarana dan Prasarana Dasar
8. Desentralisasi

Kebijakan umum penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah terdiri atas;

1. Penetapan fungsi perkotaan berhierarki dan merata guna mendukung tujuan penataan ruang wilayah;
2. Peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten;
3. Pengembangan fungsi kawasan berbasis agrobisnis dan minabisnis;
4. Peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi ruang lindung;
5. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya;
6. Pengendalian kegiatan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan-kawasan yang berfungsi lindung.

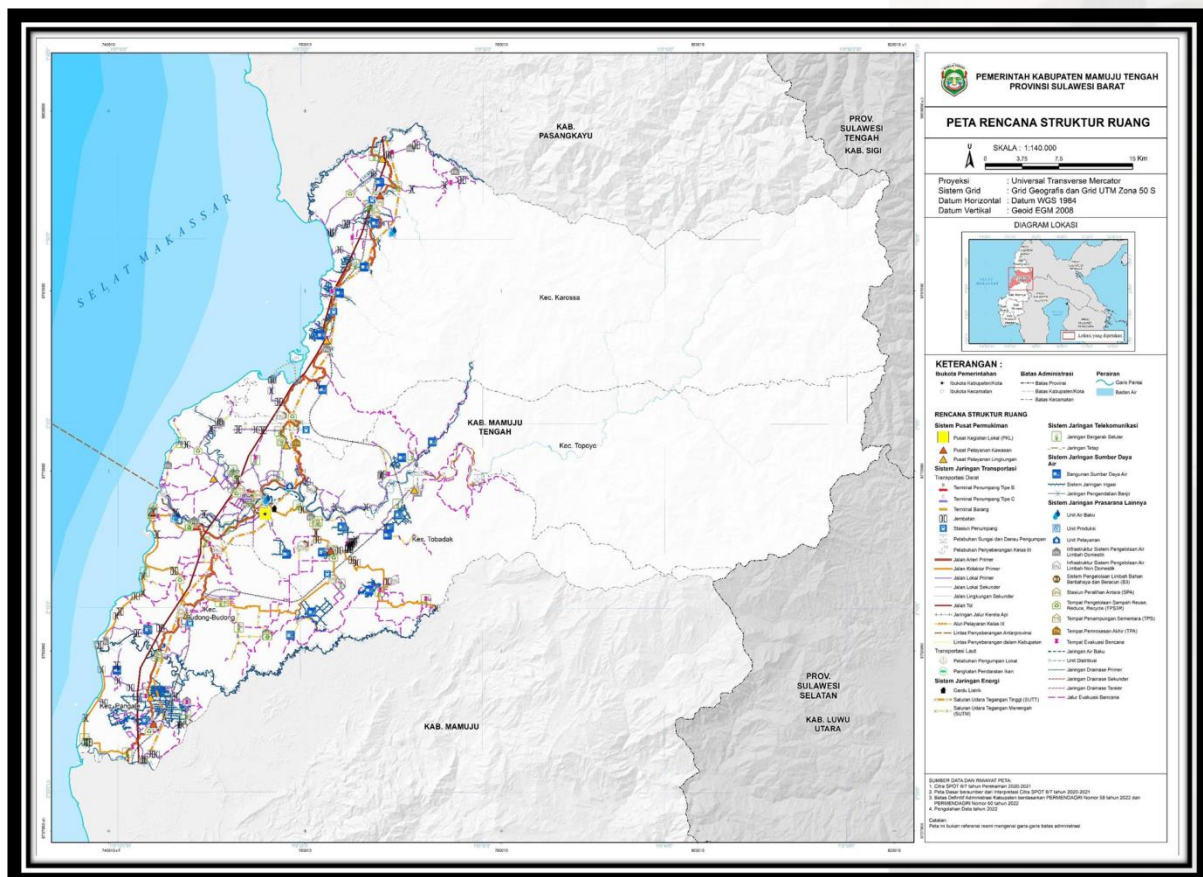
Adapun strategi penataan ruang Kabupaten Mamuju Tengah adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi penetapan fungsi perkotaan berhierarki dan merata guna mendukung tujuan penataan ruang wilayah, terdiri atas:
 - a. mewujudkan dan menjaga keterkaitan antar pusat-pusat permukiman di Wilayah Kabupaten Mamuju Tengah;
 - b. menetapkan dan mendukung pengembangan KTM Tobadak sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah

- Provinsi Sulawesi Barat sebagai pusat yang melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan;
- c. menetapkan Pusat-Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk mendukung pemerataan pelayanan umum;
 - d. menetapkan Pusat Pelayanan Lingkungan yang berada di luar ibu kota kecamatan; dan
 - e. mengembangkan pelayanan pusat-pusat permukiman yang mendukung sektor unggulan berbasis agrobisnis dan minabisnis.
- 2) Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di seluruh wilayah kabupaten, terdiri atas:
- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat dan laut;
 - b. pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat hingga ke daerah perdesaan;
 - c. peningkatan prasarana telekomunikasi, khususnya pada kawasan terisolir;
 - d. mengembangkan sistem jaringan energi dengan memprioritaskan pemanfaatan sumber daya terbarukan yang ramah lingkungan dalam sistem kemandirian energi area mikro, dibanding pemanfaatan sumber daya yang tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik; dan
 - e. meningkatkan kualitas jaringan prasarana serta mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air.
- 3) Strategi pengembangan fungsi kawasan berbasis agrobisnis dan minabisnis, terdiri atas:
- a. mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah;
 - b. mengembangkan komoditas pertanian dan perkebunan unggulan yang sesuai dengan agroekosistem dan kondisi sosial budaya masyarakat di Kabupaten Mamuju Tengah;
 - c. mengembangkan ekonomi kelautan dan perikanan dengan pendekatan minabisnis; meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
 - d. mengembangkan kegiatan penunjang dan/atau kegiatan turunan dari pemanfaatan sumber daya.
- 4) Strategi peningkatan upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup dengan mempertahankan fungsi ruang lindung, terdiri atas:
- a. mengembalikan fungsi kawasan berfungsi lindung secara bertahap untuk dapat memelihara keseimbangan lingkungan;
 - b. melindungi dan mengoptimalkan kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. mempertahankan dan mengelola kawasan hutan sebagai penyangga kawasan hutan lindung untuk menjaga kelestariannya;

- d. mendukung penetapan kawasan konservasi perairan untuk mewujudkan pengelolaan sumberdaya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan; dan
 - e. menyediakan informasi yang bersifat terbuka kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya, serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
- 5) Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antarkegiatan budidaya, terdiri atas:
- a. penetapan kawasan budi daya yang memiliki nilai
 - b. strategis kabupaten untuk memanfaatkan sumber
 - c. daya alam di ruang darat, laut, dan udara, termasuk
 - d. ruang di dalam bumi secara sinergis untuk
 - e. mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah;
 - f. mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - g. menetapkan, memanfaatkan, mengembangkan dan mempertahankan kawasan pertanian pangan berkelanjutan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
 - h. mengarahkan pertumbuhan kawasan permukiman pada kawasan yang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; dan mengembangkan kegiatan pertambangan yang sesuai dengan kaidah pertambangan melalui penyelidikan umum, eksplorasi, produksi, pengelolaan limbah, reklamasi tambang, dan pasca tambang.

Gambar 2. 32 Peta Rencana Struktur Ruang Kabupaten Mamuju Tengah



BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

3.1.1. Masih Rendahnya Pendapatan Per Kapita

PDRB/kapita Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2022 sebesar Rp. 27,24 juta, lebih rendah dari rata-rata provinsi (Rp. 37,07 juta) dan rata-rata nasional (Rp.71,03 juta). Bila dihubungkan dengan visi RPJPN 2025-2045 yang mencanangkan pendapatan perkapita setara dengan negara maju, maka menurut Bank Dunia pendapatan setara negara maju minimal US\$ 11.906/tahun, atau sekitar Rp.185 juta/kapita/tahun. Artinya, Kabupaten Mamuju Tengah dapat berkontribusi pada pencapaian ekonomi Indonesia untuk setara dengan negara maju bila PDRB/kapita pada tahun 2045 meningkat tujuh kali lipat dari tahun 2022.

Penyebab dari rendahnya PDRB/kapita adalah rendahnya produktivitas tenaga kerja. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja adalah tingkat pendidikan formal. Pada tahun 2022, dari total angkatan kerja yang bekerja, lebih dari 60% berpendidikan formal SMP ke bawah. Selain itu, tingkat teknologi yang diaplikasikan masyarakat sangat rendah. Teknologi maju diterapkan pada perusahaan perkebunan sawit melalui pabrik pengolahan, tetapi manfaat dari nilai tambahnya kurang memberi multiplier effect terhadap pendapatan masyarakat. Penyebab lainnya adalah rendahnya kontribusi usaha mikro, kecil dan menengah terhadap nilai tambah perekonomian daerah.

3.1.2. Masih Tingginya Kemiskinan dan Ketimpangan

Tingkat kemiskinan masih tinggi karena ketergantungan pada sektor pertanian yang sangat tinggi dan nilai tambah pertanian yang rendah. Sektor pertanian memberikan kontribusi sektor terbesar dalam struktur ekonomi kabupaten Mamuju Tengah. Sebanyak 55,58 persen atau sekitar 34.763 penduduk bekerja di Mamuju Tengah tercatat paling banyak bekerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan. Ketergantungan ini dapat berdampak buruk dalam jangka panjang, mengingat nilai tambah sektor pertanian yang masih rendah, sehingga dapat berakibat terjadinya proses pemiskinan masyarakat secara struktural.

3.1.3. Masih Rendahnya Daya Saing Daerah

Berbagai pilar dalam indeks daya saing daerah masih mengalami permasalahan seperti pada sistem keuangan, keterampilan, pasar tenaga kerja, dan kapabilitas inovasi sehingga kemampuan daya saing Mamuju Tengah masih berada dibawah kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Barat.

Permasalahan pada pilar keterampilan dan pasar tenaga kerja disebabkan karena masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah, angka harapan lama sekolah, rendahnya kualitas tenaga kerja, terbatasnya akses lowongan pekerjaan serta belum tersedianya kebijakan pasar tenaga kerja dan penentuan upah pekerja minum yang dilakukan pemerintah daerah.

Permasalahan selanjutnya terletak pada pada Sistem Keuangan yang menjadi terendah jika dibandingkan kabupaten lainnya. Sistem keuangan ini dilihat dari jumlah lembaga jasa keuangan, pasar keuangan, dan infrastruktur keuangan. Permasalahan terakhir terletak pada pilar kemampuan inovasi karena disebabkan oleh masih rendahnya sumber daya manusia dalam menciptakan inovasi, rendahnya implementasi hasil penelitian pada kebijakan pemerintah dan publikasi yang diterbitkan, serta minimnya pendanaan pada perkembangan riset dan teknologi.

3.1.4. Masih Rendahnya Daya Saing Sumber Daya Manusia

Kualitas pembangunan manusia tercermin dalam indeks pembangunan manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Mamuju Tengah masih rendah. Di tahun 2022 IPM Kabupaten Mamuju Tengah 66,89 masih dibawah IPM Provinsi Sulawesi Barat 66,92 dan Nasional 72,91. Bila dihubungkan dengan Visi RPJPN 2025-2045 menciptakan manusia unggul, IPM Kabupaten Mamuju Tengah masih jauh di bawah target nasional.

Penyebab rendahnya pembangunan manusia di Kabupaten Mamuju Tengah disebabkan oleh masih rendahnya rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup yang masih jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian nasional. Rata-rata lama sekolah yang masih rendah menyebabkan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sehingga tidak dapat bersaing dalam pasar kerja yang membutuhkan tingkat pendidikan tinggi dan terampil. Masih kurangnya akses, ketersediaan serta kelengkapan sarana dan prasarana kesehatan terhadap pelayanan kesehatan juga menjadi penyebab rendahnya angka harapan hidup. Kurangnya tenaga kerja terampil dan rendahnya pendidikan tenaga kerja menyebabkan tenaga kerja sebagian besar bekerja sebagai buruh dengan pendapatan rendah sehingga upah yang diterima tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

3.1.5. Masih Tingginya intensitas Emisi Gas Rumah Kaca

Permasalahan efek rumah kaca memiliki dampak yang signifikan terhadap perencanaan pembangunan, terutama dalam konteks keberlanjutan lingkungan, ekonomi dan sosial. Dampak langsung efek rumah kaca menyebabkan suhu global meningkat yang menyebabkan cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut dan perubahan pola curah hujan. Ini mengancam ketahanan infrastruktur saat ini termasuk jalan, jembatan, sistem drainase dan bangunan yang mungkin belum dirancang untuk menangani perubahan iklim. Hal ini perlu ditindaklanjuti dalam perencanaan infrastruktur berkelanjutan yakni evaluasi risiko iklim perlu dilakukan dan langkah-langkah adaptasi perlu dimasukkan seperti desain infrastruktur yang tahan terhadap banjir, gempa atau badai. Untuk memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun saat ini akan bertahan, pembangunan berorientasi masa depan harus mempertimbangkan proyeksi perubahan iklim.

Selain mengancam infrastruktur, efek gas rumah kaca dan perubahan iklim akan mengganggu siklus air, produksi pangan dan ekosistem. Ini berdampak pada ketersediaan sumber daya alam seperti air bersih dan hasil pertanian. Ini menimbulkan tantangan untuk memastikan bahwa populasi yang terus berkembang memiliki ketahanan pangan dan air. Perencanaan berbasis

ekosistem harus mempertimbangkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Ini termasuk perencanaan irigasi yang lebih efisien, diversifikasi tanaman untuk menghadapi perubahan cuaca dan perlindungan dan restorasi hutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem.

3.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah secara signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung di masa datang. Isu strategis mengacu pada situasi atau kondisi yang harus menjadi perhatian utama atau prioritas dalam perencanaan pembangunan sebuah wilayah karena berdampak signifikan pada wilayah tersebut. Isu strategis memiliki ciri-ciri seperti penting, mendasar, mendesak, dan mendefinisikan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Perumusan masalah strategis pembangunan di Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada permasalahan, tantangan, dan potensi pembangunan di masa depan, yang mencakup bidang fisik-lingkungan, sosial-budaya, ekonomi-keuangan, dan legal-kelembagaan. Istilah "isu strategis" mengacu pada berbagai sumber, termasuk: (1) isu strategis yang disebabkan oleh perubahan yang terjadi di tingkat nasional, regional, dan internasional yang berdampak pada Kabupaten Mamuju Tengah; (2) isu strategis yang muncul dari kebijakan pembangunan daerah jangka panjang di Kabupaten Mamuju Tengah; dan (3) isu strategis yang muncul dari evaluasi situasi dan kondisi saat ini dalam hal sarana prasarana, masyarakat, dan pemerintahan umum.

Isu strategis dalam RPJPD ini dirumuskan dari berbagai sumber yakni RPJPN 2025-2045, laporan resmi lembaga pemerintah/lembaga luar negeri, laporan KLHS RPJPD 2025-2045, dan hasil penjangkaran aspirasi masyarakat. Isu strategis tersebut disimpulkan dari permasalahan pembangunan daerah, isu dari konteks global, nasional dan regional, serta potensi daerah yang dikembangkan untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3.2.1 Isu Strategis Global

Dibutuhkan perhatian komprehensif dari komunitas internasional terhadap berbagai masalah strategis global yang berkaitan dengan pembangunan jangka panjang. Adapun beberapa masalah strategis yang dihadapi masyarakat global yakni:

- a. Perubahan Iklim dan Lingkungan
Salah satu tantangan terbesar abad ini adalah perubahan iklim, yang berdampak jangka panjang pada ekosistem, ekonomi, dan kehidupan manusia. Beberapa solusi untuk masalah ini termasuk pengurangan emisi gas rumah kaca, transisi energi bersih, pelestarian keanekaragaman hayati, dan mitigasi dampak bencana alam.
- b. Ketahanan Pangan dan Air
Salah satu masalah penting untuk stabilitas sosial dan ekonomi adalah ketahanan pangan dan akses terhadap air bersih. Perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan degradasi lahan memperburuk krisis pangan dan air di berbagai tempat, yang memerlukan inovasi dalam teknologi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
- c. Ekonomi Berkelanjutan

Pertumbuhan ekonomi harus diimbangi dengan keberlanjutan sosial dan lingkungan. Ini mencakup mendorong ekonomi hijau, mendukung pengembangan teknologi yang ramah lingkungan, dan memastikan bahwa semua orang menerima manfaat ekonomi dengan cara yang sama.

d. Kesehatan Global

Pandemi COVID-19 menunjukkan seberapa berbahaya sistem kesehatan dunia. Akses terhadap layanan kesehatan yang baik, penanganan penyakit menular, kesiapsiagaan untuk pandemi, dan tantangan kesehatan mental yang meningkat adalah bagian dari kesehatan global.

e. Ketidaksetaraan Sosial dan Ekonomi

Pergeseran ketidaksetaraan sosial dan ekonomi dapat mengancam stabilitas global. Hak asasi manusia, pekerjaan, pendidikan, dan layanan kesehatan adalah upaya untuk mengatasi perbedaan ini.

f. Urbanisasi dan Perkotaan Berkelanjutan

Perencanaan kota yang cerdas dan berkelanjutan diperlukan untuk pertumbuhan kota yang cepat. Infrastruktur yang memadai, pengelolaan limbah, perumahan terjangkau, dan transportasi yang efisien serta ramah lingkungan adalah beberapa dari masalah ini.

g. Digitalisasi dan Teknologi

Meskipun revolusi digital menawarkan banyak peluang, ia juga membawa tantangan baru seperti privasi, keamanan siber, ketenagakerjaan, dan etika penggunaan teknologi. Untuk memastikan bahwa digitalisasi mendukung pembangunan yang inklusif dan tidak memperburuk ketidaksetaraan, ada kebutuhan untuk memastikan bahwa digitalisasi mendukung pembangunan yang inklusif.

h. Global Security and Stability

Stabilitas global juga dipengaruhi oleh masalah seperti migrasi, pengungsi, dan pelucutan senjata, serta ancaman keamanan global seperti terorisme, konflik bersenjata, dan ketegangan geopolitik.

i. Hak Asasi Manusia serta Demokrasi

Dalam jangka panjang, promosi dan perlindungan hak asasi manusia serta penguatan demokrasi merupakan pilar penting untuk kemajuan. Ini termasuk menjamin hak politik, kebebasan berekspresi, dan keadilan hukum untuk semua orang.

j. Kerjasama Internasional dan Multilateralisme

Kerjasama internasional yang kuat dan komitmen terhadap multilateralisme diperlukan untuk mengatasi masalah global ini. Setiap negara dan lembaga internasional harus berpartisipasi dalam solusi kolektif untuk tantangan global.

Untuk mencapai pembangunan jangka panjang yang inklusif dan berkelanjutan, semua masalah ini saling terkait dan membutuhkan pendekatan yang lebih luas.

3.2.2 Isu Strategis Nasional

a. Pembangunan Ibukota Nusantara dalam Kerangka Superhub Ekonomi Nusantara

Pemerintah berusaha mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, yang menyebarluaskan magnet pertumbuhan ekonomi baru sehingga tidak terbatas pada Pulau Jawa. IKN Nusantara berfungsi sebagai simbol identitas bangsa, ekonomi hijau, energi hijau, transportasi pintar, dan tata kelola pemerintahan yang efisien dan efektif. Ini merupakan titik penting dalam transformasi besar bangsa Indonesia.

IKN Nusantara sejak awal dirancang sebagai katalis untuk membuka potensi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, mendorong pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dengan menjadikan IKN Nusantara sebagai simbol identitas bangsa, dan menjadi pusat gravitasi ekonomi baru yang diharapkan dapat membawa efek multiplier dengan menjadikan episentrum pertumbuhan yang semakin merata di luar Jawa untuk mendukung pembangunan Indonesia.

Pulau Sulawesi memiliki potensi besar untuk membantu pembangunan ibu kota baru karena berada di dekat IKN di Kalimantan Timur. Provinsi Sulawesi Barat memiliki kesempatan untuk bertindak sebagai mitra yang dapat membantu proses pembangunan IKN, salah satunya dengan memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan pembangunan. Karena harga yang lebih baik, sebagian besar nelayan di Provinsi Sulawesi Barat lebih memilih menjual hasil tangkapan mereka ke Provinsi Kalimantan Timur. Secara geografis, Provinsi Sulawesi Barat berada di dekat calon ibu kota baru, yang memberikan peluang sekaligus tantangan bagi provinsi tersebut. Untuk memanfaatkan peluang ekonomi, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat harus memperhatikan masalah infrastruktur dan konektivitas dari dan ke IKN.

b. Bonus Demografi dengan SDM yang Berkualitas

Bonus demografi yang berkualitas tinggi di Indonesia berfokus pada pemanfaatan usia produktif (15-64 tahun) dibandingkan dengan usia non-produktif. Beberapa elemen penting yang harus diperhatikan yakni pendidikan yang berkualitas untuk memastikan generasi muda memiliki akses pendidikan berkualitas tinggi yang akan membantu mereka meningkatkan keterampilan dan daya saing, meningkatkan layanan kesehatan untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, penyediaan lapangan kerja yang memadai dan berkualitas untuk menyerap angkatan kerja yang besar, mendorong partisipasi semua kelompok, termasuk perempuan dan kaum marginal dalam pembangunan ekonomi, program-program yang mendukung kewirausahaan dan peningkatan keterampilan teknis bagi generasi muda untuk memastikan mereka dapat berkontribusi optimal pada perekonomian, pengelolaan yang baik dalam perencanaan keluarga dan migrasi untuk menjaga keseimbangan antara angkatan kerja dan beban ketergantungan, mendorong inovasi dan adopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitas ekonomi. Dengan strategi ini, Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan bonus demografi untuk mempercepat pembangunan ekonomi dan mengurangi tingkat kemiskinan, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

c. Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) lebih cepat

Pengembangan Kawasan Timur Indonesia (KTI) merupakan isu strategis nasional yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Beberapa fokus utama dalam pengembangan KTI meliputi:

Peningkatan Infrastruktur: Pengembangan jalan, pelabuhan, bandara, dan infrastruktur dasar untuk mempercepat konektivitas dan aksesibilitas wilayah timur.

Pengembangan Sumber Daya Alam: Optimalisasi sumber daya alam yang melimpah di wilayah timur secara berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penguatan Sektor Pendidikan dan Kesehatan: Meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan produktif.

Peningkatan Investasi: Mendorong investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri untuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan ekonomi lokal.

Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan daerah dan memperkuat identitas budaya lokal.

Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Mengutamakan pemberdayaan masyarakat adat dan lokal melalui program-program yang inklusif dan berkelanjutan.

Pengembangan KTI sebagai isu strategis nasional bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, mengurangi kesenjangan antarwilayah, dan memperkuat integrasi nasional.

3.2.3 Isu Strategis Regional

1. Rendahnya produktivitas dan pendapatan masyarakat

Peningkatan produktivitas usaha dan industri dengan menggalakkan inovasi dan adopsi teknologi di sektor-sektor lokal, membangun kemitraan antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk mendukung peningkatan keterampilan dan *competitive advantage* produk lokal. Tenaga kerja lokal terdesak oleh kualitas tenaga kerja luar akibat dari kebijakan nasional dan global sehingga kesempatan kerja dan kesempatan usaha yang terbuka lebih banyak diisi oleh tenaga kerja luar daerah bahkan luar negeri.

Diversifikasi ekonomi melalui identifikasi dan pengembangan sektor-sektor potensial seperti sektor perikanan tangkap dan budidaya serta industri pengolahannya, sektor pertanian tanaman pangan, sektor perkebunan kakao, pisang, dan kelapa, sektor pariwisata sesuai dengan arah kebijakan RPJPN untuk wilayah Sulawesi berada pada Alki II wilayah penyangga IKN.

Kabupaten Mamuju Tengah juga mempunyai kesempatan mengoptimalkan bonus demografi dimana rasio ketergantungan di bawah 50 persen yang diperkirakan akan berlangsung sekitar 10 tahun kedepan, dengan meningkatkan produktivitas penduduk usia produktif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan akses dan kualitas pendidikan serta pelatihan kejuruan disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja lokal. Kegiatan industri pengolahan dikuasai oleh perusahaan multi nasional dimana tenaga kerjanya diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah dan tenaga kerja serta pelaku usaha lokal tidak ikut menikmati peningkatan pendapatan yang tercipta dari kegiatan usaha tersebut.

Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya produktivitas pertanian khususnya bahan pangan seperti padi yang harus menjadi perhatian dalam peningkatan produksi untuk mencapai kemandirian pangan. Belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan sulit diwujudkan karena adanya alih fungsi lahan

pertanian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya infrastruktur pendukung pengairan, degradasi lahan, bencana alam seperti banjir dan kekeringan, belum tersedianya industri dan atau rumah olahan hasil produksi pada komoditas potensi yang kawasan sebarannya rendah, rantai pasar hasil produksi masih dikuasai spekulasi serta masih kurangnya sumberdaya manusia yang berkualitas di bidang pertanian juga menjadi salah satu andil dalam rendahnya produktivitas pertanian.

2. Stagnasi Industrialisasi

Untuk mewujudkan industri yang berdaya saing dengan struktur industri yang sehat dan berkeadilan, stagnasi industrialisasi perlu dilakukan revitalisasi sektor. Langkah revitalisasi industri dilakukan untuk memulihkan industri yang berbasis sektor pertanian yang mencakup pangan, peternakan, kehutanan, kelautan, dan perikanan. Ancaman deindustrialisasi berpotensi memperburuk tingkat kesejahteraan daerah. Hal tersebut menyebabkan populasi dan struktur industri menjadi lemah serta produktivitas tenaga kerja rendah.

3. Dampak perubahan iklim

Dampak perubahan iklim menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem karena mengancam ketersediaan sumber daya air, ketahanan pangan, keselamatan dari bencana hidrometeorologi karena global warming serta kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu perubahan iklim menjadi isu prioritas. Dampak dari perubahan iklim yang terjadi di Mamuju Tengah berkisar pada penggundulan hutan, kebakaran hutan, banjir, kekeringan dan abrasi pantai sehingga dibutuhkan kebijakan *pro-environment*.

4. Rendahnya kontribusi UMKM dalam penciptaan nilai tambah

UMKM mengalami kesulitan dalam mengakses modal yang diperlukan untuk meningkatkan produksi dan inovasi. Program pelatihan dan pendampingan perlu diperkuat untuk membangun kapasitas manajerial dan keterampilan teknis bagi pemilik UMKM. Dukungan dalam pengembangan strategi pemasaran, akses ke *platform e-commerce*, dan pembentukan kemitraan bisnis dapat membantu UMKM meningkatkan daya saing mereka. Peningkatan kerja sama dan kemitraan dengan perusahaan besar, pemasok, dan distributor dapat membuka peluang baru bagi UMKM. Penyediaan akses yang lebih baik ke layanan asuransi dan instrumen keuangan yang memadai dapat membantu melindungi UMKM dari risiko finansial.

5. Belum berkembangnya melek digital

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan menjadi pendorong utama dibalik sebuah inovasi dan kemajuan teknologi. Saat ini dunia telah memasuki *digital disruption era* yang sangat berpengaruh dalam mengubah sistem yang terjadi seperti pada cara konsumen, pengelolaan industri, serta perubahan sistem pasar dari konvensional menjadi lebih moderen yang membawa implikasi pada tatanan kehidupan sosial dan budaya masyarakat saat ini.

Dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045 pemerintah Daerah harus gesit dan responsif melihat perubahan ini sebagai bentuk peluang untuk menciptakan transformasi digital melalui pembangunan infrastruktur jaringan internet yang merata sampai ke desa pelosok. Tersedianya infrastruktur yang memadai akan

berdampak pada meningkatnya melek digitalisasi masyarakat sehingga membuka akses masyarakat desa ke dunia yang lebih luas. Masyarakat yang memiliki wawasan yang lebih luas dengan pemanfaatan teknologi akan mampu melahirkan inovasi baru yang memudahkan dalam pemenuhan kebutuhan dari segala aspek kehidupan baik dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, transportasi dan komunikasi tanpa batas.

Namun tantangan yang perlu diwaspadai oleh pemerintah daerah adalah pada keamanan dan kesenjangan literasi digital diantaranya adalah kecakapan dan budaya digital yang baik. Perlunya kewaspadaan terhadap maraknya serangan siber yang mengakibatkan potensi kerugian pada pencurian data serta masih banyak masyarakat yang hanya mampu menerima informasi tanpa memahami dan mengolah informasi tersebut dengan baik sehingga pada literasi digital saat ini masih banyak ditemukan penyebaran informasi yang tidak faktual atau hoaks, naiknya *cyber bullying*, maraknya *hate speech* dan penyebaran konten negatif yang mengandung konten kekerasan, SARA, dan pornografi.

6. Belum optimalnya pelayanan publik

Penyediaan sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik perlu perlu terintegrasi sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang efektif. Dalam rangka optimalisasi pelayanan publik daerah berupaya memaksimalkan sumber daya yang ada. Menciptakan birokrasi yang moderen dengan perkembangan digitalisasi namun tetap mengutamakan kenyamanan bagi masyarakat. Selain itu dibutuhkan kebijakan dalam rangka digitalisasi pemerintahan melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik.

7. Rendahnya daya saing infrastruktur daerah

Pentingnya peran pelabuhan dimana letak Mamuju Tengah yang termasuk dalam AKLI II, dengan adanya IKN menguntungkan posisi Kabupaten Mamuju Tengah yang berada dekat dengan IKN. Belum tersedianya rest area yang layak untuk mendukung jalur transit trans Sulawesi sebagai salah satu jalur potensial dalam mobilitas barang dan manusia dalam kegiatan ekonomi pulau Sulawesi dan mendukung jalur logistik pengembangan IKN di Pulau Kalimantan. Hal ini penting untuk jangka panjang pembangunan Mamuju Tengah kedepan mengingat potensi berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan baru di Pulau Sulawesi dalam mendukung nilai tambah ekonomi daerah secara keseluruhan. Produk-produk unggulan daerah untuk mendukung daerah.

8. Ketergantungan komoditas lokal pada perkembangan pasar global

Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Pemerintah Pusat telah mengalokasikan anggaran untuk Kabupaten Mamuju Tengah hal ini dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan infrastruktur baik jalan jembatan maupun kegiatan lain yang telah diatur untuk pengalokasian Dana Bagi Hasil (DBH) tersebut.

Optimalisasi Pemanfaatan potensi industri sawit di kabupaten Mamuju Tengah ada beberapa aspek yang harus diperhatikan yaitu Peningkatan Produktivitas dengan mengadopsi teknik pertanian yang lebih baik, pemilihan bibit yang unggul, penggunaan pupuk yang tepat, pengelolaan air yang efisien, dan pengendalian

hama dan penyakit lalu Diversifikasi Produk dan Pengembangan Pasar Selain minyak kelapa sawit, menjelajahi potensi untuk menghasilkan produk turunan lainnya seperti biofuel, bahan kimia, kosmetik, makanan, dan produk lain yang dapat meningkatkan nilai tambah dari kelapa sawit, mencari pasar baru dan diversifikasi pasar untuk produk-produk turunan kelapa sawit, serta meningkatkan promosi produk-produk sawit yang berkelanjutan selain itu hal penting yang harus dilakukan adalah Konservasi Lingkungan: Memastikan keberlanjutan lingkungan dengan praktik pertanian yang bertanggung jawab, seperti penanaman kembali, pengurangan deforestasi, dan pelestarian keanekaragaman hayati.

Penting untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan serta keberlangsungan sosial bagi masyarakat yang terlibat dalam industri sawit. Hal ini memerlukan kolaborasi antara pemerintah, industri, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat dalam upaya mencapai tujuan optimalisasi industri sawit yang bertanggung jawab.

9. Risiko dan Kerawanan Bencana

Terjadinya global warming, degradasi lingkungan menjadi isu penting dalam pembangunan. Kerawanan bencana diartikan dalam hal bencana alam, bencana non-alam dan *cyber disaster* yang dapat menjadi tantangan tersendiri dalam pembangunan.

10. Mamuju Tengah sebagai daerah penyokong Ibu Kota Nusantara

Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat memiliki peran yang strategis sebagai salah satu daerah penyokong Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur. Peran ini mencakup berbagai aspek yang dapat mendukung keberhasilan pembangunan dan operasional IKN, termasuk dalam hal infrastruktur, ekonomi, sumber daya manusia, dan lingkungan. Beberapa potensi yang dapat menjadi peran kunci bagi Kabupaten Mamuju Tengah yakni dengan fokus pada pengembangan infrastruktur penunjang konektivitas dan transportasi. Mamuju Tengah dekat dengan IKN, sehingga dapat membantu memperkuat jaringan transportasi darat dan laut yang menghubungkan IKN dengan daerah lain di Indonesia, terutama di wilayah timur. Mamuju Tengah dapat menjadi pusat logistik yang mendukung distribusi barang kebutuhan pokok, bahan konstruksi, dan produk lainnya ke IKN. Dengan pengembangan infrastruktur yang memadai, kabupaten ini dapat memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran pasokan untuk mendukung pembangunan. Peningkatan infrastruktur jalan dan pelabuhan akan sangat penting untuk mendukung mobilitas barang dan orang, baik menuju maupun dari IKN.

Mamuju Tengah memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, seperti kelapa sawit, kakao, dan pangan. Produk-produk ini dapat menjadi suplai penting bagi kebutuhan pangan dan industri IKN, dan pengembangan sektor agribisnis di daerah ini dapat memastikan ketersediaan pangan dan bahan mentah yang berkelanjutan untuk IKN.

Mamuju Tengah dapat menjadi pusat pengembangan sumber daya manusia yang berfokus pada keterampilan yang dibutuhkan untuk mendukung pembangunan IKN, seperti konstruksi, teknik, pariwisata, dan teknologi informasi. Lembaga pendidikan dan pelatihan di Mamuju Tengah bisa berkolaborasi dengan

pemerintah dan sektor swasta untuk menciptakan tenaga kerja yang siap menghadapi kebutuhan IKN. Dengan memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada masyarakat lokal, Mamuju Tengah dapat memastikan bahwa penduduknya siap berpartisipasi dalam berbagai peluang kerja yang muncul dari pembangunan IKN.

Mamuju Tengah dapat mengembangkan dirinya sebagai pusat ekonomi regional yang menyediakan berbagai layanan dan produk yang dibutuhkan oleh IKN. Ini termasuk sektor perdagangan, jasa, manufaktur ringan, dan pariwisata. Kabupaten ini bisa menarik investasi dari dalam dan luar negeri untuk mempercepat pengembangan ekonomi regionalnya, yang akan berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi IKN. Kemitraan antara pemerintah daerah dan sektor swasta sangat penting untuk mengoptimalkan potensi ekonomi ini.

Mamuju Tengah memiliki potensi dalam penyediaan material konstruksi seperti pasir, batu, dan kayu, yang sangat dibutuhkan untuk pembangunan IKN. Dengan pengelolaan yang baik, daerah ini dapat menjadi pemasok utama material bangunan untuk berbagai proyek di IKN. Sebagai daerah penyangga, Mamuju Tengah memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Konservasi hutan, pengelolaan lahan yang berkelanjutan, dan perlindungan keanekaragaman hayati sangat penting untuk mendukung keberlanjutan ekologis di sekitar IKN. Pembangunan di Mamuju Tengah harus mengadopsi prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan untuk memastikan bahwa ekspansi ekonomi dan infrastruktur tidak merusak lingkungan. Ini termasuk penggunaan energi terbarukan, pengelolaan limbah yang efektif, dan mitigasi perubahan iklim.

BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

4.1. Visi Daerah Tahun 2025-2045

Visi daerah dalam RPJPD ini adalah kondisi daerah sebagai hasil dari pembangunan yang ingin diwujudkan sampai dengan tahun 2045. Visi daerah Kabupaten Mamuju Tengah didasarkan pada hasil analisis permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah, aspirasi para pemangku kepentingan, serta diselaraskan dengan visi RPJPN 2025-2045. Adapun rumusan visi daerah Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045 adalah sebagai berikut.

MAMUJU TENGAH MAJU, BERDAYA SAING, DAN BERKELANJUTAN DALAM EKOSISTEM AGROPOLITAN

MAJU adalah kondisi Kabupaten Mamuju Tengah pada tahun 2045 dimana masyarakatnya hidup dengan sehat, cerdas dan sejahtera. Dengan kondisi masyarakat yang memiliki derajat kesehatan, kecerdasan dan kesejahteraan yang tinggi dan merata, maka Kabupaten Mamuju Tengah dihuni oleh manusia unggul yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi, sehingga dapat berperan sebagai aktor-aktor pembangunan yang andal dalam mengelola potensi daerah untuk mencapai kemajuan yang sejajar dengan daerah lain di Indonesia pada berbagai aspek kehidupan.

BERDAYA SAING adalah kondisi Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki daya saing ekonomi, daya saing SDM, daya saing infrastruktur, dan daya saing investasi yang tinggi. Daya saing ekonomi bertumpu pada agroindustri sawit dan sektor ekonomi lainnya yang akan mewujudkan ciri ekonomi hijau, berketahanan pangan, memiliki rasio kewirausahaan yang memadai. Daya saing SDM diindikasikan oleh kompetensi SDM yang tinggi dalam mengelola potensi daerah serta kemampuan literasi digital pada beragam etnis yang hidup di Mamuju Tengah. Daya saing infrastruktur diindikasikan oleh kualitas layanan infrastruktur yang tinggi, ketahanan energi dan ketahanan air. Daya saing investasi diindikasikan oleh ketertiban dan ketenteraman yang terpelihara.

BERKELANJUTAN adalah kondisi dimana Kabupaten Mamuju Tengah memiliki ketahanan sosial-budaya dan ekologi yang tinggi. Dalam 20 tahun kedepan diharapkan terbangun interaksi yang seimbang antara aktivitas sosial-budaya dengan aktivitas lingkungan sehingga keberlanjutan terpelihara. Pada aspek ketahanan social-budaya, masyarakat Kabupaten Mamuju Tengah yang memiliki heterogenitas tinggi tetap berpegang teguh pada nilai luhur *lalla tasisara*. *Lalla Tasisara* berarti “walaupun terlepas tetapi tetap menyatu”. Ini bermakna bahwa masyarakat Mamuju Tengah memegang teguh persatuan dan kesatuan demi kemajuan daerah. Ini ditandai dengan terwujudnya keluarga berkualitas dan sehat, kebudayaan yang terus maju dan adaptif, relasi gender yang baik, dan kerukunan ummat beragama yang terpelihara. Pada aspek ketahanan ekologi, ini ditandai dengan terpeliharanya kualitas lingkungan hidup, kepatuhan terhadap RTRW dan terjaganya lahan pangan dari alih fungsi, ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana, ketahanan air dan energi, serta penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Berkelanjutan juga bermakna sebagai kondisi tata kelola yang baik, yang menjamin kesinambungan pembangunan dari waktu ke waktu.

EKOSISTEM AGROPOLITAN adalah kondisi dari hasil perkembangan wilayah Kabupaten Mamuju Tengah yang menjelmakan ciri perkotaan pada Kecamatan Tobadak dan Topoyo. Kota-kota ini dicirikan oleh fungsi sebagai pusat pemerintahan dan pelayanan public dengan didukung oleh sarana-prasarana dan fasilitas perekonomian. Agropolitan ini disanggah oleh perkembangan agribisnis pada seluruh ibu kota kecamatan di Kabupaten Mamuju Tengah dengan aktivitas utama perkebunan sawit dan industri pengolahannya serta budidaya tanaman pangan secara sirkuler dan teknologi presisi yang produknya bisa menyuplai kebutuhan pangan IKN di Kalimantan.

4.2. Sasaran Visi

Sasaran visi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045 beserta indikator dan targetnya pada 2045 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Mamuju Tengah 2025-2045 dan SEB RPJPN Tahun 2025-2045

No	RPJPN				RPJPD			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Peningkatan pendapatan per kapita	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,16 - 11,21	15,36 - 16,37	Meningkatnya pendapatan per kapita	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9.50	11.50
		PDRB per kapita (RP Juta)	40,5 - 40,56	142,11 - 182,56		PDRB Per Kapita	31,69	74,05
2	Pengetasan kemiskinan dan ketimpangan	Rasio gini (Indeks)	0,345 - 0,349	0,283 - 0,334	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	Gini Ratio	0.280	0.260
		Kontribusi PDRB Provinsi (%)	0.27	0.19		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	8.00	12.00
		Tingkat Kemiskinan (%)	7,51 - 8,01	0,16 - 0,41		Tingkat Kemiskinan	6,27	4,00
		Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23 - 5,79	5,22- 6,82		Pertumbuhan Ekonomi	5.80	6.50
3	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Indeks Daya Saing Daerah	-	-	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3.18	3.60
4	Peningkatan daya saing sumber daya manusia	Indeks Modal Manusia	0.55	0.7	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	Indeks Modal Manusia	0.45	0.65
5	Penurunan emisi GRK menuju net zero emission	Penurunan intensitas emisi GRK (%)	61.65	97.89	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Potensi Penurunan Intensitas Emisi GRK	59499.59	9427921.32
		Indeks Kualitas	84,82	90,25		Indeks Kualitas	87.01	91.00

No	RPJPN				RPJPD			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 *
		Lingkungan Hidup Daerah				Lingkungan Hidup Daerah		

Tabel 4. 2 Penyeragaman Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 Kabupaten Mamuju Tengah

No	RPJPN				RPJPD			
	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025	Target 2045	Sasaran Visi	Indikator	Baseline 2025 *	Target 2045 *
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pendapatan per kapita setara negara maju	GNI per Kapita (US\$)	5.500	23.000 - 30.300	Meningkatnya pendapatan per kapita	PDRB Per Kapita	31,69	74,05
2	Pendapatan per kapita setara negara maju	Kontribusi PDB Maritim (%)	7,6	15,0				
3	Pendapatan per kapita setara negara maju	Kontribusi PDB Manufaktur (%)	20,8	28,0	Meningkatnya pendapatan per kapita	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	9.50	11.50
4	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat Kemiskinan (%)	6,0 - 7,0	0,5 - 0,8	Berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan	Tingkat Kemiskinan	6,27	4,00
		Rasio Gini (indeks)	0,379 - 0,382	0,377 - 0,320		Gini Ratio	0.280	0.260
		Kontribusi PDRB KTI (%)	21,5 (2022)	28,5		Kontribusi PDRB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi	8.00	12.00
5	Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat	Global Power Index (peringkat)	34 (2023)	15 besar	Meningkatnya daya saing daerah	Indeks Daya Saing Daerah	3.18	3.60
6	Daya saing sumber daya manusia meningkat	Indeks Modal Manusia	0,54 (2022)	0,73	Meningkatnya daya saing sumberdaya manusia	Indeks Modal Manusia	0.45	0.65
7	Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	38,6	93,5	Berkurangnya intensitas emisi gas rumah kaca (GRK)	Potensi Penurunan Intensitas Emisi GRK	59499.59	9427921.32
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	83,00		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87.01	91.00

4.3. Misi Daerah Tahun 2025-2045

Misi dalam RPJPD ini diartikan sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh Mamuju Tengah untuk mewujudkan visi RPJPD tahun 2025-2045 dengan memperhatikan misi (agenda) Pembangunan Nasional dalam RPJPN Tahun 2025-2045. Adapun rumusan misi RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2045 adalah sebagai berikut.

(1) Mewujudkan transformasi sosial

Transformasi sosial merupakan upaya umum untuk mewujudkan manusia sehat dan cerdas agar menjelma aktor-aktor pembangunan yang unggul dalam mengelola potensi daerah serta menikmati kesejahteraan sosial. Misi ini meliputi upaya umum untuk meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan kualitas pendidikan, dan mewujudkan kesejahteraan social sehingga terwujud manusia unggul.

(2) Mewujudkan transformasi ekonomi

Transformasi ekonomi merupakan upaya umum untuk mentransformasikan perekonomian daerah agar tercapai produktivitas daerah yang tinggi melalui penerapan inovasi iptek, pengembangan ekonomi produktif, transformasi digital, kerjasama antar daerah, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baik berbasis perkebunan sawit maupun berbasis komoditas non sawit. Muara dari transformasi ekonomi adalah terwujudnya kesejahteraan ekonomi yang inklusif.

(3) Mewujudkan transformasi tata kelola

Transformasi tata kelola pada dasarnya adalah upaya untuk mendorong penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan supremasi hukum dalam pengurusan sector public di Mamuju Tengah, termasuk dalam interaksi sector publik tersebut dengan sector swasta dan sector masyarakat sipil. Misi ini mencakup upaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik secara merata, pengembangan inovasi daerah dalam pemerintahan maupun perekonomian masyarakat, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik, serta penguatan partisipasi masyarakat sipil.

(4) Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah

Misi ini mencakup pada upaya umum dalam mewujudkan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, meredam konflik SARA, perwujudan demokrasi substansial dalam kehidupan sosial politik, dan peningkatan stabilitas ekonomi makro daerah.

(5) Memelihara ketahanan sosial-budaya dan ekologi

Misi ini berfokus pada upaya umum dalam meningkatkan ketahanan yang tercipta melalui interaksi seimbang antara realitas sosial-budaya dan realitas ekologi dalam mewujudkan ketahanan untuk menghadapi berbagai konteks kerentanan berbagai bencana. Misi ini mencakup upaya dalam mewujudkan keluarga berkualitas dan keluarga sehat, memajukan kebudayaan multi-etnik dalam daerah, mendorong relasi gender yang baik, memelihara kualitas lingkungan hidup, mematuhi RTRW dan menahan alih fungsi lahan pangan, meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana dan dampak perubahan iklim, serta mengurangi emisi GRK.

(6) Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan

Misi ini merupakan kerangka implementasi pertama dari tiga transformasi yang didorong. Misi ini mencakup upaya umum dalam mewujudkan pemerataan pembangunan di Mamuju Tengah, guna meningkatkan pemerataan

pembangunan di wilayah pesisir dan pegunungan dan menekan kesenjangan antara kecamatan wilayah ibu kota kabupaten dengan daerah kecamatan perbatasan kabupaten. Misi ini juga mencakup upaya umum dalam mendorong kemajuan wilayah berdasarkan karakteristik dan potensinya. Dengan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan maka transformasi yang di dorong lebih mudah terimplementasikan.

(7) Memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan

Misi ini juga merupakan bagian dari kerangka implementasi dari tiga transformasi. Misi ini mencakup upaya umum dalam pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar dan sarana prasarana wilayah. Misi ini juga memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dibangun memenuhi standar kualitas dan ramah lingkungan sehingga bisa lebih mendukung dalam berlangsungnya transformasi Mamuju Tengah.

(8) Meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan

Misi ini merupakan kerangka implementasi ketiga. Misi ini merupakan upaya umum untuk lebih meningkatkan daya saing daerah Mamuju Tengah yang selama ini potensi sumber daya alamnya telah menempatkannya sebagai wilayah tujuan investasi perkebunan sawit. Misi ini meliputi upaya untuk meningkatkan daya saing SDM pada usia muda melalui kemampuan membaca, berhitung dan sains serta literasi digital sebagai unsur kualitas pendidikan; daya saing ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau dan ekonomi inklusif; daya saing infrastruktur/sarana prasarana melalui peningkatan kualitas layanan infrastruktur/sarana prasarana dengan memperhatikan kebutuhan wilayah secara spesifik; daya saing investasi melalui pemeliharaan situasi ketertiban dan ketenteraman umum yang kondusif.

Misi pertama, kedua dan ketiga merupakan transformasi pembangunan Mamuju Tengah, Misi empat dan misi lima merupakan landasan bagi penyelenggaraan transformasi pembangunan, sedangkan misi enam, tujuh dan delapan merupakan kerangka implementasi dari tiga transformasi pembangunan.

Masing-masing misi ini saling terkait satu sama lain dalam mendorong perwujudan visi daerah. Namun demikian, setiap misi memiliki kontribusi dominan dalam perwujudan pokok visi tertentu. Pokok visi maju dominan dikontribusi oleh misi kedua dan ketiga sebagai transformasi pembangunan, misi ke empat yang menjadi landasan transformasi dan misi ke enam yang menjadi kerangka implementasi; pokok visi berdaya saing dominan dikontribusi oleh pokok misi satu sebagai transformasi dan misi ketujuh sebagai kerangka implementasi; sementara pokok visi berkelanjutan dominan dikontribusi oleh misi ke lima sebagai landasan transformasi dan misi delapan sebagai kerangka implementasi.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Pentahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan. Pada tahap pertama periode 2025-2029 difokuskan pada peletakan pondasi transformasi, transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola. Tahap kedua periode 2030-2034 difokuskan pada penguatan dan akselerasi transformasi pembangunan. Pada tahap ke tiga periode 2035-2039 difokuskan pada perluasan arah kebijakan. Pada tahap keempat sebagai tahap akhir periode 2040-2045 merupakan perwujudan Mamuju Tengah Maju, Berdaya Saing dan Berkelanjutan dalam Ekosistem Agropolitan yang mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045.

5.1.1 Tahapan Arah Kebijakan dalam Lima Tahunan

Dalam mendukung perwujudan Visi Indonesia Emas 2045, dilakukan penahapan per 5 (lima) tahun dengan mengikuti fokus pembangunan pada RPJPN Tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025-2045 yang disesuaikan dengan karakteristik daerah. Penahapan pembangunan dalam jangka panjang dilakukan secara terukur dan konsisten untuk mencapai Visi Kabupaten Mamuju Tengah dan untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045.

a. Arah Kebijakan Periode 2025-2029

Arah kebijakan tahap pertama dari RPJPD Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2029 difokuskan pada penguatan fondasi transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada 5,6-6,1 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial. Transformasi ekonomi diarahkan untuk penguatan fondasi transformasi dalam rangka pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui penguatan peran industri pengolahan yang difokuskan pada peningkatan produktivitas daerah. Transformasi tata kelola difokuskan pada peningkatan fondasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dan digitalisasi pelayanan publik. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap pertama diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan. Pada pembangunan ketahanan sosial budaya dan ekologi, penguatan fondasi diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Sedangkan pembangunan wilayah pada tahap ini difokuskan untuk peningkatan pembangunan wilayah Sulawesi Barat yang difokuskan pada peningkatan kualitas infrastruktur wilayah khususnya yang mendukung konektivitas antar wilayah dalam mendukung pengembangan IKN.

b. Arah Kebijakan Periode 2030-2034

Tahapan kedua (2030-2034) adalah akselerasi transformasi yang diartikan bahwa telah terwujud fondasi pembangunan yang kuat. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada 6,9 – 7,8 persen per tahun.

Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan pembangunan manusia yang inklusif dan percepatan pembangunan SDM berkualitas. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas daerah dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Transformasi tata kelola difokuskan pada penguatan pondasi dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dalam rangka perwujudan ASN yang berkompoten dan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi.

Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap pertama diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi diarahkan pada peningkatan kualitas lingkungan dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju yang didukung oleh penguatan upaya pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan dan percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar

c. Arah Kebijakan Periode 2035-2039

Tahapan ketiga (2035-2039) adalah tahapan perluasan transformasi. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada 6,4 – 7,6 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada penguatan daya saing SDM menjadi semakin produktif dan inovatif serta keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Transformasi ekonomi difokuskan pada percepatan peningkatan produktivitas daerah melalui peningkatan daya saing yang tinggi dan penguatan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya kelembagaan yang adaptif dalam rangka penguatan tata kelola pemerintahan yang baik yang diarahkan pada peningkatan kualitas ASN dalam rangka perwujudan ASN yang berkompoten dan didukung oleh peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis digitalisasi. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap pertama diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi difokuskan pada terwujudnya manusia, keluarga dan masyarakat yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan inklusif, pengembangan dan penerapan instrument kebijakan ekonomi hijau dan biru yang komprehensif; penerapan dan pengembangan teknologi untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi; serta pengurangan pencemaran lingkungan dan penanganan limbah yang terkelola dengan baik di perkotaan. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada peningkatan infrastruktur berkelanjutan, khususnya peningkatan konektivitas berskala dan berkualitas internasional serta pemenuhan akses dan kualitas pelayanan dasar secara merata.

d. Arah Kebijakan Periode 2040-2045

Tahapan keempat (2040-2045) adalah Kabupaten Mamuju Tengah berhasil mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Pada tahap ini, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan berada pada 5,4 – 6,7 persen per tahun. Transformasi sosial dititikberatkan pada perwujudan manusia Kabupaten Mamuju

Tengah yang sejahtera, adaptif, berakhlak mulia, berbudaya maju, unggul dan berdaya saing. Transformasi ekonomi difokuskan pada perwujudan Kabupaten Mamuju Tengah sebagai Kabupaten yang memiliki pendapatan yang mengalami peningkatan pada setiap tahap pembangunan. Transformasi tata kelola difokuskan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Pada pembangunan supremasi hukum, stabilitas dan kepemimpinan tahap keempat diarahkan pada penguatan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dan penguatan peran masyarakat. Pada pembangunan ketahanan sosial, budaya dan ekologi, penguatan pondasi difokuskan pada terwujudnya ketangguhan manusia, keluarga dan masyarakat dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana; memastikan setiap individu dapat hidup berkualitas, berdaya dan mampu berkontribusi dalam pembangunan secara inklusif; Kabupaten Mamuju Tengah juga perlu menerapkan ekonomi hijau dan biru, lingkungan hidup berkualitas baik, penerapan energi bersih di seluruh sektor pembangunan, produk pangan dan produk olahan pangan mendunia dan penurunan emisi GRK menuju pencapaian net zero emission. Sedangkan pembangunan wilayah difokuskan pada menjaga ketersediaan infrastruktur dan energi yang terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan dengan dukungan tata kelola kelembagaan yang andal untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas.

5.2 Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD dimaksudkan sebagai sasaran yang hendak diwujudkan pada akhir periode RPJPD yakni 2045. Sasaran pokok ini dirumuskan untuk setiap misi, dimana setiap misi merupakan upaya untuk mewujudkan pokok visi yang relevan.

5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang yang sesuai dengan karakteristik dan potensi wilayah.

Arah pembangunan Kabupaten Mamuju Tengah di bagi menjadi empat tahap yakni tahap pertama (2025-2029) merupakan perkuatan fondasi transformasi, tahapan kedua (2030-2034) merupakan tahap akselerasi transformasi, tahapan ketiga (2035-2039) merupakan tahap ekspansi dan tahap terakhir (2040-2045) merupakan tahap untuk mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Adapun arah kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah dijabarkan per periodenya pada tabel 5.1 berikut:

Tabel 5. 1 Arah Kebijakan Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
Mamuju Tengah maju, berdaya saing dan berkelanjutan dalam ekosistem agropolitan	(1) Mewujudkan Transformasi Sosial	Pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan berbasis SPM dan perlindungan sosial adaptif	Percepatan pembangunan SDM yang cerdas, terpelajar dan sehat serta terlindungi dan bebas kemiskinan berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan modal manusia sebagai aktor pembangunan yang andal	Perwujudan Manusia Mamuju Tengah yang Unggul
	(2) Mewujudkan transformasi ekonomi	Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja berbasis penguasaan iptekin	peningkatan produktivitas secara masif dan perluasan sumber pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan	Pusat kekuatan ekonomi pertanian dan UMKn dengan rantai pasok yang terintegrasi lintas daerah, lintas pulau, dan lintas nasional	Perwujudan masyarakat Mamuju Tengah berpendapatan tinggi dan makmur berbasis agropolitan
	(3) mewujudkan transformasi tata kelola	kelembagaan tepat fungsi, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, perbaikan pelayanan publik, peningkatan dan pemberdayaan masyarakat sipil	kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi daerah harmonis dan terpenuhi, pelayanan publik patuh standar, dan masyarakat sipil partisipatif	kelembagaan daerah yang adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif, dan masyarakat sipil mandiri	Perwujudan Regulasi dan tata kelola Mamuju Tengah yang berintegritas dan adaptif

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
	(4) mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Pemeliharaan keamanan dan ketertiban daerah berbasis masyarakat, iklim partai politik berintegritas, pengendalian inflasi, dan pengembangan inklusi keuangan	Ketertiban dan keamanan daerah tangguh berbasis masyarakat, peningkatan kesadaran demokrasi masyarakat dan integritas partai politik, inflasi terkendali dan keuangan inklusif	Pemeliharaan ketenteraman dan kenyamanan hidup masyarakat, kehidupan politik sehat dan masyarakat melek demokrasi, inflasi rendah dan pajak yang rasional	Perwujudan keamanan daerah dan stabilitas ekonomi makro yang menjamin masyarakat Mamuju Tengah hidup tenteram dan nyaman
	(5) memelihara ketahanan sosial-budaya dan ekologi	Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan	Memantapkan ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai pendorong pembangunan sosial ekonomi yang inklusif	mewujudkan ketangguhan manusia, masyarakat, beserta alam dan lingkungan dalam menghadapi berbagai konteks kerentanan	Perwujudan Mamuju Tengah sebagai daerah tangguh dalam menghadapi kerentanan sosial-budaya, bencana dan perubahan iklim
	(6) mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	Penataan RTRW serta penataan pertanahan berkeadilan, pengelolaan urbanisasi berbasis sosio-spasial dan pengembangan pariwisata dan jasa perkotaan, pengembangan wilayah perdesaan untuk agroindustri	Perkuatan kepatuhan terhadap RTRW dan RDTR, penataan sosio-spasial perkotaan berbasis pariwisata dan jasa, integrasi pusat-pusat agropolitan dengan wilayah agroindustri.	Perluasan perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis agropolitan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis UMKM agroindustri.	Perwujudan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
		Perkuatan Fondasi Transformasi	Akselerasi Transformasi	Ekspansi Global	Perwujudan Indonesia Emas
	(7) memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pemenuhan sarana prasarana untuk konektivitas wilayah dan pelayanan dasar serta pengembangan ekosistem digital dan teknologi informasi.	Konektivitas wilayah lancar, ketercukupan sarana prasarana pelayanan dasar, pengembangan literasi digital dan teknologi informasi	Pemenuhan kualitas sarana prasarana untuk koneksi-wilayah dan pelayanan dasar serta transformasi digital efektif	Perwujudan kecukupan sarana prasarana untuk konektivitas wilayah dan pelayanan dasar serta transformasi digital
	(8) meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	Perkuatan keselarasan perencanaan daerah dan nasional, pengelolaan keuangan dan kapasitas fiskal, dan daya saing investasi untuk agropolitan	Percepatan investasi dalam pengembangan agropolitan, industri hasil pertanian dan UMKM didukung perencanaan dan penganggaran berkualitas	Perluasan kesinambungan pembangunan agropolitan ke bidang lain didukung penganggaran berkualitas dan kapasitas fiskal yang kuat	Perwujudan kesinambungan pembangunan dalam mendukung transformasi daerah.

5.2.2 Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan menggambarkan upaya transformasi penurunan dari RPJPN 2025-2045 untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional serta menggambarkan upaya transformasi yang spesifik dengan kebutuhan/karakteristik daerah dan mendukung tercapainya visi daerah.

Tabel 5. 2 Arah Kebijakan Transformasi Kabupaten Mamuju Tengah

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
1	Mewujudkan Transformasi Sosial	1. kesehatan untuk semua	perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat percepatan penanganan stunting serta percepatan eliminasi penyakit menular

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p>memenuhi kebutuhan dan pemerataan tenaga kesehatan berkualitas</p>
2. pendidikan berkualitas dan merata			percepatan wajib belajar 13 tahun
			Pemerataan kualitas antarsatuan pendidikan PAUD, SD dan SMP
			Peningkatan kualitas pendidikan kesetaraan untuk menjamin keberkerjaan lulusan.
			Perkuat pengelolaan tenaga pendidik dengan meningkatkan kualitas dan kompetensi pendidik yang modern dan adaptif khususnya dalam peningkatan capaian siswa untuk literasi, numerasi dan pengetahuan sains
3. perlindungan sosial yang adaptif			Pengentasan kemiskinan melalui perlindungan sosial adaptif terhadap nelayan kecil, petani penggarap, pekerja informal, tuna karya terutama dalam menghadapi kerentanan yang disebabkan oleh guncangan sosial ekonomi maupun guncangan alam
			peningkatan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan,
			peningkatan cakupan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu,
			peningkatan cakupan bantuan sosial terhadap penyandang disabilitas.
			Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.
			optimalisasi perencanaan dan penganggaran APBD dan APBDes, untuk pemenuhan menyeluruh terhadap SPM sosial
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan,
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana, melalui antara lain pencegahan dan penanggulangan bencana
			Pengembangan perlindungan sosial adaptif untuk daerah yang menghadapi perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung program terkait perubahan iklim.
			Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10 persen penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.
			Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah.
			Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan.
2	Mewujudkan transformasi ekonomi	4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	Peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang berkelanjutan.
			pengembangan teknologi dan efisiensi rantai distribusinya.
			Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya.
			Peningkatan kapasitas dan kerjasama pelaksanaan pendidikan dan riset berbasis bioekonomi dan bioteknologi, disertai peningkatan manajemen sumber daya.
			Peningkatan kontribusi pusat-pusat pertumbuhan baru untuk pengembangan produk unggulan (pisang dan bahan pangan lainnya) dalam mendukung pengembangan wilayah (terutama dengan IKN)
			Optimalisasi peran perdesaan dalam upaya peningkatan diversifikasi ekonomi yang inklusif.
			Peningkatan produktivitas BUMD untuk unit usaha agribisnis sawit, layanan air minum dan layanan parkir
			Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan inovasi untuk pengembangan komoditas unggulan khususnya dalam digitalisasi kegiatan UMKM dan korporasi
			Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha.
		5. penerapan ekonomi hijau	Pelaksanaan afirmasi reskilling dan upskilling bagi angkatan kerja di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, dan industri pengolahan dengan fokus pada kompetensi pengembangan ekonomi sirkuler
		6. pemenuhan sarana dan prasarana untuk transformasi digital	Pengembangan ekosistem digital, skill digital, peralatan digital dan jaringan digital dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan ekonomi daerah
		7. kerjasama ekonomi daerah	Peningkatan rantai nilai melalui penguatan kerjasama antardaerah dan pengembangan ekspor komoditas unggulan.

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
3	mewujudkan transformasi tata kelola	9. regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif	Optimasi dan harmonisasi regulasi, terutama dalam harmonisasi antar produk hukum daerah, serta peningkatan kualitas proses praregulasi.
			Pemberdayaan masyarakat sipil dan peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.
			Penguatan integritas partai politik.
			Peningkatan cepat tanggap terhadap laporan pelayanan publik masyarakat melalui sistem pengaduan dan respon pengaduan yang efektif.
			Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.
			Percepatan digitalisasi layanan publik (terutama pelayanan SPM) dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan pemerintahan digital.
			Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa
			transparansi layanan perizinan berbasis digital.
			Pengawasan proses pengembangan karier promosi mutasi ASN dengan pemanfaatan teknologi informasi.
			Pengawasan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.
			Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
			Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW kabupaten
			Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berdasarkan sasaran prioritas daerah yang diselaraskan dengan sasaran prioritas nasional.
			Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.
Pengembangan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data pembangunan.			
Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.			
4	mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	10. ketenteraman dan ketertiban serta partisipasi politik warga	Peningkatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas lokal.
			Optimalisasi ruang dialog antar etnis untuk pencegahan dan penyelesaian konflik sosial.
		11. stabilitas ekonomi makro daerah	Peningkatan kapasitas fiskal daerah
			Penguatan pengendalian inflasi daerah.
5			Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
	memelihara ketahanan sosial-budaya dan ekologi	13. kemaslahatan umat beragama dan kemajuan kebudayaan	Penguatan modal sosial untuk pemberdayaan masyarakat, preservasi budaya dan penguatan kearifan lokal, dan pengembangan pendidikan karakter sejak dini untuk mengurangi masalah sosial seperti perkawinan anak, tingkat perceraian dan perundungan
		14. peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal, terutama dalam apresiasi dan penerapan nilai lalla tassisara
			Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
			Pemberdayaan dan pelibatan perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan.
			pemberdayaan pemuda pelopor, pemuda wirausaha, pemuda kader
		15. lingkungan hidup berkualitas	Diversifikasi pangan untuk meningkatkan derajat kesehatan
			Perencanaan tata ruang berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, risiko bencana, luasan hutan, serta wilayah jelajah satwa spesies dilindungi.
			Optimalisasi perlindungan lahan pangan berkelanjutan
			Penguatan upaya pengelolaan dan mempertahankan ekosistem alami berupa kawasan konservasi untuk menjaga keberadaan hutan alam dan bakau serta menjaga luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi
			Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.
			Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.
			Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemecuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.
			Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			<p data-bbox="831 293 1361 376">pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang)</p> <p data-bbox="831 383 1361 510">Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh.</p> <p data-bbox="831 517 1361 674">Penguatan manajemen bencana, mencakup mitigasi struktural dan nonstruktural, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan adaptasi pemulihan pasca bencana dalam rangka menurunkan nilai indeks risiko bencana.</p> <p data-bbox="831 680 1361 763">Pembangunan infrastruktur tanggap bencana berbasis lingkungan dan penggunaan teknologi seperti flood early warning system.</p> <p data-bbox="831 770 1361 831">Penguatan kapasitas dan kesiapsiagaan bencana pada kelompok rentan.</p> <p data-bbox="831 837 1361 958">Pengembangan natural based solution untuk pengendalian banjir seperti perkuatan tanggul alami di sungai dan konservasi mangrove di pesisir.</p> <p data-bbox="831 965 1361 1025">Peningkatan kapasitas SDM petani dalam menerapkan pertanian cerdas iklim.</p> <p data-bbox="831 1032 1361 1093">Penerapan teknologi climate smart agriculture melalui penyediaan bibit berkualitas.</p> <p data-bbox="831 1099 1361 1182">Penguatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang dipengaruhi oleh iklim.</p> <p data-bbox="831 1189 1361 1272">Pewujudan pencegahan, penurunan, dan pengendalian penyakit serta masalah kesehatan akibat perubahan iklim</p> <p data-bbox="831 1279 1361 1339">Peningkatan kapasitas manajemen ketahanan sumberdaya air</p> <p data-bbox="831 1346 1361 1442">Penegakan standar keandalan bangunan serta peremajaan bangunan hunian yang berketahanan bencana dan iklim.</p>
6	mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan	8. pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan perkebunan	<p data-bbox="831 1449 1361 1666">Pengembangan kawasan perkotaan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakteristik wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup ke arah terwujudnya kawasan agropolitan meliputi kecamatan Tobadak, Topoyo dan sebagian Budong-budong.</p> <p data-bbox="831 1673 1361 1794">Pengembangan transportasi perkotaan termasuk sistem angkutan umum massal perkotaan dan angkutan umum antara ibukota kabupaten dengan kecamatan.</p>
7	memenuhi kecukupan sarana prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	16. pembangunan sarana prasarana ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan	<p data-bbox="831 1839 1361 1899">Penerapan upaya konservasi air hujan untuk memenuhi kebutuhan air domestik.</p> <p data-bbox="831 1906 1361 1993">Pengembangan dan pengelolaan irigasi untuk menunjang sawah beririgasi produktif eksisting dan sawah potensial</p>

No	Misi	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi Daerah
			Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW (Food, Energy, and Water) Nexus.
			Pengembangan bauran energi antara energi konvensional dengan energi baru dan terbarukan
			Pembangunan tampungan air serba guna yang memberikan manfaat secara cepat bagi kebutuhan air sehari-hari masyarakat.
			Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.
			Persiapan lembaga pelaksana penyelenggara SPAM yang berkinerja baik dan optimal.
			Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum.
			Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum yang berkinerja baik dan optimal.
			Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.
			Pengelolaan sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman pada daerah rawan air.
8	meningkatkan daya saing daerah untuk kesinambungan pembangunan	12. meningkatkan daya saing daerah dan kesinambungan pembangunan	Penguatan kerja sama antardaerah dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Provinsi Sulawesi Barat
			Penuntasan RDTR kabupaten serta kewenangan tata ruang laut.
			Peningkatan pelaksanaan reforma agraria disertai dengan penanganan konflik lahan
			Pemanfaatan ALKI II secara optimal untuk menghubungkan rantai pasok/ nilai domestik dan global
			Dukungan pengembangan konektivitas feeder angkutan laut termasuk melalui pembangunan infrastruktur dan sarana kapal RoRo (Roll-On/Roll-Off) angkutan barang sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh Wilayah Sulawesi.

5.1.1 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator utama pembangunan daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan daerah serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional jangka panjang. Indikator utama pembangunan dijabarkan dalam 45 (empat puluh lima) indikator.

Tabel 5. 3 Indikator Utama Pembangunan Daerah

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan	
				Baseline 2025	Target 2045		
1	terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan individu dan masyarakat yang cerdas dan terpelajar	1. kesehatan untuk semua	1. UHH	70,05	78,6	Tahun	
			2. Kesehatan Ibu dan Anak:				
			a. angka kematian ibu	18,60	10,00	Orang	
			b. prevalensi stunting	28,06	10,00	%	
			3. penanganan tuber kulosis:				
			a. cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	100	100	%	
			b. angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	100	100	%	
			4. cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	86,00	95,00	%	
		2. pendidikan berkualitas dan merata	5. Hasil pembelajaran:				
			a. persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional:				
			i) literasi membaca				
			SD	55,28	70,00		
			SMP	68,69	82,00		
			ii) numerasi				
			SD	41,72	60,00		
			SMP	64,72	77,00		
			c. harapan lama sekolah	12,80	16,00		
			6. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi	13,00	25,00	% (BPS)	
			7. rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	7,93	13,00	Tahun	
			3. perlindungan sosial yang adaptif	8. Tingkat Kemiskinan (%)	7,72	1,16	7,73 (2023)
9. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial	82,00	92,00		%			

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			Ketenagakerjaan kabupaten (%)			
			10. Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)	0,5	2,00	%
2	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan	4. Iptek, inovasi dan produktivitas ekonomi	11. Rasio PDRB industri pengolahan (%)	9,50	11,50	%
			12. Rasio PDRB Penyediaan akomodasi Makan dan minum	0,25	1,00	%
			13. Jumlah Industri Ekonomi Kreatif di Kabupaten	238	320	industri
			14. Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD:	1,67	3,00	
			a. Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota			
			b. Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	332	450	
			c. Jumlah Orang yang Berusaha dibantu Buruh Tetap	747	850	orang
			d. Persentase Koperasi Sehat di Kab/Kota	50	70	persen
			15. Tingkat pengangguran terbuka (%)	1,70	1,30	persen
			16. Proporsi penciptaan lapangan kerja formal			%
			17. Indeks Inovasi Daerah	58,95	63,5	angka
			5. pemenuhan sarana dan prasaran untuk	19. Indeks Masyarakat Digital		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan	
				Baseline 2025	Target 2045		
		transformasi digital					
		7. Integrasi Ekonomi Regional dan Nasional	20. Persentase Koefisien variasi harga antar waktu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting			%	
			21. pembentukan modal tetap bruto	24,77	26,00	% PDRB	
			22. ekspor barang dan jasa	-1,04	3,00	% PDRB	
3	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah terdepan dalam penerapan tata kelola yang adaptif	9. regulasi tata kelola yang berintegritas dan adaptif	24. Indeks reformasi hukum	61,00	75,00	96, 38 (2024)	
			25. indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2,5	4,50	Indeks	
			26. indeks pelayanan publik	2.73	5.00	Indeks	
			27. indeks integritas daerah				
			a. Indeks Survey Penilaian Integritas	68,21	85,00	indeks	
			b. Nilai MCP KPK	30,51	80,00	angka	
			c. Indeks Maturitas SPIP	Level 3 (3,017)	4,5	indeks	
4	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah yang stabil dan demokratis	10. ketenteraman dan ketertiban serta partisipasi politik warga	28. persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	100	100	%	
			29. Persentase penurunan angka kriminalitas	30	90	%	
			30. a. Persentase unjuk rasa yang aman dan damai	80	100	%	
			b. Perda yang merupakan inisiatif DPRD	10	35	Perda	
			c. Persentase Perempuan pengurus partai politik	20	35	%	
			11. stabilitas ekonomi makro daerah	31. rasio pajak daerah terhadap PDRB (%)	0,46	1,00	%
				32. Tingkat Inflasi	1,8	1,49	indeks

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan		
				Baseline 2025	Target 2045			
			33. Pertumbuhan Investasi Daerah	9,00	25,00	persen		
			34. Indeks inklusi keuangan	85,69	95,00	indeks		
5	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tagguh menghadapi bencana.	13. kemaslahatan umat beragama dan kemajuan kebudayaan	37. persentase benda, bangunan, struktur dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan terhadap total registrasi	4,35	13,00	persen		
			38. indeks kerukunan umat beragama	76,11	83,00	indeks		
			39. indeks pembangunan kualitas keluarga	63,59	75,00	Indeks		
		14. peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif	40. indeks ketimpangan gender	0,47	0,70	Indeks		
			15. lingkungan hidup berkualitas	41. indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0,540	0,598	indeks	
				42. Kualitas lingkungan hidup:				
				a. Indeks kualitas lingkungan hidup daerah	78,71 (2022)	91,00	Indeks	
				b. rumah tangga dengan akses sanitasi aman	86,39	96,00	persen	
				c. Pengelolaan Sampah:				
				- Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	5110	7000	Ton	
				- Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	13	75	persen	
				17. penguatan resiliensi terhadap dampak bencana dan dampak perubahan iklim.	44. Indeks risiko bencana	161,71 (2022)		Indeks
					45. Indeks penurunan emisi GRK (%)			
					a. Kumulatif	59499,59	9427921,32	Ton CO ₂

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator Utama Pembangunan	Target		Keterangan
				Baseline 2025	Target 2045	
			b. Tahunan			Ton CO ₂
6	Terwujudnya keseimbangan perkembangan perdesaan dan perkotaan .	8. pengembangan perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis industri pengolahan perkebunan	23. Persentase desa mandiri (%)	12,96	35,18	
7	terpenuhinya ketahanan energi, air dan pangan serta ekosistem digital.	16. pembangunan sarana prasarana ketahanan energi, ketahanan air dan kemandirian pangan	43. Ketahanan Energi, air dan pangan:			
			a. Konsumsi Listrik Per kapita	377	2930,0	kWh
			b. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan			
			- skor pola pangan harapan	84,00	83,95	Poin
			- Indeks Ketahanan Pangan	78,00	83,95	Indeks
			c. Ketahanan Air:			
- jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	94	100	%			
8	terwujudnya kesinambungan pembangunan.	12. meningkatkan daya saing daerah dan kesinambungan pembangunan	35. indeks daya saing daerah	3,18	3,60	Indeks
			36. Jumlah kerjasama daerah	5	15	Angka

Tabel 5. 4 Kertas Kerja Perumusan Sasaran Pokok

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Transformasi	3367	Kesehatan untuk Semua	Transformasi Sosial	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	IUP- Usia Harapan Hidup	70.05	78.6	terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan individu dan masyarakat yang cerdas dan terpelajar	
2				Transformasi Sosial	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	a) Angka Kematian Ibu	18.6	10.0		
3				Transformasi Sosial	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting	28.06	10.0		
4				Transformasi Sosial	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	100	100		
5				Transformasi Sosial	b) Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	100	100		
6				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	IUP- cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	86.00	95.00		
7				Transformasi Sosial	i) Literasi Membaca	literasi membaca SD	55.28	70.00		
8				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SD	41.72	60.00		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
9				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SMP	64.72	77.00		
10				Transformasi Sosial	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8.00	13.00		
11				Transformasi Sosial	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	c. harapan lama sekolah	12.86	16.00		
12				Transformasi Sosial	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13.00	25.00		
13				Transformasi Sosial	Tingkat Kemiskinan (%)	IUP- Tingkat kemiskinan	7.60	1.16		
14				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	82.00	92.00		
15				Transformasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	0.7	2.00		
16		3376	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Transformasi Sosial	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	IUP- Usia Harapan Hidup	70.05	78.6		
17				Transformasi Sosial	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	a) Angka Kematian Ibu	18.6	10.0		
18				Transformasi Sosial	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting	28.06	10.0		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
19				Transformasi Sosial	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	100	100		
20				Transformasi Sosial	b) Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	100	100		
21				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	IUP- cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	86.00	95.00		
22				Transformasi Sosial	i) Literasi Membaca	literasi membaca SD	55.28	70.00		
23				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SD	41.72	60.00		
24				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SMP	64.72	77.00		
25				Transformasi Sosial	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8.00	13.00		
26				Transformasi Sosial	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	c. harapan lama sekolah	12.86	16.00		
27				Transformasi Sosial	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13.00	25.00		
28				Transformasi Sosial	Tingkat Kemiskinan (%)	IUP- Tingkat kemiskinan	7.60	1.16		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
29				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	82.00	92.00		
30				Transformasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	0.7	2.00		
31		3388	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Transformasi Sosial	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	IUP- Usia Harapan Hidup	70.05	78.6		
32				Transformasi Sosial	a) Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	a) Angka Kematian Ibu	18.6	10.0		
33				Transformasi Sosial	b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting	28.06	10.0		
34				Transformasi Sosial	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	100	100		
35				Transformasi Sosial	b) Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	100	100		
36				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	IUP- cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	86.00	95.00		
37				Transformasi Sosial	i) Literasi Membaca	literasi membaca SD	55.28	70.00		
38				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SD	41.72	60.00		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
39				Transformasi Sosial	ii) Numerasi	numerasi SMP	64.72	77.00		
40				Transformasi Sosial	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8.00	13.00		
41				Transformasi Sosial	c) Harapan Lama Sekolah (tahun)	c. harapan lama sekolah	12.86	16.00		
42				Transformasi Sosial	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13.00	25.00		
43				Transformasi Sosial	Tingkat Kemiskinan (%)	IUP- Tingkat kemiskinan	7.60	1.16		
44				Transformasi Sosial	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	82.00	92.00		
45				Transformasi Sosial	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	0.7	2.00		
46		3393	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Transformasi Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	IUP- Rasio PDRB industri pengolahan	9.50	11.50	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan	
47				Transformasi Ekonomi	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)	IUP- Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	0.25	1.00		
48				Transformasi Ekonomi	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
49				Transformasi Ekonomi	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	111	111		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
50				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	jumlah industri kecil dan menengah pada level Kab/Kota	340	450		
51				Transformasi Ekonomi	c) Rasio kewirausahaan daerah (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
52				Transformasi Ekonomi	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase koperasi sehat di kab/kota	50	70		
53				Transformasi Ekonomi	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.70	1.30		
54				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap	750	850		
55				Transformasi Ekonomi	Tingkat Penguasaan IPTEK	Indeks Inovasi Daerah	59.30	63.5		
56				Transformasi Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	IUP- pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	24.78	26.00		
57				Transformasi Ekonomi	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	IUP- ekspor barang dan jasa	2.09	3.00		
58		3409	Penerapan Ekonomi Hijau	Transformasi Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	IUP- Rasio PDRB industri pengolahan	9.50	11.50	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan	
59				Transformasi Ekonomi	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)	IUP- Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	0.25	1.00		
60				Transformasi Ekonomi	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
61				Transformasi Ekonomi	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	111	111		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
62				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	jumlah industri kecil dan menengah pada level Kab/Kota	340	450		
63				Transformasi Ekonomi	c) Rasio kewirausahaan daerah (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
64				Transformasi Ekonomi	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase koperasi sehat di kab/kota	50	70		
65				Transformasi Ekonomi	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.70	1.30		
66				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap	750	850		
67				Transformasi Ekonomi	Tingkat Penguasaan IPTEK	Indeks Inovasi Daerah	59.30	63.5		
68				Transformasi Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	IUP- pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	24.78	26.00		
69				Transformasi Ekonomi	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	IUP- ekspor barang dan jasa	2.09	3.00		
70		3415	Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Transformasi Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	IUP- Rasio PDRB industri pengolahan	9.50	11.50		
71				Transformasi Ekonomi	a) Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)	IUP- Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	0.25	1.00		
72				Transformasi Ekonomi	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
73				Transformasi Ekonomi	a) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	111	111		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
74				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	jumlah industri kecil dan menengah pada level Kab/Kota	340	450		
75				Transformasi Ekonomi	c) Rasio kewirausahaan daerah (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	320		
76				Transformasi Ekonomi	d) Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase koperasi sehat di kab/kota	50	70		
77				Transformasi Ekonomi	a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.70	1.30		
78				Transformasi Ekonomi	b) Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap	750	850		
79				Transformasi Ekonomi	Tingkat Penguasaan IPTEK	Indeks Inovasi Daerah	59.30	63.5		
80				Transformasi Ekonomi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	IUP- pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	24.78	26.00		
81				Transformasi Ekonomi	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	IUP- ekspor barang dan jasa	2.09	3.00		
82		3425	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Transformasi Tata Kelola	Indeks Reformasi Hukum	IUP- Indeks reformasi hukum	96.38	100	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah terdepan dalam penerapan tata kelola yang adaptif	
83				Transformasi Tata Kelola	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	IUP- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.35	4.50		
84				Transformasi Tata Kelola	Indeks Pelayanan Publik	IUP- Indeks pelayanan publik	2.85	5.00		
85				Transformasi Tata Kelola	Indeks Integritas Nasional	persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	100	100		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan	
							Baseline 2025	Target 2045			
86	Landasan Transformasi	3432	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	IUP- rasio pajak daerah terhadap PDRB	0.50	1.00	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah yang stabil dan demokratis		
87				Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi (%)	IUP- tingkat inflasi	1.49	1.49			
88				Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Inklusi Keuangan (%)	IUP- inklusi keuangan	85.69	95.00			
89		3436	Stabilitas Ekonomi Makro	Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	IUP- rasio pajak daerah terhadap PDRB	0.50	1.00			
90				Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Tingkat Inflasi (%)	IUP- tingkat inflasi	1.49	1.49			
91				Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial, dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah	Inklusi Keuangan (%)	IUP- inklusi keuangan	85.69	95.00			
92		3452	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	IUP- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65.00	75.00		Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tagguh	
93				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IUP- Indeks ketimpangan gender	0.50	0.70			

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
94				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	IUP- Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0.540	0.598		
95				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87.01	91.00		
96				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	b) rumah tangga dengan akses sanitasi aman	87.00	96.00		
97				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	5110	7000		
98				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Proporsi Rumah Tangga (IRT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Proporsi rumah tanggadengan layanan penuh pengumpulan sampah	13	75		
99				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IUP- indeks risiko bencana	154.47	100.00		
100				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a. Kumulatif	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	59499.59	9427921.32		
101		3455	Lingkungan Hidup Berkualitas	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	IUP- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65.00	75.00	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tangguh	
102				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IUP- Indeks ketimpangan gender	0.50	0.70		
103				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	IUP- Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0.540	0.598		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
104				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87.01	91.00		
105				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	b) rumah tangga dengan akses sanitasi aman	87.00	96.00		
106				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	5110	7000		
107				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Proporsi Rumah Tangga (IRT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Proporsi rumah tanggadengan layanan penuh pengumpulan sampah	13	75		
108				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IUP- indeks risiko bencana	154.47	100.00		
109				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a. Kumulatif	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	59499.59	9427921.32		
110		3472	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	IUP- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65.00	75.00	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tangguh	
111				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IUP- Indeks ketimpangan gender	0.45	0.25		
112				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	IUP- Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0.540	0.598		
113				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87.01	91.00		

No	Transformasi	IE	Arah Pembangunan	Arah Kebijakan Transformasi menurut provinsi	Indikator Utama Pembangunan	Indikator Daerah	Target		Sasaran Pokok	Keterangan
							Baseline 2025	Target 2045		
114				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	b) Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	b) rumah tangga dengan akses sanitasi aman	87.00	96.00		
115				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	5110	7000		
116				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	- Proporsi Rumah Tangga (IRT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Proporsi rumah tanggadengan layanan penuh pengumpulan sampah	13	75		
117				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Indeks Risiko Bencana (IRB)	IUP- indeks risiko bencana	154.47	100.00		
118				Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	a. Kumulatif	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	59499.59	9427921.32		
119	Kerangka Implementasi Transformasi	3419	Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan	c) Persentase Desa Mandiri (%)	IUP- Persentase desa mandiri	12.96	35.18	Terwujudnya keseimbangan perkembangan perdesaan dan perkotaan	
120		3463	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	- Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Konsumsi Listrik Per Kapita	377	2930.0	terpenuhinya ketahanan energi, air dan pangan serta ekosistem digital	
121				Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	b. Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Indeks Ketahanan Pangan	78	83.95		
122				Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan	- Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	b) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	84	100		
123	Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan			- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari- hari	100	100			

Dengan mengacu pada Visi, Misi dan Arah Pembangunan, Arah Kebijakan transformasi dan Indikator Utama Pembangun jangka panjang Kabupaten Mamuju Tengah, maka ditetapkan 8 (delapan) sasaran pokok yang ingin dicapai dalam 20 tahun ke depan, yaitu:

1. Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan individu dan masyarakat yang cerdas dan terpelajar. Sasaran ini fokus pada Memperluas akses pendidikan yang merata dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jenjang, termasuk pendidikan formal dan non-formal, untuk menciptakan masyarakat yang berpengetahuan dan berdaya saing; Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan, pendidikan vokasional, dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan perkembangan teknologi; Meningkatkan layanan kesehatan dan gizi masyarakat untuk mendukung perkembangan fisik dan mental yang optimal, sebagai dasar bagi terciptanya individu yang cerdas dan produktif; Menanamkan nilai-nilai budaya lokal dan nasional serta membentuk karakter yang kuat melalui pendidikan dan kegiatan sosial budaya, guna menciptakan masyarakat yang beretika dan bertanggung jawab; Mendorong pemanfaatan TIK dalam pendidikan dan kehidupan sehari-hari untuk meningkatkan literasi digital dan akses informasi yang luas; Melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan melalui program-program pemberdayaan yang meningkatkan partisipasi dan kemandirian masyarakat.
2. Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan. Sasaran ini fokus pada pengembangan kawasan perkebunan dan agroindustri. Pengembangan kawasan ini diarahkan untuk mendukung kegiatan agroindustri dan meningkatkan produksi bahan baku industri pengolahan; peningkatan infrastruktur dan sarana pendukung. Pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, dan fasilitas lainnya guna mendukung kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan. Hal ini bertujuan untuk menarik investasi dan mempermudah distribusi produk; peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Untuk mendukung industri pengolahan, peningkatan kualitas SDM menjadi prioritas. Program pelatihan dan pendidikan vokasional di bidang agroindustri akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor ini; peningkatan nilai tambah produk. Dengan mengembangkan industri pengolahan, diharapkan produk perkebunan tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dalam bentuk produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani dan kontribusi sektor perkebunan terhadap perekonomian daerah; kemitraan dan kelembagaan. Pemerintah daerah mendorong kemitraan antara petani, koperasi, dan pelaku industri untuk menciptakan rantai pasok yang efisien dan berkelanjutan. Penguatan kelembagaan petani juga menjadi fokus untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing mereka. Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah berupaya untuk menjadi sentra industri pengolahan hasil perkebunan yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, dan memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat lokal
3. Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah terdepan dalam penerapan tata kelola yang adaptif. Sasaran pokok ini fokus pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif. Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berupaya mengembangkan sistem tata kelola yang mampu merespons perubahan dengan cepat dan efektif. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan regulasi yang fleksibel, dan penerapan prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas,

dan partisipasi masyarakat; Digitalisasi layanan publik. Sebagai bagian dari transformasi tata kelola, digitalisasi layanan publik menjadi prioritas. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, termasuk melalui pengembangan platform layanan daring dan sistem informasi manajemen yang terintegrasi; peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Untuk mendukung tata kelola yang adaptif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) aparatur sipil negara menjadi fokus utama. Program pelatihan dan pengembangan kompetensi dirancang untuk membekali pegawai dengan keterampilan yang relevan dalam menghadapi dinamika perubahan dan tantangan pembangunan; kolaborasi dan kemitraan strategis. Pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga pendidikan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menciptakan sinergi dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, serta mendorong inovasi dalam tata kelola pemerintahan; Monitoring dan evaluasi berbasis data. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi yang berbasis data menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi program pembangunan. Data yang akurat dan terkini digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat, serta untuk menilai kinerja dan dampak kebijakan secara objektif. Dengan strategi-strategi tersebut, Kabupaten Mamuju Tengah berupaya menjadi contoh dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang adaptif, mampu menghadapi tantangan masa depan, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat

4. Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah yang stabil dan demokratis, diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang kuat, inklusif, partisipatif serta masyarakat yang harmonis dan sadar hukum. Fokus sasaran ini adalah penguatan stabilitas sosial dan politik dengan memperkuat peran aparat keamanan, tokoh masyarakat, dan lembaga adat dalam pencegahan konflik sosial, mendorong terciptanya masyarakat yang toleran, inklusif, dan menghormati keberagaman, membangun sistem deteksi dini terhadap potensi konflik dan memperkuat forum komunikasi masyarakat; Peningkatan Kualitas Demokrasi dengan memastikan pelaksanaan pemilu dan pilkada yang jujur, adil, dan transparan, meningkatkan partisipasi politik masyarakat, termasuk kelompok marginal seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas, mengembangkan ruang-ruang partisipasi publik dalam perumusan kebijakan, seperti musrenbang yang inklusif dan konsultatif; Penegakan Hukum dan HAM dengan menguatkan lembaga penegak hukum lokal serta mendorong sistem peradilan yang adil dan akuntabel, menjamin perlindungan hak asasi manusia dan hak-hak sipil masyarakat, mendorong akses keadilan yang lebih luas, terutama untuk masyarakat miskin dan kelompok rentan; Tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan dengan meningkatkan akuntabilitas birokrasi melalui reformasi birokrasi dan sistem pengawasan internal, menerapkan sistem e-government untuk memperkuat transparansi anggaran dan layanan publik, memperkuat fungsi DPRD sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kontrol secara efektif; Pendidikan demokrasi dan kesadaran warga negara dengan meningkatkan literasi demokrasi dan hukum melalui pendidikan formal dan non-formal, mengembangkan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan di sekolah dan masyarakat umum.
5. Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tangguh bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, saling menghargai serta memiliki identitas budaya yang kuat dan berdaya

saing. Sasaran ini fokus pada penguatan masyarakat inklusif melalui peningkatan kesetaraan terhadap akses pendidikan, kesehatan dan ekonomi bagi seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, termasuk perempuan, disabilitas, lansia dan kelompok adat., pemberdayaan komunitas lokal melalui partisipasi aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, penguatan solidaritas sosial antar warga untuk menciptakan lingkungan yang harmonis, toleran dan bebas dari konflik sosial; Pelestarian pengembangan kebudayaan daerah melalui Pendataan dan pelestarian warisan budaya lokal, baik berupa tradisi, bahasa daerah, seni, dan adat istiadat, pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya, seperti kerajinan, kuliner, dan pertunjukan seni tradisional, peningkatan kapasitas pelaku seni dan budaya melalui pelatihan, festival budaya, dan ruang ekspresi kreatif yang didukung oleh pemerintah daerah; Penguatan lembaga adat dan budaya melalui revitalisasi peran lembaga adat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan menyelesaikan konflik secara musyawarah, kolaborasi antara lembaga adat, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam pelestarian budaya dan peningkatan kualitas hidup berbasis kearifan lokal; Pengembangan infrastruktur budaya melalui Pembangunan fasilitas kebudayaan, seperti taman budaya, museum daerah, sanggar seni, dan pusat pelatihan budaya, Digitalisasi dan promosi budaya lokal melalui media digital agar dikenal secara nasional dan internasional.

6. Terwujudnya keseimbangan perkembangan perdesaan dan perkotaan diarahkan untuk menciptakan pembangunan yang merata, berkeadilan, dan saling menguatkan antara wilayah kota dan desa. Tujuannya adalah agar seluruh masyarakat, baik di desa maupun kota, mendapatkan akses setara terhadap pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan kualitas hidup yang layak. Sasaran ini dijabarkan menjadi Pembangunan infrastruktur wilayah yang merata; penguatan kapasitas dan ekonomi perdesaan; pengendalian dan penataan perkotaan yang berkelanjutan; pelayanan publik yang setara dan inklusif; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan wilayah.
7. Terpenuhinya ketahanan energi, air dan pangan serta ekosistem digital diarahkan untuk menciptakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, serta tantangan global teknologi. Ketahanan energi melalui Pengembangan energi terbarukan lokal (PLTS, mikrohidro, bioenergi) untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperluas akses energi ke wilayah terpencil, Peningkatan efisiensi energi di sektor pemerintahan, industri, dan rumah tangga melalui edukasi dan teknologi hemat energi, Pembangunan infrastruktur energi seperti jaringan listrik pedesaan dan penyimpanan energi untuk menjamin ketersediaan energi yang andal dan berkelanjutan; Ketahanan Air melalui Konservasi dan rehabilitasi daerah aliran sungai (DAS) untuk menjamin ketersediaan air bersih secara berkelanjutan, Pengembangan sistem irigasi dan jaringan air bersih yang efisien dan berkelanjutan untuk mendukung kebutuhan rumah tangga dan pertanian, Penguatan kelembagaan pengelolaan sumber daya air, termasuk peran aktif masyarakat dalam menjaga sumber air dan sanitasi lingkungan; Ketahanan Pangan melalui Peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan lokal dengan sistem budidaya berkelanjutan dan teknologi tepat guna. Pengembangan cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi krisis pangan akibat bencana atau gangguan distribusi. Penguatan rantai pasok pangan lokal dan pengolahan hasil pertanian agar bernilai tambah serta terjangkau bagi masyarakat. Diversifikasi pangan lokal untuk mendorong konsumsi pangan bergizi dan

menurunkan ketergantungan pada komoditas impor; Pembangunan ekosistem digital melalui Peningkatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) di seluruh wilayah, termasuk akses internet berkualitas dan terjangkau Transformasi digital layanan publik dan ekonomi, seperti e-government, UMKM digital, dan pertanian berbasis IoT (Internet of Things), Penguatan literasi digital masyarakat, terutama bagi pelajar, pelaku usaha, dan ASN, untuk memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman, Kolaborasi dengan sektor swasta dan pendidikan tinggi dalam pengembangan inovasi digital dan inkubasi startup lokal.

8. Menjaga kesinambungan pembangunan bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berlangsung secara konsisten, berkelanjutan, dan mampu menjawab kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang melalui perencanaan jangka panjang yang terpadu dan konsisten, peningkatan kapasitas dan profesionalisme pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan keberlanjutan sosial serta penguatan investasi dan pembiayaan berkelanjutan.

Tabel 5. 5 Sasaran Pokok Pembangunan Tahun 2025-2045

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator		Target					Keterangan
			Utama	Daerah	Baseline 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan individu dan masyarakat yang cerdas dan terpelajar	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)	IUP- Usia Harapan Hidup	70.05	72.6	74.6	76.6	78.6	
2			Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	a) Angka Kematian Ibu	18.6	16.6	14.6	12.6	10.0	
3			Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	Prevalensi Stunting	28.06	24.0	20.0	15.0	10.0	
4			Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage) (%)	a) Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis	100	100	100	100	100	
5			Angka Keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) (%)	b) Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis	100	100	100	100	100	
6			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	IUP- cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	86.00	89.00	92.00	94.00	95.00	
7		Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesme tingkat nasional untuk literasi membaca	literasi membaca SD	55.28	58.00	65.00	67.00	70.00	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator		Target					Keterangan		
			Utama	Daerah	Baseline 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045			
8			Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesme tingkat nasional untuk numerasi	numerasi SD	41.72	45.00	50.00	55.00	60.00			
9			Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	numerasi SMP	64.72	68.00	71.00	74.00	77.00			
10			Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	b) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	8.00	8.73	9.77	11.04	13.00			
11			Harapan Lama Sekolah (tahun)	c. harapan lama sekolah	12.86	13.27	13.93	14.87	16.00			
12			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	13.00	15.00	18.00	20.00	25.00			
13			Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	IUP- Tingkat kemiskinan	7.60	6.75	5.30	3.55		1.16	
14				Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan kabupaten	82.00	84.00	87.00	90.00		92.00	
15				Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal	0.7	1.00	1.50	1.75		2.00	
16			Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai sentra industri pengolahan hasil perkebunan	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	IUP- Rasio PDRB industri pengolahan	9.50	9.80	10.50		11.00	11.50
17					Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum(%)	IUP- Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum	0.25	0.35	0.50		0.80	1.00

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator		Target					Keterangan	
			Utama	Daerah	Baseline 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045		
18			Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	250	270	300	320		
19			Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%)	Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Kab/Kota	111	111	111	111	111		
20			Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)	jumlah industri kecil dan menengah pada level Kab/Kota	340	360	380	400	450		
21			Rasio kewirausahaan daerah (%)	jumlah industri ekonomi kreatif di kabupaten	238	250	270	300	320		
22			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB (%)	Persentase koperasi sehat di kab/kota	50	55	60	65	70		
23			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	Tingkat Pengangguran Terbuka	1.70	1.51	1.37	1.34	1.30		
24			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	Jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap	750	775	800	825	850		
25			Tingkat Penguasaan IPTEK	Indeks Inovasi Daerah	59.30	60.6	61.5	62.5	63.5		
26			Integrasi Ekonomi Domestik dan Global	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	IUP- pembentukan modal tetap bruto (% PDRB)	24.78	24.90	25.15	25.50		26.00
27				Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	IUP- ekspor barang dan jasa	2.09	2.20	2.50	2.75		3.00
28	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah terdepan dalam penerapan tata kelola yang adaptif	Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	IUP- Indeks reformasi hukum	96.38	98.50	99.01	99.80	100		
29			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	IUP- Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik	2.35	3.45	3.80	4.01	4.50		
30			Indeks Pelayanan Publik	IUP- Indeks pelayanan publik	2.85	3.65	4.00	4.50	5.00		
31			Indeks Integritas Nasional	persentase capaian pelaksanaan aksi HAM	100	100	100	100	100		

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator		Target					Keterangan
			Utama	Daerah	Baseline 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	
32	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah yang stabil dan demokratis	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak terhadap PDRB (%)	IUP- rasio pajak daerah terhadap PDRB	0.50	0.60	0.70	0.80	1.00	
33			Tingkat Inflasi (%)	IUP- tingkat inflasi	1.49	1.49	1.49	1.49	1.49	
34			Inklusi Keuangan (%)	IUP- inklusi keuangan	85.69	87.00	89.00	92.00	95.00	
35	Terwujudnya Mamuju Tengah sebagai daerah dengan masyarakat yang inklusif, kebudayaan yang maju dan tagguh	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	IUP- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	65.00	67.00	70.00	72.00	75.00	
36			Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	IUP- Indeks ketimpangan gender	0.45	0.40	0.35	0.30	0.25	
37	Lingkungan Hidup Berkualitas		Indeks Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Daerah	IUP- Indeks pengelolaan keanekaragaman hayati daerah	0.540	0.549	0.569	0.586	0.598	
38			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	87.01	87.67	88.05	89.00	91.00	
39			Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (%)	b) rumah tangga dengan akses sanitasi aman	87.00	89.00	91.00	94.00	96.00	
40			Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	Timbunan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah	5110	5500	6000	6500	7000	
41			Proporsi Rumah Tangga (IRT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	Proporsi rumah tanggadengan layanan penuh pengumpulan sampah	13	15	25	50	75	
42	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim		Indeks Risiko Bencana (IRB)	IUP- indeks risiko bencana	154.47	138.00	128.00	110.00	100.00	
43			Persentase Penurunan Emisi GRK (%) Kumulatif	Potensi Penurunan emisi gas rumah kaca (GRK)	59499.59	19456.62	4377454.76	6557850.12	9427921.32	
44	Terwujudnya keseimbangan perkembangan perkembangan pedesaan dan perkotaan	Perkotaan dan Pedesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Persentase Desa Mandiri (%)	IUP- Persentase desa mandiri	12.96	18.51	24.07	29.62	35.18	

No	Sasaran Pokok	Arah Pembangunan	Indikator		Target					Keterangan
			Utama	Daerah	Baseline 2025	2025 - 2029	2030 - 2034	2035 - 2039	2040 - 2045	
45	terpenuhinya ketahanan energi, air dan pangan serta ekosistem digital.	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)	Konsumsi Listrik Per Kapita	377	760	1653.5	2419.4	2930.0	
46			Prevalensi ketidakcukupan Konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment) (%)	Indeks Ketahanan Pangan	78	79.97	81.61	83.01	83.95	
47			Kapasitas Air Baku (m ³ /detik)	b) Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	84	85	90	95	100	
48			Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)	jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	100	100	100	100	

BAB VI

PENUTUP

Untuk mewujudkan visi dan sasaran pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi acuan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah, provinsi, maupun nasional. Kaidah ini dirancang agar RPJPD dapat diimplementasikan secara konsisten, adaptif, akuntabel, dan partisipatif.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 adalah pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Bagi Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah, dokumen ini menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) selama periode 2025-2045. Bagi masyarakat dan *stakeholders*, dokumen ini menjadi pedoman dan rujukan dalam menyatukan gerakan dalam rangka membangun Kabupaten Mamuju Tengah.

Keberhasilan pencapaian pembangunan dapat dicapai apabila didukung dengan komitmen kepemimpinan daerah, konsistensi, kerja keras dan kesungguhan segenap aparat pemerintah, pelaksanaan *good governance*, keberpihakan kepada rakyat, partisipasi masyarakat dan dunia usaha, serta kedisiplinan, ketertiban masyarakat dan kehidupan bermasyarakat.

6.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Konsistensi antara dokumen perencanaan (RPJPD, RPJMD, dan RKPD) dengan penganggaran (APBD) adalah kunci dalam menjamin keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu:

- RPJPD dijadikan sebagai acuan utama penyusunan RPJMD setiap periode kepala daerah.
- Setiap RPJMD dan RKPD harus mengacu pada arah kebijakan dan sasaran jangka panjang.
- Sinkronisasi antara perencanaan dan pendanaan dilakukan melalui sistem e-planning dan e-budgeting.
- Alokasi anggaran dirancang untuk mendukung program prioritas secara berkesinambungan lintas periode pemerintahan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah berkewajiban untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tengah 2025-2029, 2030-2034, 2035-2039, dan 2040-2045 dengan mengacu pada tujuan dan sasaran program-program strategis dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

Organisasi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah serta Masyarakat dan Dunia Usaha berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045.

Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 dengan Rencana Strategis (Renstra) dan program kerja pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah.

6.1.2 Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah berkewajiban untuk melakukan pemantauan, evaluasi dan penyelerasan terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 ke dalam Rencana pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis (Renstra) pada setiap Organisasi Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten Mamuju Tengah. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025-2045 merupakan dasar dalam melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan kinerja tahunan dan lima tahunan.

6.1.3 Mekanisme Perubahan

Apabila dalam perjalanannya terjadi perubahan situasi dari keadaan normal pada saat RPJPD ini ditetapkan, yang bersifat memperlambat atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran 20 (dua puluh) tahun ke depan, maka perubahan situasi tersebut tidak untuk mengubah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi perubahan situasi tersebut hanya dapat memperlambat atau mempercepat tercapainya tujuan dan sasaran. Implikasinya adalah memungkinkan adanya pergeseran target, tetapi masih dalam kerangka pencapaian tujuan semula.

Perubahan RPJPD hanya dilakukan dalam kondisi luar biasa yang mempengaruhi secara signifikan arah pembangunan (misalnya: bencana besar, krisis nasional, atau perubahan kebijakan makro). Mekanisme perubahan dilakukan melalui proses legislasi yang melibatkan DPRD, dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian, partisipasi publik, dan justifikasi ilmiah.

6.1.4 Komunikasi Publik

Keberhasilan pembangunan jangka panjang sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan dukungan masyarakat. Oleh karena itu, strategi komunikasi publik diarahkan pada Penyebarluasan informasi secara terbuka, sistematis, dan berkelanjutan mengenai arah, capaian, dan tantangan pembangunan, pemanfaatan berbagai media, baik digital maupun konvensional, untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, pelibatan aktif masyarakat dalam dialog kebijakan, forum konsultasi publik, dan partisipasi pembangunan, penguatan kapasitas komunikasi pemerintah daerah agar lebih responsif dan transparan.

6.2 Pembiayaan Pembangunan

Pembiayaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Mamuju Tengah Tahun 2025–2045 diarahkan untuk menjamin tersedianya sumber daya keuangan yang cukup, berkelanjutan, dan efisien guna mendukung pencapaian visi dan sasaran pembangunan daerah. Strategi pembiayaan dilakukan dengan mengoptimalkan berbagai sumber pendanaan, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN), dana transfer pusat, serta pembiayaan alternatif lainnya seperti kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU), pinjaman daerah yang terukur, dan partisipasi swasta.

Pemerintah daerah akan terus mendorong efisiensi belanja, peningkatan pendapatan asli daerah (PAD), serta memperluas peluang kolaborasi pembiayaan yang inovatif. Di samping itu, penguatan tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil akan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan anggaran pembangunan. Pendekatan pembiayaan berbasis kinerja juga akan diterapkan untuk memastikan bahwa alokasi anggaran memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Dengan dukungan sistem perencanaan dan penganggaran yang terpadu serta partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan, pembiayaan pembangunan diharapkan dapat menjadi fondasi utama dalam mewujudkan Mamuju Tengah sebagai daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan hingga tahun 2045.